

## MODAL MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

**Tarmizi Abbas**

**Abstract:** *Human capital has been an important role in economic growth. In recent growth literature, human capital has been broadly cited as principal engine of growth. The objective of this study is to investigate and explain the role of human capital in economic growth. Several empirical studies support the importance of human capital in explaining growth. Human capital has two importance role in long run economic growth, that is, serves an inputs in production and determines technological progress. Based on this study, human capital has a significant positive effect on economic growth.*

**Key words :** *human capital and economic growth*

## PENDAHULUAN

Modal dalam arti luas memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengacu pada man Dixon *et al.* (1977) dan World Bank (2001), modal dalam arti luas, meliputi modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*natural capital*). Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat tergantung kepada peningkatan pembentukan modal dalam arti luas, baik pembentukan modal fisik, modal manusia maupun modal alam. Menurut World Bank (2001), modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan.

Lebih lanjut, pembangunan akan terdorong dan berkelanjutan, bila modal per kapita dalam arti luas dapat meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan modal per kapita dapat terjadi bila modal fisik dan modal manusia dapat meningkat dengan tetap menjaga kelestarian modal alam. Hal ini berarti pembangunan akan berkelanjutan bila eksploitasi modal alam dapat diminimalkan sambil meningkatkan pertumbuhan modal fisik dan modal manusia.

Modal fisik dan modal manusia memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Keduanya dapat saling melengkapi, dimana kemajuan dalam modal fisik dapat saja melimpah pada modal manusia dan sebaliknya, kemajuan dalam modal manusia dapat pula melimpah pada modal fisik. Menurut World Bank (2001), kemajuan dalam modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat pengembalian modal fisik.

Perkembangan yang lebih mutakhir dalam literatur ekonomi pembangunan telah mengungkapkan bahwa, disamping modal fisik dan tenaga kerja, modal manusia (*human capital*) juga merupakan faktor yang sangat penting dan memainkan peranan kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal fisik dan akumulasi modal manusia. Kedua jenis modal tersebut merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Stern (1991:128) menyatakan bahwa akumulasi modal fisik dan modal manusia merupakan faktor penentu pertumbuhan (*determinant of growth*).

Modal manusia kini dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi telah mendorong sejumlah ahli ekonomi pembangunan memusatkan kajiannya pada peranan modal manusia dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Perhatian ahli ekonomi pembangunan yang dulu terpusat pada peranan modal fisik kini lebih terfokus pada modal manusia. Rachbini (2002:95) menyatakan bahwa, teori ekonomi tentang kapital dan investasi mulai mengalami perubahan setelah terbukti bahwa sumberdaya manusia memainkan peranan vital dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan ekonomi.

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pertama kalinya dipelopori oleh Schultz (1962) yang menekankan pentingnya investasi di bidang modal manusia. Sebelum Schultz menekankan pentingnya faktor manusia dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kebanyakan ahli ekonomi lebih banyak memusatkan kajiannya pada peranan modal fisik dan mengabaikan modal manusia. Model pertumbuhan yang digunakan dalam setiap analisis

cenderung memperlakukan modal manusia sebagai faktor yang hanya memiliki pengaruh secara tidak langsung dalam pertumbuhan, dimana faktor manusia dianggap tercakup dalam kemajuan teknikal atau residual. Pergeseran perhatian para ahli ekonomi pembangunan dari peranan modal fisik ke modal manusia telah mendorong timbulnya teori pertumbuhan dengan paradigma baru yang dikenal sebagai *new growth model*. Dalam *new growth model* faktor manusia diperlakukan sebagai salah satu faktor penting yang secara langsung mempengaruhi proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagaimana layaknya modal fisik, dan bukan lagi sebagai faktor yang perannya tidak langsung tetapi tercakup di dalam *residual kemajuan teknikal* seperti yang terdapat dalam model neoklasik.

Studi yang dilakukan oleh Solow berhasil menyingkapi besarnya peran faktor *residual kemajuan teknikal* dalam pertumbuhan ekonomi, di mana faktor residual menyumbang 87,5 persen terhadap pertumbuhan output per kapita Amerika Serikat selama 1909-1949 (Jhingan, 2003:373). Sejak penemuan itu, para ahli mulai tertarik untuk membedah elemen-elemen yang terkandung dalam faktor *residual*. Upaya untuk mengeksplanasi faktor residual secara mendalam telah mengungkapkan pentingnya faktor sumberdaya manusia dalam pertumbuhan ekonomi, karena elemen terbesar yang menyusun residual ternyata berasal dari peningkatan ilmu pengetahuan (*advanced of knowledge*).

Peningkatan ilmu pengetahuan terkait erat dengan perkembangan sektor pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (*job training*). Meningkatnya pendidikan tenaga kerja akan mempercepat adopsi teknologi dan metode produksi baru yang menjadikan tenaga kerja lebih produktif. Gillis *et al.* (1992:217) menyatakan bahwa, salah satu elemen terpenting dari faktor residual adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menjadikan tenaga kerja lebih produktif.

Becker (1984:24) menyatakan bahwa, kemajuan ekonomi yang dramatis yang dicapai Jepang, Taiwan dan negara Asia lainnya dalam dekade terakhir menggambarkan pentingnya modal manusia dalam pertumbuhan. Walaupun miskin modal/sumberdaya alam dan mendapat diskriminasi dari negara-negara Barat, namun karena investasi di bidang modal manusia yang tinggi mereka berhasil mencapai pertumbuhan yang sangat cepat sehingga dijuluki *Asian Tigers*.

Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia Timur yang miskin modal/sumberdaya alam, namun kaya akan modal/sumberdaya manusia, menunjukkan bahwa peranan modal manusia dalam keseluruhan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur memiliki kedudukan yang strategis. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, telah melakukan investasi yang meluas di bidang modal manusia.

Keunggulan dalam sumberdaya manusia relatif terhadap sumberdaya alam ternyata merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara Asia Timur yang memiliki keunggulan sumberdaya manusia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang kaya sumberdaya alam. Negara-negara Asia Timur yang miskin sumberdaya alam telah berkembang dengan pesat dan menjadi negara terdepan di kawasan Asia karena

memiliki keunggulan dalam bidang sumberdaya manusia relatif terhadap sumberdaya alam.

Keunggulan dalam sumberdaya manusia dicapai melalui investasi yang terus meningkat di bidang pendidikan yang memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang terus-menerus dan semakin membesar yang terkandung dalam tenaga kerja dan masyarakatnya.

Studi ini berusaha untuk menyelidiki secara mendalam mengenai keterkaitan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kajian kepustakaan dari beberapa hasil penelitian empirik baik berdasarkan penelitian menggunakan basis data antar negara (*cross country study*) maupun penelitian menggunakan data runtun waktu (*time series study*).

## **PEMBAHASAN**

Suatu eksplanasi yang cukup penting mengenai sumber pertumbuhan ekonomi dan peran faktor residual berasal dari studi Denison (1962) yang mengkaji pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama periode 1909-1929 dan periode 1929-1957. Selama periode 1909-1929, pertumbuhan pendidikan tenaga kerja 0,56 persen per tahun, mampu menyumbang sebesar 0,35 persen poin terhadap pertumbuhan tahunan pendapatan nasional ril yang dalam periode tersebut tumbuh dengan laju 2,82 persen per tahun. Dalam periode 1929-1957, pertumbuhan pendidikan tenaga kerja meningkat menjadi 0,93 persen per tahun dan mampu menyumbang sampai 0,67 persen poin terhadap pertumbuhan tahunan pendapatan nasional ril atau menyumbang sebesar 22,87 persen terhadap pertumbuhan tahunan pendapatan nasional ril.

**Tabel 1: Sumber Pertumbuhan Pendapatan Nasional Ril  
Amerika Serikat 1909-1957**

Sumber Pertumbuhan ( <i>Source of Growth</i> )	Laju Pertumbuhan (persen per tahun)		Kontribusi (persentase point)	
	1909-29	1929-57	1909-29	1929-57
<i>REAL NATIONAL INCOME</i>	<b>2.82</b>	<b>2.93</b>	<b>2.82</b>	<b>2.93</b>
<i>INCREASE IN TOTAL INPUTS</i>	<b>2.24</b>	<b>1.99</b>	<b>2.26</b>	<b>2.00</b>
<i>Labour, adjusted for quality change</i>	2.30	2.16	1.53	1.57
<i>Employment and hours</i>	1.62	1.08	1.11	0.80
<i>Employment</i>	1.58	1.31	1.11	1.00
<i>Effect on shorter hours</i>	0.03	-0.23	0.00	-0.20
<i>Education</i>	0.56	0.93	0.35	0.67
<i>Increased experience and better utilization of women workers</i>	0.10	0.15	0.06	0.11
<i>Changes in age-sex composition of labor force</i>	0.01	-0.01	0.01	-0.01
<i>Land</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Capital</i>	3.16	1.88	0.73	0.43
<i>Non farm residential structures</i>	3.49	1.46	0.13	0.05
<i>Othre structures and equipment</i>	2.93	1.85	0.41	0.28
<i>Inventories</i>	3.31	1.90	0.16	0.08
<i>US owned assets abroad</i>	4.20	1.97	0.02	0.02
<i>Foreign assets in US.</i>	-1.85	1.37	0.01	0.00
<i>INCREASE IN OUTPUT PER UNIT OF INPUT</i>	<b>0.56</b>	<b>0.92</b>	<b>0.56</b>	<b>0.93</b>

Sumber: Denison (1962).

Lebih lanjut, Denison mengungkapkan pula bahwa, pertumbuhan pendapatan nasional ril Amerika Serikat 2,93 persen per tahun selama priode 1929-1957, berasal dari peningkatan penggunaan input 2,00 persen *point* dan 0,93 persen *point* berasal dari peningkatan output per unit input. Pertumbuhan output per unit input, sebahagian besar berasal dari peningkatan pengetahuan yang tercatat sebesar 0,58 persen *point*. Dengan demikian, kontribusi peningkatan pengetahuan terhadap pertumbuhan pendapatan nasional ril 19,79 persen, dan bila dihitung terhadap peningkatan output per unit input, kontribusi peningkatan pengetahuan 62,36 persen.

Penelitian Denison dan Chung (1976) merupakan suatu studi komprehensif yang mengkaji bagaimana ekonomi Jepang tumbuh sangat cepat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Jepang setelah perang. Hasil penelitian Denison dan Chung menunjukkan bahwa perekonomian Jepang tumbuh sangat cepat rata-rata 8.77 persen per tahun selama periode 1953-1971. Denison menemukan fakta empirik dibalik pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat cepat setelah masa perang, adalah

meningkatnya akumulasi ilmu pengetahuan yang telah berperan besar dalam peningkatan output per unit input.

**Tabel 2: Sumber Pertumbuhan Pendapatan Nasional Ril  
Perekonomian Jepang Pasca Perang**

Sumber Pertumbuhan ( <i>Source of Growth</i> )	Periode		
	1953-1971	1953-1961	1961-1971
Pendapatan Nasional Ril ( <i>REAL NATIONAL INCOME</i> )	<b>8.77</b>	<b>8.13</b>	<b>9.29</b>
Faktor Produksi Total ( <i>TOTAL FACTOR INPUTS</i> )	<b>3.95</b>	<b>3.53</b>	<b>4.35</b>
Tanaga Kerja ( <i>Labour</i> )	1.85	1.91	1.78
Tanah ( <i>Land</i> )	0.00	0.00	0.00
Modal ( <i>Capital</i> )	2.10	1.62	2.57
Peningkatan output per unit input ( <i>INCREASE IN INPUT PER UNIT</i> )	<b>4.82</b>	<b>4.60</b>	<b>4.98</b>
Peningkatan ilmu pengetahuan ( <i>Advance in knowledge</i> )	1.97	1.42	2.43
Perbaikan alokasi sumberdaya ( <i>Improve resources allocation</i> )	0.95	1.08	0.82
Skala Ekonomi ( <i>Economies of scale</i> )	1.94	1.90	1.96
Faktor lainnya ( <i>Irregular factor</i> )	-0.04	0.20	-0.27

Sumber: Denison dan Chung (1976:38). Tabel 4.6.

Pertumbuhan output per unit input selama periode 1953-1961 yang tercatat sebesar 4.82 persen poin, sebesar 1.97 persen poin berasal dari akumulasi ilmu pengetahuan, sebesar 1.94 berasal dari kenaikan skala ekonomi dan 0.95 persen poin berasal dari perbaikan alokasi sumberdaya. Peranan akumulasi ilmu pengetahuan terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang selama periode 1953-1961 mencapai 22.46 persen.

Selanjutnya, Chuang (1999) mengkaji peranan modal manusia dalam pembangunan ekonomi Taiwan. Dalam studinya Chuang menggunakan model analisis sebagai berikut:

$$(1) \quad \ln Y_t = \ln A + \alpha \ln K_t + \beta \ln (H_t L_t) + \gamma H_t$$

dimana  $Y_t$  = output,  $K_t$  = modal fisik,  $H_t$  = *human capital*,  $H_t L_t$  = *human capital embodied* yang juga menunjukkan *effective labor* atau tenaga kerja dalam unit efisiensi dan  $A$  menunjukkan faktor teknologi yang tergantung pada stok modal manusia.

Selanjutnya Chuang mempertimbangkan *human capital* yang murni *disembodied* dalam tenaga kerja, maka variasi dari persamaan (1) menjadi:

$$(2) \quad \ln Y_t = \ln A + \alpha \ln K_t + \beta \ln L_t + \phi H_t$$

Dari hasil penelitiannya, Chuang memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$(3) \quad \ln Y_t = 1.1708 + 0.4189 \ln K_t + 0.5811 \ln L_t + 0.2475 H_t$$

$$SE \quad (0.1831) \quad (0.0973) \quad (0.0973) \quad (0.0087)$$

$$R^2=0.99, N=31$$

Dari persamaan regresi (3) di atas, terlihat bahwa, *total rate return* dari pendidikan sebesar 24.75 persen, yang berarti untuk setiap penambahan satu tahun pendidikan angkatan kerja akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional sebesar 24.75 persen. Kontribusi faktor modal fisik, tenaga kerja dan *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi Taiwan masing-masing sebesar 42 persen untuk modal fisik, 20 persen untuk tenaga kerja dan 33 persen untuk modal manusia.

Selanjutnya Chuang juga menganalisis peranan *human capital* dengan memilah *human capital* dalam bentuk faktor yang *embodied* dan faktor yang *disembodied*, hasil regresinya adalah sebagai berikut:

$$(4) \quad \ln Y_t = 0.5183 + 0.3937 \ln K_t + 0.6063 \ln (H_t L_t) + 0.1881 H_t$$

$$SE \quad (0.0999) \quad (0.1040) \quad (0.1040) \quad (0.0389)$$

$$R^2=0.99, N=31$$

Berdasarkan persamaan regresi (4) di atas terlihat bahwa, efek eksternal pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi Taiwan mencapai 19 persen. Dengan demikian *private rate return* pendidikan sama dengan 6 persen yang merupakan selisih dari *total rate return* yang tercatat 25 persen dengan efek eksternal 19 persen.

Hasil perhitungan kontribusi setiap faktor dalam pertumbuhan ekonomi Taiwan secara keseluruhan menunjukkan bahwa, kontribusi modal fisik sebesar 39 persen, tenaga kerja efektif sebesar 31 persen dan *disembodied human capital* sebesar 25 persen. Dengan demikian, dalam arti yang lebih luas, peranan *human capital* dalam pertumbuhan ekonomi Taiwan (*embodied + disembodied*) *human capital* adalah sebesar 56 persen. Lebih lanjut terungkap pula bahwa, peranan modal fisik, modal manusia dan tenaga kerja mampu menjelaskan sebesar 95 persen dari pertumbuhan ekonomi Taiwan secara keseluruhan selama periode analisis atau peranan residul Solow hanya sebesar 5 persen.

Lebih lanjut, Hanushek dan Kimko menggunakan 6 persamaan regresi *cross-country* untuk melihat efek dari variabel *human capital* dan kualitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan tahunan GDP ril per kapita dari 31 negara selama periode 1960-1990. Hasil studi Hanushek dan Kimko ditampilkan pada Tabel 2.2, yang menunjukkan bahwa, pertumbuhan tahunan GDP per kapita 31 negara dipengaruhi secara positif oleh variabel lama bersekolah dan kualitas tenaga kerja. Sebaliknya tingkat pendapatan per kapita awal dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tahunan GDP per kapita.

Temuan Hanushek dan Kimko menunjukkan bahwa, dengan mengikutsertakan variabel kualitas tenaga kerja dalam model regresi, maka kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas semakin meningkat

yang diperlihatkan oleh peningkatan nilai  $R^2$  pada saat kualitas tenaga kerja dimasukkan dalam model.

Hanushek dan Kimko juga menganalisis efek pendidikan dan kualitas tenaga kerja secara lebih mendalam dengan menambah variabel rasio guru murid sekolah dasar, rasio guru murid sekolah menengah dan pengeluaran total sektor pendidikan/PDB ke dalam model analisis. Hasil analisis Hanushek dan Kimko menunjukkan bahwa, kualitas tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan PDB ril per kapita secara positif dan signifikan. Sedangkan variabel pendapatan perkapita awal mempengaruhi pertumbuhan PDB ril per kapita secara negatif dan signifikan.

**Tabel 3: Estimasi Dasar 1960-1990 Model Pertumbuhan Antar Negara**  
(*Base Line Estimate 1960-1990 Cross-Country Growth Model*)

Variabel Independen	Persaman Regresi					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konstanta ( <i>Constant</i> )	2.265 (0.863)	-1.900 (1.004)	-0.989 (0.910)	4.092 (0.974)	-1.752 (1.346)	-0.151 (1.142)
Pendapatan per kapita awal ( <i>Initial per capita income</i> ), $Y_{60}$	-0.609 (0.186)	-0.472 (0.096)	-4.060 (0.103)	-0.745 (0.181)	-0.481 (0.093)	-0.517 (0.1120)
Lama bersekolah ( <i>Quantity of schooling</i> ), $S$	0.548 (0.209)	0.103 (0.126)	0.100 (0.146)	0.519 (0.195)	0.106 (0.119)	0.116 (0.139)
Laju Pertumbuhan Penduduk ( <i>Annual population growth</i> ), $g_L$				-0.713 (0.224)	-0.038 (0.215)	-0.250 (0.211)
Kualitas tenaga kerja ( <i>Labor force quality</i> ), $QL_1$		0.134 (0.023)			0.133 (0.024)	
Kualitas tenaga kerja ( <i>Labor force quality</i> ), $QL_2$			0.104 (0.015)			0.098 (0.015)
$R^2$	0.33	0.73	0.68	0.41	0.73	0.69

Sumber: Hanushek dan Kimko (2000:1190).

*Dependent Variabel = average annual growth rate in per capita GDP*

Angka dalam tanda kurung = *standard error*.

Namun demikian, variabel lama bersekolah, rasio guru murid sekolah dasar, rasio guru murid sekolah menengah dan pengeluaran total sektor pendidikan/PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB ril per kapita. Berdasarkan temuan Hanushek dan Kimko, dapat disimpulkan bahwa, kualitas tenaga kerja merupakan variabel yang cukup baik untuk digunakan sebagai proksi *human capital*, dibandingkan dengan variabel lama bersekolah, rasio guru murid sekolah dasar, rasio guru murid sekolah menengah dan pengeluaran total sektor pendidikan/PDB.

**Tabel 4: Model Regresi Pertumbuhan Antar Negara**

<i>Dependent Variable = average annual growth rate in per capita GDP</i>	Persamaan Regresi	
	(1)	(2)
Konstanta ( <i>Constant</i> )	-1.1113 (0.091)	-1.042 (0.992)
Pendapatan Perkapita Awal ( <i>Initial per capita income</i> ), $Y_{60}$	-0.393 (0.095)	-0.368 (0.095)
Lama bersekolah ( <i>Quantity of schooling</i> ), $S$	0.070 (0.104)	0.065 (0.117)
Ratio guru murid sekolah dasar ( <i>Pupil teacher ratio in primary school</i> )	0.001 (0.026)	0.006 (0.024)
Ratio guru murid sekolah menengah ( <i>Pupil teacher ratio in secondary school</i> )	-0.038 (0.044)	-0.038 (0.045)
Pengeluaran total sektor pendidikan/PDB ( <i>Total expenditure on education/GDP</i> )	7.388 (16.060)	3.968 (15.100)
Kualitas tenaga kerja ( <i>Labor force quality</i> ), $QL_1$	0.112 (0.020)	
Kualitas tenaga kerja ( <i>Labor force quality</i> ), $QL_2$		0.100 (0.015)
Jumlah negara ( <i>Number of countries</i> )	76	78
$R^2$	0.42	0.42

Sumber: Hanushek dan Kimko (2000:1201).

Angka dalam tanda kurung merupakan *standard error*.

Persamaan Regresi (1) menggunakan variabel *Labor force quality* ( $QL_1$ )

Persamaan Regresi (2) menggunakan variabel *Labor force quality* ( $QL_2$ )

Alesina *et al.* (2000) melakukan studi *cross section countries* terhadap 97 negara, menganalisis pengaruh variabel ukuran negara, keterbukaan, log pendapatan per kapita 1960, modal manusia pria, angka kelahiran, konsumsi pemerintah dan tingkat investasi terhadap pertumbuhan PDB per kapita selama periode 1960-1989.

Alesina *et al.* menggunakan *log GDP* dan *log population* untuk mengukur variabel *country size* yang masing-masing digunakan dalam persamaan regresi yang terpisah. Dari hasil studinya, Alesina, Spolaore dan Maggi, menemukan bahwa ukuran negara, keterbukaan, modal manusia pria dan tingkat investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita selama periode 1960-1989. Sebaliknya, variabel interaksi antara ukuran negara dan keterbukaan (*size x openness*), log pendapatan per kapita 1960, modal manusia wanita, angka kelahiran dan konsumsi pemerintah memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan PDB per kapita selama periode 1960-1989.

Namun dari semua variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita, modal manusia pria merupakan variabel yang paling besar memberikan efek positif terhadap pertumbuhan PDB ril per kapita baik pada model regresi (1) maupun pada model regresi (2). Temuan Alesina *et al.* semakin

memperkuat pentingnya modal manusia dalam mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita.

**Tabel 5: Regresi Cross Country Modal Manusia dan Pertumbuhan**

Varabel Independen	Regresi (1)	Regresi (2)
	Size=log GDP	Size=log Population
Konstanta ( <i>Intercept</i> )	6.299 (2.828)	7.884 (2.495)
Ukuran negara $\times$ keterbukaan ( <i>Size x Openess</i> )	-0.003 (0.002)	-0.004 (0.002)
Ukuran negara ( <i>Country size</i> )	0.306 (0.102)	0.287 (0.118)
Keterbukaan ( <i>Openess</i> )	0.060 (0.030)	0.044 (0.017)
Log pendapatan per kapita 1960 ( <i>Log per capita income 1960</i> )	-1.277 (0.216)	-1.144 (0.198)
Angka kelahiran ( <i>Fertility rate</i> )	-0.322 (0.126)	-0.306 (0.127)
Modal manusia pria ( <i>Male human capital</i> )	1.684 (0.441)	1.817 (0.454)
Modal manusia wanita ( <i>Female human capital</i> )	-1.465 (0.448)	-1.587 (0.448)
Konsumsi pemerintah ( <i>Government Consumption</i> )	-0.043 (0.020)	-0.044 (0.020)
Tingkat Investasi ( <i>Invesment rate</i> )	0.076 (0.024)	0.084 (0.024)
Adjusted $R^2$	0.65	0.65
Jumlah observasi	97	97

Sumber: Alesina *et al.* (2000:1284)

*Variabel Dependent = growth of per kapita GDP*

Angka dalam tanda kurung = *standard error*

Berlawanan dengan modal manusia pria, modal manusia wanita justru memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan PDB ril per kapita. Implikasi yang dapat ditarik dari hasil studi Alesina, Spolaore dan Wacziarg adalah berperannya efek gender yang mempengaruhi peranan modal manusia dalam kaitannya dengan pertumbuhan PDB ril per kapita.

## KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam jangka panjang, modal manusia memiliki pengaruh positif dan significant terhadap output dan kemajuan teknikal.

2. Akumulasi ilmu pengetahuan yang terus-menerus memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi .
3. Pertumbuhan tahunan output per kapita dipengaruhi secara positif oleh variabel lama bersekolah dan kualitas tenaga kerja.
4. Kualitas tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan output ril per kapita secara positif dan signifikan.
5. Efek gender yang mempengaruhi peranan modal manusia dalam kaitannya dengan pertumbuhan output ril per kapita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., E. Spolaore and R. Wacziarg .2000. Economic Integration and Political Disintegration. *American Economic Review*. 90(5): 1276-1296.
- Becker, G.S. 1984. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Denison, E.F and W.K. Chung .1976. *How Japan's Economy Grew so Fast. The Sources of Postwar Expansion*. Washington: The Brookings Institution.
- Dixon, J. A., K. Hamilton and M. Clemens.1997. Measuring the Wealth of Nations dalam Word Bank. *Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development*. Washington: Word Bank
- Gillis, M., D.H. Perkins., M. Roemer and D.R. Snodgrass. 1992. *Economics of Development*. New York: W.W. Norton & Co.
- Goodfriend, M. and J. McDermott. 1995. Early Development. *The American*
- Hanushek, E.A. and D.D. Kimko. 2000. Schooling, Labour-Force Quality and the Growth of Nations. *The American Economic Review*. 90(5): 1184-1208.
- Jhingan, M.L. 2002. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Terjemahan D. Guritno. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachbini, D. J. 2001. *Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Schultz, T.W. 1962. Investment in Human Capital. in. Peter M. Gutmann (edt). *Economic Growth an American Problem*. New York: Prentice-Hall Inc.
- Solow, R.M. 1962. Economic Growth. in. Peter M. Gutmann (edt). *Economic Growth an American Problem*. New York: Prntice-Hall Inc.
- Stern, N. 1991. The Determinat of Growth . *Economic Journal*, 101(404):123-33. reprinted in Deepak Lal (edt). *Development Economics*. Volume I. Vermont: Edward Elgar Publishing Company.
- World Bank. 2001. *The Growth Quality. Kualitas Pertumbuhan*. Terjemahan Marcus Prihminto Widodo. Jakarta: Penerbit Gramedia.

## ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH

**Cut Putri Mellita Sari**

**Abstract:** *The main purpose of this reseach is to find out the magnitude effect of economic fundamental factors on rupiah's exchange rate, which consist of the distinction of interest rate, money supply, net foreign asset and foreign trade. So the government could take any monetary policy to defence exchange rate fluctuations. This reseach use time series data from 1982 to 2003 conducted by BPS for Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Data is processed and analized by using the Ordinary Least Square (OLS). The estimations result shows that fundamental factors such as money supply, net foreign asset and foreign trade has a significant influence on rupiah's exchange rate mean while interest rate doesn't have any significant influence on rupiah's exchange rate.*

**Key words :** *Fundamental factors, Exchange rate.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia semakin lama berlangsung semakin cepat dan sulit diprediksikan. Era globalisasi kini sudah benar-benar hadir dan terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh dari era globalisasi itu sendiri telah membuat kebijakan pemerintah, kesepakatan ekonomi antar negara dan cara dunia usaha melakukan kegiatan usahanya mengalami perubahan besar-besaran. Dengan demikian era globalisasi dapat digambarkan sebagai suatu proses saling ketergantungan yang akan terus berkembang diantara negara-negara dunia.

Terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan suatu bentuk aksi dan reaksi dari keterbukaan era globalisasi itu sendiri, dimana perekonomian nasional Indonesia membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam tatanan perekonomiannya menuju ekonomi pasar bebas (global).

Situasi perekonomian diberbagai negara di dunia pada bulan Juli 1997 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, termasuk Indonesia. Ketidakstabilan mata uang Jepang (Yen) terhadap Dollar telah memperlemah posisi Rupiah. Janji akan diberikan pinjaman kepada Indonesia dari beberapa donor internasional juga tidak dapat memperkuat posisi rupiah, malah semakin melemahkan posisi mata uang Indonesia yaitu dari Rp.2.300,- per satu dollar Amerika pada bulan Juli 1997 sesaat sebelum krisis menjadi Rp.15.000,- per satu dollar Amerika pada tanggal 15 Juni 1998. Beberapa hari kemudian malah menjadi Rp.17.000,- per satu dollar Amerika. Peristiwa gejolak kurs membuktikan bahwa kondisi fundamental ekonomi merupakan faktor yang penting (Wirakartakusumah, 2004).

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis moneter ini terjadi meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus (Suseno, 2001).

Secara umum, kondisi ekonomi moneter Indonesia pada tahun 2003 diwarnai oleh perkembangan yang menggembirakan. Hal ini antara lain tercermin dari tekanan inflasi yang menurun dari 10,03% menjadi 5,33%, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat yaitu sebesar Rp.8.537/ US \$. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1: Indikator Utama ekonomi Indonesia 1999-2003**

	1999	2000	2001	2002	2003
Pertumbuhan ekonomi (%)	0,31	4,77	3,32	3,66	3,56
Tingkat inflasi(%)	2,01	9,35	12,55	10,03	5,33
Neraca pembayaran (juta US\$)	-3,292	-5,042	1,378	-1,996	-1,479
Neraca perdagangan	20,641	25,041	22,694	5,823	6,489
Neraca berjalan	5,783	7,991	6,9	1,5	2,294
Neraca modal	-4,569	-6,773	-0,922	-271	590
Pemerintah(netto)	5,353	3,217	-7,4	-80	-400
Swasta (netto)	-7,177	-5,439	-2,375	-370	733
PMA (netto)	10,892	15,42	9,028	16,675	17,275
Cadangan devisa akhir tahun (US\$ juta)	27,054	29,394	28,016	32,037	34,057
(bulan impor nonmigas c&f)	6,7	6	6,2	6,6	6,7
Jumlah Uang yang beredar (Milyar Rp)	124,633	162,186	177,731	191,94	223799
Debt-service ratio (%)	57	41,1	41,4	33,1	30,2
Nilai tukar Des. (Rp/US\$)	8.000	9.595	10.400	8.940	8.537
APBN (Rp.milyar)	33,156	40,486	27,675	34,432	34,433

Sumber : Statistik Keuangan Indonesia, berbagai edisi.

Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar AS dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas (*free floating*) menggantikan sistem *managed floating* yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Dengan demikian Bank Indonesia tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata.

Perubahan sistem nilai tukar ini sangat berpengaruh pada posisi nilai tukar rupiah, khususnya setelah sistem nilai tukar beralih kepada sistem nilai tukar mengambang penuh, baik mengambang terkendali maupun mengambang bebas. Saat kurs pasar dipatok dengan pita intervensi antara batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar sangat tidak berarti, karena adanya unsur intervensi pemerintah dan fluktuasi nilai tukar semakin tidak menentu pada saat terjadinya periode krisis nilai tukar. Hal ini berpengaruh pada nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya mata uang dollar Amerika.

Gejolak nilai tukar dalam sistem nilai tukar yang fleksibel tidak dapat dihindari. Hal yang perlu dilakukan adalah meredam gejolak nilai tukar supaya tidak berlebihan agar tidak membahayakan stabilitas perekonomian. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah sebaiknya perlu mengestimasi nilai tukar keseimbangan dengan cara mengontrol faktor-faktor fundamental perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pendekatan ekonometris untuk melihat perubahan-perubahan posisi nilai tukar di pasar yang berkaitan dengan

perubahan-perubahan fundamental perekonomian hingga dapat diperoleh estimasi nilai tukar keseimbangan.

### TINJAUAN TEORITIS

Nilai tukar atau kurs (ER) didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik (Salvatore, 1997 : 49). Sedangkan menurut Krugman (2000 : 335), kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain.

Dalam perdagangan internasional, pertukaran barang dan jasa antar negara tidak lagi menggunakan mata uang yang bersangkutan, tetapi menggunakan mata uang yang dapat diterima semua negara. Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain disebut kurs atau nilai tukar (*Exchange Rate*). Nilai tukar memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional, karena nilai tukar memungkinkan kita untuk membandingkan harga-harga semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara (Krugman dan Maurice, 1992 : 40).

Jumlah uang beredar secara relatif mempengaruhi nilai tukar, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri. Suatu mata uang akan berkurang nilainya apabila jumlah uang beredar makin banyak. Keterkaitan antar produk nasional dengan permintaan terhadap mata uang suatu negara merupakan hal yang utama bagi teori kuantitas permintaan terhadap uang yang secara langsung merupakan bagian dari nilai Produk Nasional Bruto (GNP). Dalam persamaan yang terpisah bagi suatu negara dan bagian dunia lainnya, persamaan teori Marshall mengenai kuantitas uang dapat ditulis sebagai berikut :

$$M = k \cdot P \cdot y \text{ dan } M^f = k^f \cdot P^f \cdot y^f \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- M = Jumlah Uang Beredar di suatu negara
- $M^f$  = Jumlah Uang Asing yang Beredar (dollar AS)
- P = Tingkat Harga di Dalam Negeri
- $P^f$  = Tingkat Harga Luar Negeri
- y = Produk Nasional Bruto
- $y^f$  = Pendapatan Luar Negeri

Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas yang berlaku saat ini, bank sentral membiarkan nilai tukar menyesuaikan diri untuk menyamakan nilainya di pasar. Dengan perkataan lain nilai tukar tercipta melalui mekanisme pasar secara murni. Keinginan dari penduduk suatu negara untuk memperoleh suatu jenis mata uang asing dapatlah dipandang sebagai permintaan ke atas valuta asing oleh penduduk suatu negara itu. Sedangkan penawaran valuta asing adalah keinginan penduduk Amerika untuk membeli uang rupiah (Sukirno, 1999 ; 359-360).

Dalam sistem nilai tukar (kurs), memungkinkan terjadinya *depresiasi* dan *apresiasi* terhadap dollar di pasar. *Depresiasi* terhadap rupiah terjadi apabila terdapat kenaikan harga valuta asing (dollar) dalam satuan mata uang domestik (rupiah). menyebabkan kenaikan nilai dollar dan kemerosotan nilai rupiah. Ini berarti kenaikan dalam permintaan itu menyebabkan penduduk Indonesia membayar lebih mahal untuk setiap dollar yang ingin diperolehnya.

Pada kondisi *apresiasi* rupiah terhadap dollar merupakan penurunan harga valuta asing (dollar) dalam satuan mata uang domestik (rupiah). Apresiasi mata uang domestik sama dengan depresiasi valuta asing dan sebaliknya depresiasi mata uang domestik sama dengan apresiasi valuta asing.

Nilai tukar (kurs) sangat berkaitan dengan konsep konvertibilitas mata uang (*currency convertibility*). Konsep konvertibilitas mata uang menunjukkan derajat kebebasan suatu mata uang untuk dapat dikonversikan / ditukarkan ke dalam mata uang lainnya. Meskipun konversi suatu mata uang ke mata uang lainnya tidak dihambat oleh peraturan pemerintah, namun tidak setiap mata uang dapat dengan mudah dipertukarkan dalam pasar valuta asing dunia. Sehingga konsep konvertibilitas ini sangat erat kaitannya dengan perbedaan antara mata uang kuat dan mata uang lemah (*hard and soft currencies*) (Kuncoro, 1996 : 18). Apabila konvertibilitas dari suatu mata uang itu dihambat, maka akan menimbulkan adanya pasar gelap (*black market*) dan beroperasi di luar kontrol pemerintah. Jadi dengan kata lain, konvertibilitas mata uang juga menunjukkan ada tidaknya pasar yang bebas dan aktif bagi suatu mata uang untuk dapat dipertukarkan dengan mata uang lainnya.

Rivera (1994 : 15) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang domestik dan mata uang asing diartikan sebagai jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli mata uang asing. Bila nilai tukar meningkat berarti mata uang domestik mengalami *depresiasi* dan mata uang asing mengalami *apresiasi*. Sebaliknya penurunan nilai tukar mencerminkan terjadinya *apresiasi* mata uang domestik dan *depresiasi* mata uang asing.

Sebagai contoh, meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dari Rp.6.700 / \$1 menjadi Rp.11.400 / \$1. Ini berarti bahwa dollar Amerika menjadi lebih mahal bila dihitung dalam nilai rupiah. Hal tersebut mencerminkan bahwa nilai dollar Amerika naik karena jumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli dollar meningkat. Dengan kata lain dollar mengalami *apresiasi* terhadap nilai tukar rupiah. Sedangkan dari sisi yang lain nilai tukar rupiah menjadi lebih mahal bila dinilai dalam dollar Amerika yang artinya nilai tukar rupiah mengalami *depresiasi* terhadap dollar Amerika.

Nilai tukar dalam pasar valuta asing biasanya dikutip menurut nilai tukar beli (*bid rates*) dan nilai tukar jual (*offer rates*). Nilai tukar beli adalah nilai tukar di mana bank bersedia membeli suatu mata uang. Dalam praktek bank yang terjun dalam pasar valuta asing diharuskan mencantumkan nilai tukar beli dan nilai tukar jual sekaligus, untuk mata uang yang diperdagangkan. Ketika mencantumkan nilai tukar jual dan beli untuk mata uang tertentu, nilai tukar beli biasanya lebih rendah dari nilai tukar jualnya, Perbedaan antara nilai tukar beli dan jual sering disebut *bid-offer spread* atau *trading margin*.

Besar kecilnya *bid-offer spread* atau *trading margin* suatu mata uang yang diperdagangkan dapat dipengaruhi oleh :

1. Jumlah mata uang yang diperdagangkan yaitu semakin kecil atau sedikit jumlahnya maka semakin besar marginnya.
2. Besar kecilnya pusat keuangan yang memperdagangkan valuta asing yaitu apabila perdagangan valuta asing terjadi di pusat keuangan dunia seperti New York atau London maka marginnya akan semakin kecil

3. Fluktuasi harga mata uang yaitu semakin besar fluktuasi maka semakin besar marginnya.
4. Jenis instrumen yang diperdagangkan yaitu apabila uang kertas atau cek bank yang diperdagangkan biasanya marginnya lebih tinggi dihargai.

Penentuan nilai tukar didunia pada dasarnya dipengaruhi oleh pertama, persetujuan dimana suatu negara atau kelompok negara yang bergabung dalam artikel perjanjian IMF atau diluar perjanjian tersebut. Kedua berdasarkan kekuatan pasar dan ketiga berdasarkan manajemen nilai tukar oleh pemerintah (Lindert, 1994 : 32) sehingga dewasa ini dikenal kebijakan nilai tukar yang merupakan kebijakan nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*) dan nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate*).

Dalam kasus Indonesia penentuan nilai tukar didasarkan pada nilai tukar mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini nilai tukar ditentukan oleh pasar. Artinya nilai tukar bebas bergerak berdasarkan mekanisme pasar, sehingga pemerintah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan intervensi. Dengan demikian nilai tukar yang terbentuk semata-mata ditentukan oleh variabel-variabel dasar yang dapat mempengaruhi nilai tukar tersebut.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pengaruh faktor fundamental ekonomi terhadap nilai tukar rupiah. Data-data mengenai perbedaan tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, cadangan devisa dan perdagangan luar negeri digunakan untuk menganalisa pengaruh faktor-faktor fundamental ekonomi terhadap nilai tukar rupiah .

Kurun waktu penelitian adalah mulai tahun 1982-2003. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Hal ini dikarenakan Amerika termasuk mitra dagang utama Indonesia dan sebagai barometer nilai tukar mata uang negara-negara diseluruh dunia.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari statistik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan pusat Statistik, Statistik keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, publikasi *International Monetary Fund* (IMF) serta data-data yang dipublikasikan melalui tulisan ilmiah dalam jurnal, majalah, koran dan literatur-literatur yang membahas masalah moneter, khususnya nilai tukar rupiah. Data sekunder yang digunakan untuk menganalisis adalah data rangkaian masa (time series) dalam data kwartalan yaitu mulai tahun 1982-2003. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih baik. Untuk data kwartalan yang tidak tersedia dipakai metode interpolasi (Insukindiro, 1990 :1-12)

Untuk menganalisis pengaruh faktor fundamental perekonomian terhadap nilai tukar rupiah dianalisa dengan menggunakan model Szakmary-Mathur dan Kemre (1997,2002) yang telah dimodifikasi yaitu :

$$ER = f( R, M^s, NFA, FT(X-M)) \dots \dots \dots ( 6 )$$

Berdasarkan fungsi di atas maka dapat dibentuk model analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut :

$$\ln ER = \beta_0 + \beta_1 \ln R + \beta_2 \ln MS + \beta_3 \ln NFA + \beta_4 \ln XM + et \dots \dots \dots ( 7 )$$

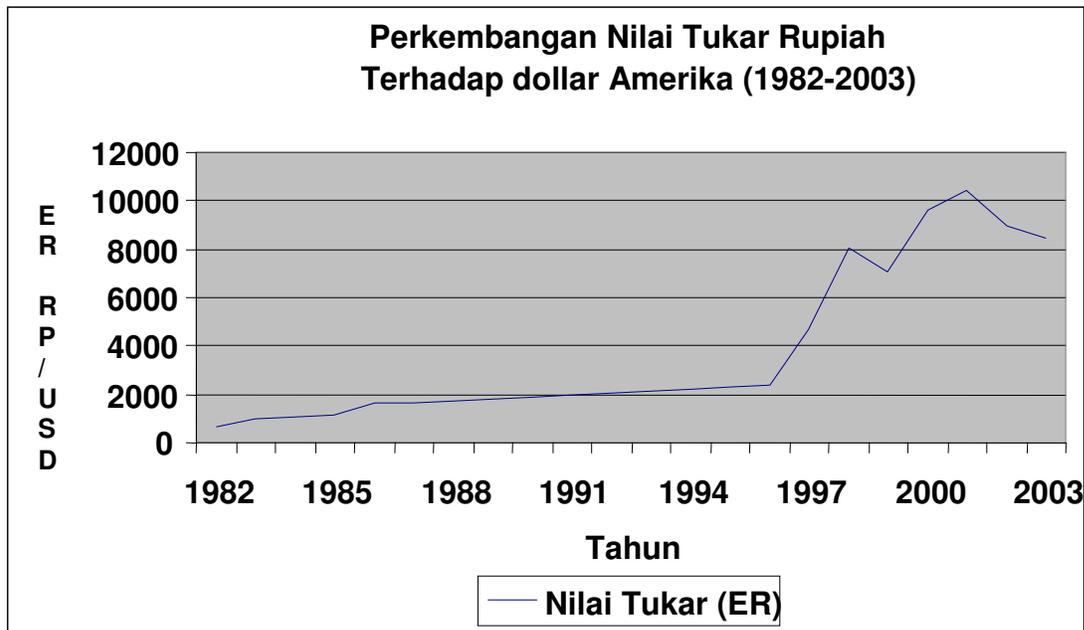
Dimana :

LnER	=	Logaritma dari nilai tukar rupiah terhadap dollar
LnR	=	Logaritma dari tingkat suku bunga
LnMS	=	Logaritma dari jumlah uang beredar
LnNFA	=	Logaritma dari cadangan devisa
LnNX	=	Logaritma dari perdagangan luar negeri
$\beta_0$	=	Intercept
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefesien regresi
e	=	Eror Term

Penelitian ini menggunakan metode estimasi kuadratkecil atau *Ordinary Least Squares* (OLS). Estimasi parameter yang diperoleh dengan metode estimasi OLS memiliki karakteristik yang optimal karena beberapa ciri yaitu *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Best berarti estimator memiliki varians terkecil dibandingkan dengan hasil estimasi lainnya. Linear berarti dihasilkan dari kombinasi linear data. Unbiased berarti tidak ada perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan nilai sebenarnya.

## HASIL PENELITIAN

Nilai tukar valuta asing sering dikenal dengan istilah "*Foreign Exchange Rate*", merupakan mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lainnya. Dalam penelitian ini perbandingan nilai tukar adalah nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat.



Dari Grafik di atas terlihat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang menunjukkan angka dibawah Rp.2000 dan terus mengalami depresiasi hingga tahun 2003.

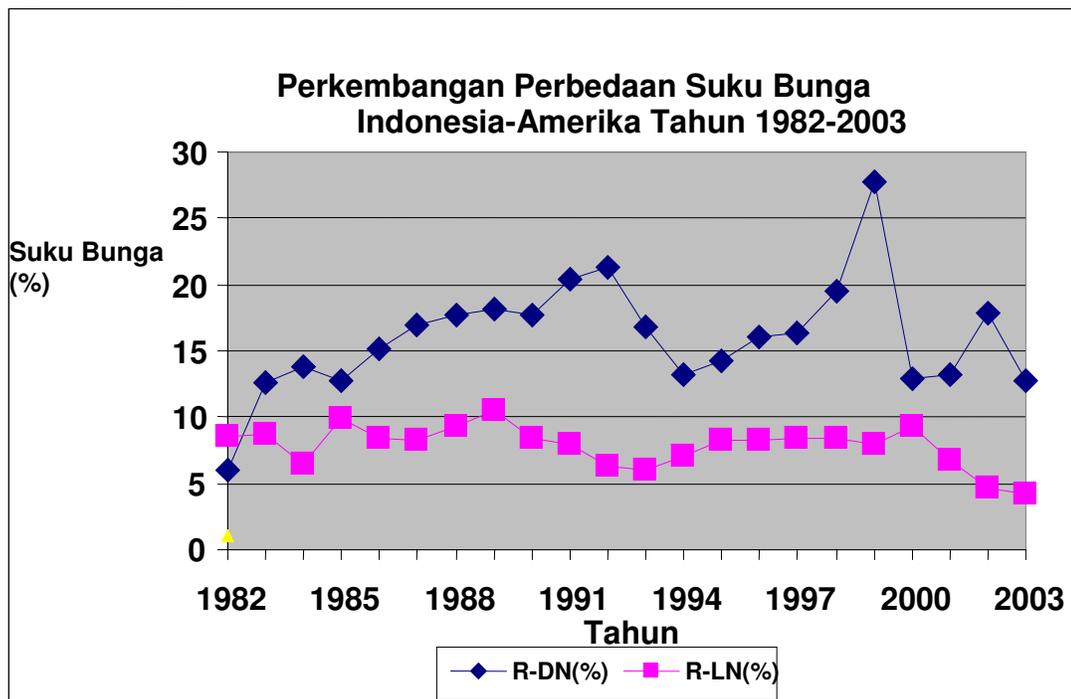
Memasuki tahun 1997-2001 perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi. Terjadinya krisis tersebut sangat

berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami tekanan depresiasi yang sangat besar yaitu dari Rp.4.650 per satu dollar Amerika menjadi sebesar Rp.10.400 per satu dollarnya ditahun 2001. Pada tahun 2002 nilai tukar rupiah terlihat menguat sebesar 1.460 point dan tahun 2003 rupiah makin menguat 475 point.

Tingkat bunga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian secara makro, sehingga diperlukan suatu tingkat bunga yang rasional yang dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Bila tingkat bunga naik maka tabungan akan meningkat dan jumlah uang beredar akan menurun. Secara makro dengan tingginya tingkat bunga akan menyebabkan terjadinya kelesuan ekonomi karena tingkat bunga yang tinggi merupakan disentif terhadap peningkatan investasi dan memperkecil jumlah uang beredar yang ada pada masyarakat.

Perbedaan tingkat bunga deposito riil domestik dan asing dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi di dalam negeri. Semakin tinggi tingkat suku bunga domestik semakin tinggi keuntungan atau *return* yang diperoleh dengan melakukan investasi di dalam negeri, sehingga dapat mendorong arus modal asing masuk dan melakukan investasi di dalam negeri. Semakin besar arus modal masuk ke dalam negeri semakin besar pula jumlah valuta asing yang tersedia di pasar sehingga dapat mendorong apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Perkembangan perbedaan tingkat bunga deposito riil Indonesia – Amerika dapat di lihat pada Grafik berikut ini :



Secara umum tingkat suku bunga deposito riil dalam negeri selalu lebih tinggi dari tingkat suku bunga deposito riil yang terjadi di luar negeri. Tahun 1986 tingkat suku bunga deposito riil mulai meningkat dan mencapai 15,2 persen, pada tahun 1989 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 1992 masing-masing sebesar 20,47

persen dan 21,32 persen. Untuk kemudian suku bunga deposito riil terus mengalami penurunan hingga tahun 1993 hingga tahun 1995. Hal ini disebabkan adanya tingkat inflasi yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga suku bunga deposito riil dalam negeri juga menurun secara tajam. (Raihan, 2003 : 61).

Pada tahun 1996 suku bunga deposito riil kembali meningkat hingga tahun 1999 yaitu 16,11 persen, 16,34 persen, 19,51 persen dan 27,76 persen. Pada tahun 2000 dan 2003 suku bunga deposito riil menurun dari 27,76 persen menjadi 12,87 persen dan dari 17,83 persen menjadi 12,80 persen.

Perkembangan penawaran uang ( $M^s$ ) di Indonesia selalu meningkat lebih cepat daripada kenaikan produksi yang dapat menjamin stabilitas harga. Perkembangan penawaran uang yang terlalu tinggi di negara-negara berkembang seperti Indonesia akan menyebabkan inflasi. Inflasi merupakan proses penurunan nilai tukar uang dan ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara terus-menerus, sedangkan jumlah uang yang beredar dimasyarakat terlalu sedikit (Arief, 1996).

Selama periode penelitian seperti yang terlihat pada Grafik di bawah ini. Jumlah penawaran uang ( $M^s$ ) secara umum terus meningkat disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian.



Laju pertumbuhan penawaran uang di tahun 1982-1983 mengalami penurunan yang cukup berarti (lihat lampiran 2). Selanjutnya tahun 1984-1985 mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya tindakan devaluasi yang diambil oleh pemerintah pada bulan September 1983. Setelah devaluasi, valuta asing kembali mengalir ke dalam negeri, sehingga aktiva luar negeri netto kembali merupakan faktor ekspansi terhadap pertumbuhan penawaran uang. (BI, 1999).

Krisis moneter di Indonesia 1997 yang dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jumlah uang beredar pada tahun 1998

melonjak sebagai dampak dari badai krisis. Nilai rupiah makin tidak stabil sehingga permintaan uang kartal dari masyarakat untuk ditukarkan ke dalam bentuk mata uang dollar semakin meningkat.

Untuk tahun 1999 jumlah uang beredar mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 23,16 persen. Tahun 2001- 2003 jumlah uang beredar terus menunjukkan peningkatan walaupun dengan pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat lampiran 2).

Cadangan devisa merupakan salah satu indikator penting diantara indikator lainnya. Cadangan devisa tidak hanya sebagai petunjuk bagi kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara, tetapi ketersediaannya merupakan jaminan bagi tercapainya stabilitas moneter suatu negara. Karena itu kecukupan cadangan devisa merupakan keharusan bagi suatu negara dan jumlahnya harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan luar negeri yang bersangkutan.

Semasa sistem nilai tukar masih mengambang terkendali (*managed floating system*) dengan rentang intervensinya (*intervention band*) yang berfungsi sebagai batas bawah dan batas atas gejolak kurs rupiah (RP/\$) yang ditoleransi oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk meredam gejolak kurs. Titik tengah pita ini mencerminkan nilai kurs yang dianggap Bank Indonesia sebagai nilai yang wajar.

Ketika sistem nilai tukar beralih ke *free floating system* maka perkembangan kurs akan tergantung pada permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) mata uang dollar di pasar valuta asing dimana gerakan kurs dapat berfluktuasi baik naik maupun turun. Dalam sistem ini rupiah bebas bergerak dalam merespon kekuatan pasar karena Bank Indonesia tidak lagi berkewajiban melakukan intervensi secara sistematis di pasar valas.

Cadangan devisa secara umum memperlihatkan perkembangan yang meningkat. Tahun 1995 hingga tahun 1999 cadangan devisa Indonesia terus mengalami peningkatan. Untuk kemudian mengalami penurunan pada tahun 2000 dari 64,98 juta US\$ menjadi 47,68 juta US\$. Selanjutnya mengalami peningkatan kembali di tahun 2001 yaitu sebesar 53,996 juta US\$. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2003.

Perkembangan ekspor Indonesia setelah periode krisis dan diterapkannya nilai tukar pasar serta kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, sebenarnya dapat menjadikan ekspor komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkat pesat karena asumsinya komoditi Indonesia harganya menjadi lebih murah dalam US dollar.

Sebaliknya terhadap komoditi impor, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar akan menyebabkan nilai impor menjadi berkurang. Secara teoritis, melemahnya mata uang domestik terhadap dollar akan menjadikan produk luar negeri menjadi lebih mahal dari produk dalam negeri sehingga impor menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan impor dapat ditekan sampai pada tingkat yang rendah.

Perkembangan ekspor – impor pada tahun 1983 ekspor mengalami penurunan yaitu dari 19,75 juta US\$ menjadi 18,69 juta US\$ dan kemudian naik sebesar 20,75 juta US\$ ditahun 1984. Kenaikan ekspor Indonesia selama periode penelitian ternyata tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan karena sebagian besar produk Indonesia masih mengandalkan bahan bakunya pada impor.

Meningkatnya nilai dollar terhadap rupiah akan menyebabkan biaya produksi menjadi mahal. Disamping itu adanya nilai rupiah yang *overvalued* sampai tahun 1996 telah menjadi penyebab impor menjadi lebih murah dan produk dalam negeri relatif lebih mahal. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang yang pada akhirnya ekspor menjadi kurang kompetitif. (Suhendra, 2003).

Selanjutnya ditandai dengan makin melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 2001 yaitu di atas Rp.10.000 per dollar telah menjadi penyebab menurunnya nilai impor negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh melemahnya kegiatan investasi dan ekspor sehingga akan mempengaruhi permintaan impor barang baku/penolong untuk kebutuhan industri, sehingga nilai impor secara keseluruhan juga akan mengalami penurunan.

### Hasil Estimasi Model Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor fundamental ekonomi terhadap nilai tukar rupiah. Hasil estimasi dalam penelitian ini menggunakan program Shazam diperoleh parameter untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

VARIABLE	ESTIMATED	STANDARD	T-RATIO	PARTIAL STANDARDIZED			
ELASTICITY							
NAME	COEFFICIENT	ERROR	83 DF	P-VALUE	CORR. COEFFICIENT	AT MEANS	
LN R	0.10292E-01	0.5293E-01	0.1944	0.846	0.021	0.0070	0.0009
LN MS	0.20927	0.3582E-01	5.843	0.000	0.540	0.3352	0.2777
LN NFA	0.16727	0.2820E-01	5.932	0.000	0.546	0.2802	0.2001
LN NX	0.16163	0.4406E-01	3.668	0.000	0.373	0.1698	0.1873
CONSTANT	2.1736	0.3895	5.580	0.000	0.522	0.0000	0.3340

$$\text{LnER} = 2,174 + 0,010 \text{ LnR} + 0,209 \text{ LnMs} + 0,167 \text{ LnNFA} + 0,162 \text{ LnNX}$$

Dari hasil estimasi model regresi seperti yang terlihat di atas dapat diketahui bahwa tanda koefisien parameter dari semua variabel bebas adalah positif. Untuk masing-masing variabel bebas hanya variabel suku bunga yang tidak signifikan secara statistik. Hal ini disebabkan pada periode penelitian ketika Indonesia masih menganut sistem *managed floating* suku bunga tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah. Nilai tukar lebih ditentukan oleh Pemerintah daripada mekanisme pasar. Jadi walaupun suku bunga naik atau turun maka nilai tukar rupiah tetap pada pita intervensinya (Wijoyo 1999 : 25).

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil regresi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor fundamental ekonomi jumlah uang beredar ( $M^s$ ), cadangan devisa (NFA), dan perdagangan luar negeri (NX) mempengaruhi nilai tukar rupiah kecuali suku bunga (R).

2. Dilihat dari konsistensi arah yang diberikan, ada beberapa variabel yang tidak sesuai dengan teori ekonomi yaitu variabel cadangan devisa (NFA) dan perdagangan luar negeri (NX).
3. Variasi dari variabel bebas yang dihipotesiskan secara bersama-sama ( $R^2$ ) mampu menerangkan sebesar 96,31 persen. Dengan demikian penggunaan model penelitian tersebut dalam mengkaji pengaruh faktor fundamental ekonomi terhadap nilai tukar rupiah telah menunjukkan akurasi yang sangat tinggi.
4. Nilai koefisien pengaruh dari variabel jumlah uang beredar ( $M^s$ ) relatif lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan variabel jumlah uang beredar ( $M^s$ ) mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai tukar rupiah.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian ini. Karena jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam kestabilan ekonomi maka pemerintah hendaknya senantiasa menjaga kestabilan pertumbuhan jumlah uang beredar pada tingkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan perekonomian secara keseluruhan serta lebih memperhatikan lagi kebijakan-kebijakan di sektor moneter, dalam hal ini Bank Indonesia harus berkonsentrasi pada pengawasan jumlah uang beredar. Karena sektor ini sangat rawan terhadap serangan inflasi dan mengurangi intervensinya terhadap nilai tukar dan pengawasan harga-harga tertentu.

### **REFERENSI**

- Alper, Kemre and Saglam, Ismail (2001), "The Equilibrium Real Exchange Rate: Evidence from Turkey", *Journal of Economic Literature* 54. No.3, p.1-12
- Arief, Sritua (1996), *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bilson, Jhon F.O (1998), *The monetary Approach to Exchange Rate : Some Emperical Evidence*, Staff Papers, International Monetary Fund, March 1998, p.48-75
- Bank Indonesia (1999), *Tinjauan dan Kebijakan Moneter*, BI, direktorat Riset Ekonomi dan kebijakan Moneter, November 1999
- Bappenas (2001), "Model Nilai Tukar", *Laporan Penelitian: Studi Pengembangan Indikator Ekonomi Makro*. Direktorat Pengembangan Perencanaan Makro. Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fisher (1994), *Macroeconomics*, Edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
- Fukuchi, Takao (1968), *Macroeconomics Theories & Policies*, Fifth Edition, Prentice-Hall Inc, New York.

- Frenkel, A. Jacob, and Jhonson, Harry G (1997), "The Monetary approach to the Balance of Payments: A Non Technical Guide", *Journal of International economic*, August 1997, p. 251-268
- Hamsar, Lubis (1991), *Pengaruh Devaluasi Terhadap Ekspor Non Migas dan Tingkat Inflasi di Indonesia*, Skripsi FE-UNSRI, Palembang.
- Hendro, Omar (1997), *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Riil Rupiah Terhadap Ekspor dan Impor Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana IESP, tidak dipublikasikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Hodijah, Siti (2000), *Dampak Fluktuasi Kurs Rupiah Terhadap Neraca Pembayaran Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana IESP, tidak dipublikasikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Insukindiro (1992), *Pendekatan Kointegrasi Dalam Analisis Ekonomi : Studi Kasus Permintaan Deposito Dalam Valuta Asing Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol.1 No.2, hal.259 - 268
- Jaya,Azis Iwan (2004), *Gejolak Kurs dan Kondisi Fundamental Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Kemre, David M (2002), *Exchange Rate Misalignment: Macroeconomic Fundamentals as an Indicator of Exchange Rate Crises in Transition Economic Preliminary Draft for European Association of Comparative Economics Meetings, Italy, June 6-8, 2002*. p. 1-21
- Kuncoro, Mudrajad (1996), *Manajemen Keuangan Internasional*, BFE, yogyakarta.
- Krugman, Paul R dan Obsfeld, Maurice (2001), *The International Economics, Theory and Policy*, Addison-Wesley publishing Company.
- Kurniati, Yati dan A.V. Hardiyanto (1999), *Perubahan Sistem Nilai Tukar*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.2, No.2, Bank Indonesia Jakarta : September 1999.
- Levi, Maurice D (2001), *International Finance Management*, 3<sup>th</sup> Editions Mc Grow-Hill, Book Co.
- Meese, Richard A. and Andrew K. Rose (1990), "NonLinear, Nonparametric, Nonessential Exchange Rate Estimation", *American Economic Review*, Vol.80. No.2 (May 1990),p.192-196
- Madura, Jeff (1997), *International Financial Management*, 2<sup>th</sup> Edition, West Publishing Company, St Paul.
- Mc Donald, Ronald and Clark, Peter (1997), *What Determines Real Exchange Rates? The Long and The Short of it*, IMF Working Paper, Vol. 21, January 1997.
- Mussa, Michael (1982), "A Model of Exchange Rate Dynamics", *Journal of Political Dinamics*, February 1982.
- Mankiw, N. Gregory (1999), *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Nazamuddin (2004), "Analisis Dinamik Val dan Variance Decomposition Terhadap Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah" *Journal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Mon Mata*, Vol.6, No.2, Desember 2004, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh (Indonesia).

- Rivera, Batiz (1994), *International Finance and Open Economy Macroeconomics*, Macmilan Publishing Company, New York.
- Riley, Geoff (1998), *The Economics of Exchange Rate*, RGS Newcastle Economic England, 1998
- Raihan, Rahmi (2003), *Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Neraca Pembayaran Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana IESP, tidak dipublikasikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Szakmary, Andrew C. and Ike Mathur (1997), "Central Bank Intervention and Trading Rule Profits in Foreign Exchange Markets". *Journal of International Money and Finance*, Vol.16, no.4 1997.
- Salvatore, Dominick (1999), *International economic*, Fifth Edition, Prentice Hall, Inc. Newjersey.
- Sukirno, Sadono (1999), *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi ke dua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suardhini, Made (1997), "Analisis Dampak Intervensi Bank Sentral Dalam Penetapan Nilai Tukar Terhadap Ekspor-Impor Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol.XLV., Nomor 1
- Suhendra, Indra (2003), *Pengaruh Faktor Fundamental, Faktor Resiko dan Ekspektasi Nilai Tukar Terhadap Nilai Tukar Rupiah (Terhadap Dollar) Pasca Penerapan Sistem Kurs Mengambang Bebas Pada Tanggal 14 Agustus 1997*, Tesis, Tidak Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana (S2), Universitas Padjadjaran Bandung.
- Suseno, T. Widodo (2001), *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisus Jogjakarta.
- Wijoyo, Santoso dan Iskandar (1999), *Pengendalian Moneter Dalam Sistem Nilai tukar Fleksibel*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta : Vol.2, No.2, September 1999.
- Wirakartakusumah, M.Djauhari (2004), "Krisis Moneter Di Indonesia, Dampak Sosial Yang Ditimbulkan dan Strategi Penanggulangannya" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9.1

## **ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN ACEH UTARA**

**Muhammad Nasir**

**Abstract:** *The purpose of this research is to know how much impact of village development program (PPG) on the increasing of the poor family and decreasing poverty level in Aceh Utara District. This research is to analyse the influence if amount of working capital aid of PPG, working hours, and direct cash aid (BLT) on the earnings of receiver of aid.*

*This research use linear regression and descriptive quantitative method with primary and secondary data. The primary data is obtained by using distribution of the questionnaires and interview towards the household receiver aid PPG with cluster sampling in 3 sub-district's, 13 village's and 86 household's. The secondary data is obtained by observing the data from the government agency office that related to the matter is Bappeda, BPS, BPMD Aceh Utara District.*

*The findings of the research show that poverty gap index in Aceh Utara district is 0,1547 and poverty severity index is 0,0455. The findings of the research also show that amount of working capital aid of PPG, working hours, and direct cash aid have a positive impact on earnings of receiver of aid, simultaneously and also partial. PPG is able to increase the income of people is 6,47%, and to decrease of poverty level 3,39%. So that recommended to government of Aceh Utara District to the continued of the PPG program's.*

**Key words :** *income, capital aid, time of work, poor family.*

## PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan yang timbul merupakan suatu masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena kemiskinan menyebabkan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang sesuai dengan standar kualitas hidup yang baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi.

Penyebab kemiskinan diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi budaya malas, kebiasaan buruk, keterampilan yang dimiliki masih rendah, dan faktor kekurangan fisik lainnya. Sedangkan faktor eksternal meliputi masih maraknya korupsi, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat bawah, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan sektor dasar lainnya. Akibat kedua faktor tersebut menyebabkan produktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi rendah.

Akibat krisis ekonomi yang menekan perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 telah membawa dampak yang buruk terhadap Negara Indonesia termasuk didalamnya Kabupaten Aceh Utara. Salah satunya dapat dilihat melalui angka kemiskinan yang masih cukup tinggi terutama di Kabupaten Aceh Utara. Keadaan ini diperparah lagi dengan terjadinya konflik bersenjata antara TNI/POLRI dan GAM sejak tahun 1998 sampai 2005, serta bencana gempa dan tsunami yang menimpa wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir tahun 2004, yang berakibat terhambatnya pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan, hancurnya sarana dan prasarana umum, dan hilangnya sumber-sumber perekonomian di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya. Keadaan tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Aceh Utara. Ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1: Jumlah Kepala Keluarga, Kepala Keluarga Miskin, dan Persentase Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Aceh Utara (Tahun 2003 - 2005 - 2009)**

No.	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase KK Miskin
1.	2003	96.992	42.216	43,53
2.	2005	104.141	46.344	44,51
3.	2009	106.682	55.438	51,97

*Sumber : BPS dan BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara.*

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman penjajahan yaitu melalui transmigrasi. Pada masa orde baru sampai sekarang ini pemerintah telah meluncurkan berbagai Inpres dalam rangka penanggulangan kemiskinan, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Pasar, Inpres Pendidikan dan terakhir Inpres Desa Tertinggal (IDT), namun masih banyak program dan proyek penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Tabungan Keluarga Sejahtera

(Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerahnya yaitu dengan meluncurkan program PPG yang berpola seperti pola program PPK yang dibiayai Bank Dunia. Sumber dana untuk PPG adalah dari APBD Kabupaten Aceh Utara yang dialokasikan selama dua tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2002 dan 2003 yang diperuntukkan untuk biaya operasional, bidang sarana dan prasarana, dan bidang ekonomi produktif, serta bidang sosial kemasyarakatan.

Dana PPG yang telah dialokasikan sejak tahun anggaran 2002 dan 2003, tetapi pelaksanaan PPG baru direalisasikan pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini dilakukan, mengingat situasi dan kondisi di Kabupaten Aceh Utara pada saat tersebut masih dalam keadaan konflik, dan dikhawatirkan dana tersebut tidak tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat serius dalam penanggulangan kemiskinan, dimana seluruh desa (gampong) yang berjumlah 852 gampong di Kabupaten Aceh Utara mendapat bantuan langsung dana PPG. Dan pada tahun 2005 keluarga miskin di Kabupaten Aceh Utara juga mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana kompensasi bahan bakar minyak. Bantuan ini juga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga miskin, tetapi kenyataannya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara masih tetap tinggi.

Kenyataan yang didapat tersebut mengundang banyak pertanyaan diantaranya kemungkinan program tersebut kurang tepat sasaran, atau tidak adanya kelanjutan dari program tersebut, atau kemungkinan lain terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin akibat adanya konflik dan bencana gempa serta tsunami yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada dampak dari PPG yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, terutama dalam hal peningkatan pendapatan keluarga miskin. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut apakah kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program PPG dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta jumlah jam kerja berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu persoalan dalam setiap negara yang selalu diusahakan untuk ditanggulangi demi meminimalisasinya atau bahkan untuk dihilangkan. Namun kenyataannya kemiskinan masih dapat ditemui dan terjadi dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini terutama di negara-negara terbelakang atau sedang berkembang termasuk di Indonesia yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan.

World Bank (2002 : 1-2) mendefinisikan kemiskinan merupakan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhannya, berdasarkan aspek perbandingan pendapatan, pengeluaran,

pendidikan, atau kelengkapan lain dari individu dengan beberapa batasan yang ditentukan, dan mereka yang berada di bawah batas yang ditentukan tersebut dikatakan sebagai miskin. Dan penyebab kemiskinan menurut World Bank (2002 : 131) adalah disebabkan oleh faktor-faktor berupa karakteristik penduduk menurut wilayah atau komunitas yaitu kondisi tempat tinggal di daerah pedesaan/perkotaan, karakteristik rumah tangga dan individu yaitu struktur dan ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan dan jender kepala rumah tangga, karakteristik ekonomi meliputi pendapatan, pengeluaran, ketenagakerjaan, dan karakteristik sosial meliputi kesehatan, pendidikan, tempat tinggal atau perumahan.

Bappenas (1994) mengemukakan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan, yang terjadi bukan karena dikehendaki miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatannya sendiri. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan tidak berubah, yang tercermin di dalam lemahnya keinginan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal, rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan penjelasan BPS (2003) yaitu rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga banyak, kepala rumah tangga merupakan pekerja, tingkat pendidikan rumah tangga maupun anggotanya rendah, sering berpindah-pindah lapangan pekerjaan dan sebagian lain pendapatannya bersumber dari sektor pertanian. Kemiskinan juga diukur menurut batasan garis kemiskinan, seperti yang dikemukakan Sajogyo (1977) (Mubyarto 1990 : 153) kemiskinan ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang mana penentuan garis kemiskinan ditentukan berdasarkan kebutuhan minimum rumah tangga adalah 240 Kg beras setiap orang per tahun di pedesaan dan 360 Kg beras setiap orang per tahun di daerah kota. Penetapan garis kemiskinan ini setara dengan nilai beras di maksudkan untuk dapat membandingkan tingkat hidup antar waktu dan perbedaan harga kebutuhan pokok antar wilayah.

### **Program Pembangunan Gampong (PPG)**

Diperlukan sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Orang miskin bukan orang yang tidak apa-apa melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun seadanya (Mubyarto, 1999:169). Dilandasi pemikiran untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2002 mewujudkan suatu sistem pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif melalui PPG. Program ini ditujukan untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat paling bawah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketergantungan terhadap pihak lain. Disamping itu program ini bertujuan memperkecil ketimpangan pembangunan diantara masyarakat gampong dan kota, sehingga dapat mempercepat tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan PPG antara lain dikelola secara terbuka oleh masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat menambah pendapatan dengan cara mendidik

masyarakat agar mampu mengelola kegiatan pembangunan secara profesional dan ekonomis, dan hasil dari pembangunan harus digulirkan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menciptakan akumulasi modal dalam wadah perekonomian gampong (Bappeda, 2002). Berdasarkan prinsip tersebut maka kegiatan ekonomi produktif meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri dan perdagangan kecil menjadi salah satu sasaran dan kegiatan prioritas program.

Disamping program PPG, Kabupaten Aceh Utara juga mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah pusat yang khusus diberikan kepada keluarga miskin.

### **Pendapatan**

Pendapatan biasanya digunakan untuk menentukan tingkatan taraf hidup suatu penduduk, oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan ditujukan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan penduduk. Todaro (2000 : 47) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya kemiskinan pada suatu negara tergantung pada tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan juga tinggi rendahnya tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Tingginya pendapatan nasional per kapita suatu negara tanpa diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan akan membuat angka kemiskinan tetap tinggi. Demikian juga sebaliknya pendistribusian pendapatan yang merata tanpa adanya peningkatan pendapatan akan membuat kemiskinan meluas dan meningkat.

### **Jam Kerja**

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk bekerja dan dapat dilihat dari adanya produktivitas tenaga kerja. Hasan (1992) (Diliana, 2005 : 18) mengutarakan bahwa setiap jam kerja yang digunakan oleh seorang tenaga kerja yang berhubungan dengan kegiatan usahanya maka ia akan mendapatkan pembayaran upah sebagai hasil pendapatan yang diterimanya. Jika tingkat upah dianggap sebagai produksi dari pendapatan maka dengan demikian besarnya pendapatan akan ditentukan atau dipengaruhi oleh besarnya jam kerja.

### **Kesenjangan Kemiskinan**

Menurut Masbar (2002 : 272) kesenjangan pendapatan terjadi akibat adanya masyarakat yang memiliki akses dan tidak memiliki akses terhadap pembangunan. Kelompok kedua ini tetap miskin dan tidak mampu menaikkan taraf hidup mereka sedangkan kelompok pertama terus mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sehingga jurang antara kedua kelompok tersebut akan terus melebar. Hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan sosial di masa yang akan datang.

World Bank (2002 : 69 – 72), merekomendasikan beberapa ukuran/indeks kemiskinan diantaranya *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index*. *Poverty Gap Index* (Indeks Kesenjangan Kemiskinan) yaitu menghitung seberapa jauh individu jatuh di bawah garis kemiskinan (jika mereka termasuk kategori miskin), dan menyatakan indeks tersebut sebagai suatu persentase terhadap garis kemiskinan. Secara lebih spesifik indeks ini mendefinisikan kesenjangan kemiskinan dikurangi pendapatan/pengeluaran dari individu/penduduk miskin. Sedangkan *Poverty Severity*

Index (Indeks Keparahan Kemiskinan) yaitu digunakan untuk memecahkan ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran diantara penduduk miskin, ukuran ini secara sederhana merupakan jumlah dari kesenjangan kemiskinan tertimbang (sebagai proporsi garis kemiskinan), dimana penimbangannya adalah sebanding dengan kesenjangan kemiskinan itu sendiri.

### **Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Chambers (1988) mengenai kemiskinan menemukan pokok masalah yang menyebabkan orang miskin. Penyebabnya ada lima kelemahan yang dimiliki rumah tangga miskin yaitu keterbatasan kepemilikan asset, kondisi fisik yang lemah, keterisolasian, kerentanan dan ketidak berdayaan.

Mubyarto (2003) mengemukakan terjadi peningkatan pendapatan pada penduduk miskin di daerah IDT Gunung Kidul sebesar 97% setelah diberikan bantuan penanggulangan kemiskinan selama 8 tahun (1994 – 2002). Demikian juga hasil penelitian Yahya (1997), terjadi peningkatan pendapatan penduduk miskin rata-rata sebesar 18,35% selama 2 tahun (tahun anggaran 1994/1995 dan 1995/1996) penyaluran dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada desa tertinggal di Banda Aceh.

Menurut hasil penelitian Santosa, Hidayat dan Indroyono (2003), terjadi kenaikan pendapatan keluarga miskin peserta program IDT sebesar 36,4% setelah pelaksanaan program IDT selama 8 tahun di DI Yogyakarta, dan penduduk miskin yang menjadi sasaran program (TAR) adalah 80,2%, sedangkan nilai Poverty Reduction (PR) adalah sebesar 15% pada program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan sebesar 13,4% pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 2001 – 2003, sedangkan untuk program P2KP terjadi penurunan angka penduduk miskin sebesar 5%.

### **Hipotesis**

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan dan hasil penelitian sebelumnya dapat diajukan hipotesis pada penelitian ini adalah : Program Pembangunan Gampong (PPG) dan BLT serta jumlah jam kerja dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan memilih sebanyak 3 kecamatan dari 22 kecamatan yang mendapat bantuan, yang meliputi masing-masing 1 kecamatan mewakili wilayah barat, 1 kecamatan wilayah tengah, dan 1 kecamatan wilayah timur dari wilayah Kabupaten Aceh Utara dan merupakan kecamatan yang mendapat bantuan PPG.

Hal yang dianalisis adalah dampak PPG dalam menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan variabel yang akan diteliti adalah pendapatan keluarga miskin, pengaruh pendapatan lainnya seperti jam kerja dan bantuan lainnya seperti bantuan langsung tunai.

### **Metode Pemilihan Sampel**

Sesuai dengan masalah yang ingin dibahas dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka pemilihan Kepala Keluarga (KK) untuk menjadi responden dari populasi yang ada ditentukan secara cluster atau wilayah (cluster random sampling). Nazir (2003 : 313) mengemukakan bahwa cluster random sampling baik digunakan untuk penelitian dengan biaya terbatas dan catatan lengkap tentang unit elementer dalam populasi tidak diperoleh. Dan ditambahkan juga bahwa pengambilan sample fraction untuk setiap tahap dapat bervariasi. Pengambilan sampel dengan metode ini dianggap cukup untuk mewakili populasi yang akan diteliti.

Pada tahap pertama ditentukan 10% dari jumlah kecamatan yang mendapat bantuan PPG yaitu sebanyak 3 kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Tanah Jambo Aye, Syamtalira Bayu, dan Muara Batu. Pada tahap kedua untuk menentukan gampong (desa) yang dijadikan sampel adalah 10% dari gampong yang terdapat dalam kecamatan yang terpilih, sehingga didapat jumlah desa sampel seluruhnya 13 gampong yaitu Kec. Tanah Jambo Aye 5 gampong, Kec. Syamtalira Bayu 5 gampong, dan Kec. Muara Batu 3 gampong. Pengambilan sample KK miskin penerima dana bantuan PPG adalah sebesar 25% dari jumlah KK miskin penerima bantuan PPG yang terdapat pada masing-masing gampong terpilih. Sehingga jumlah KK miskin yang dijadikan sampel adalah 86 KK.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder mengenai jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, pendapatan perkapita, PDRB Kabupaten Aceh Utara, jumlah alokasi dana PPG diperoleh dari instansi BPS, BAPPEDA dan BPMD Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari setiap KK miskin penerima bantuan PPG yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

### **Model Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan formula yang sederhana seperti telah dirumuskan dalam manual Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang dibuat oleh ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific) yaitu peningkatan pendapatan (AI), Coverage of Target Group (TAR), Poverty Reduction (PR).

Untuk menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilainya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (lihat Santoso dkk, 2003: 150 -156):

$$AI = \frac{Y_t - (Y_o + (Y_o \times Iht))}{(Y_o + (Y_o \times Iht))}$$

Keterangan :

AI : Peningkatan pendapatan (Income Indicator)

Yt : Pendapatan tahun sekarang

Yo : Pendapatan tahun dasar  
Iht : Indeks harga konsumen tahun sekarang

Pengukuran terhadap nilai Coverage of Target Group (TAR) dengan menggunakan model :

$$TAR = I_{PGK} - I_{P>GK}$$

Keterangan :

TAR : Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya dibawah batas garis kemiskinan.

$I_{PGK}$  : Jumlah penduduk miskin keseluruhan

$I_{P>GK}$  : Jumlah penduduk miskin yang pendapatannya diatas garis kemiskinan

Untuk mengukur pengurangan tingkat kemiskinan (Poverty Reduction Indicator (PR)) digunakan alat atau model :

$$PR = \%P - (\%Pt / \%Po)$$

Keterangan :

PR : Pengurangan penduduk miskin (Poverty Reduction Indicator)

$\%P$  : Persentase penduduk miskin keseluruhan

$\%Pt$  : Persentase penduduk miskin tahun sekarang yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan

$\%Po$  : Persentase penduduk miskin tahun dasar yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan

Untuk menganalisis kesenjangan kemiskinan yaitu rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, dan juga tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, model yang digunakan adalah sebagai berikut (World Bank, 2002 : 69 –72) :

*Indeks Kesenjangan Kemiskinan :*

$$P1 = 1/n \sum \left[ \frac{(Z - Yp)}{Z} \right]$$

*Indeks Keparahannya Kemiskinan :*

$$P2 = 1/n \sum \left[ \frac{(Z - Yp)}{Z} \right]^2$$

Keterangan :

P1 : Indeks Kesenjangan Kemiskinan

P2 : Indeks Keparahannya Kemiskinan

Z : Batas gar kemiskinan

Yp : Pendapatan rata-rata keluarga miskin

n : Jumlah keluarga miskin

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan keluarga miskin sebagai variabel dependen (Y) akibat variabel independen berupa bantuan Program PPG, jam kerja dan bantuan langsung tunai (PPG, JK, D1) dihitung dengan model regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut :

$$Y = f(\text{PPG}, \text{JK}, \text{D1})$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \ln \text{PPG} + \beta_2 \ln \text{JK} + \beta_3 \text{D1} + \varepsilon$$

Dimana :

- Y : Pendapatan KK miskin (Rp.)  
 PPG : Jumlah dana bantuan PPG (Rp.)  
 JK : Jumlah jam kerja (jam)  
 D1 : Variabel dummy BLT, (menerima bantuan BLT = 1 ; tidak menerima bantuan BLT = 0)  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi  
 $\varepsilon$  : Faktor pengganggu (Error term).

### Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini diartikan sebagai berikut :

1. PPG adalah suatu program penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan gampong secara aspiratif dan partisipatif untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa terutama masyarakat miskin, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Aceh Utara.
2. Jam Kerja (JK) merupakan jumlah jam kerja keluarga miskin.
3. Bantuan Langsung Tunai (D1) adalah bantuan langsung yang diberikan kepada keluarga miskin, sumber dana berasal dari kompensasi harga bahan bakar minyak, dan tidak semua keluarga miskin menerima BLT.
4. Income Indicator (AI) adalah mengukur pendapatan rumah tangga peserta program sebelum dan setelah mendapat bantuan.
5. Pendapatan rumah tangga adalah besarnya penghasilan yang diterima oleh rumah tangga miskin.
6. Indeks harga adalah faktor perubahan harga.
7. Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau penduduk yang memenuhi kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh BPS untuk tahun 2006 garis kemiskinan untuk Kabupaten Aceh Utara Rp.167.291,- per kapita per bulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Daerah Penelitian

#### *Letak Geografis dan Luas Wilayah*

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak pada  $96.52.00^0 - 97.31.00^0$  Bujur Timur dan  $04.46.00^0 - 05.00.40^0$  Lintang Utara dengan luas wilayahnya sekitar 3.296,86 km<sup>2</sup> serta berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah timur dengan Kabupaten

Aceh Timur dan sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen. Secara administrasi Kabupaten Aceh Utara terbagi dalam 22 kecamatan, 56 kemukiman, 850 desa/gampong dan 2 kelurahan.

### ***Keadaan Penduduk***

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009 adalah 493.599 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 241.887 jiwa dan perempuan 251.712 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 108.220 KK dan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga adalah 5 jiwa, serta kepadatan penduduk rata-rata 150 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 1993 – 2005 rata-rata 1,07 %.

### **Karakteristik Kepala Keluarga Sampel**

Karakteristik kepala keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain jenis kelamin kepala keluarga, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan formal, jumlah anggota keluarga. Rincian kepala keluarga menurut jenis kelamin bahwa terdapat sebanyak 29 KK atau 33,72% adalah perempuan dan laki-laki sebanyak 57 KK atau 66,28% dari total KK sampel.

Kepala keluarga dengan batasan umur terbanyak adalah pada umur 45 – 49 tahun yaitu sebanyak 22 KK atau 25,58%, dan jumlah kepala keluarga pada usia produktif yaitu pada umur 25 – 54 tahun adalah sebanyak 71 KK atau 82,55%. Sedangkan kepala keluarga yang tidak produktif yaitu 55 tahun keatas adalah sebanyak 15 KK atau 17,45%.

Pekerjaan utama kepala keluarga rata-rata sebagai petani yaitu sebanyak 33 KK atau 38,37%, kemudian pedagang sebanyak 23 KK atau 26,74%, nelayan sebanyak 5 KK atau 5,81%, penjahit sebanyak 3 KK atau 3,49%, pembuat kue sebanyak 7 KK atau 8,14%, penjual ikan sebanyak 2 KK atau 2,33%, pengrajin tikar sebanyak 3 KK atau 3,49%, penjual kue sebanyak 5 KK atau 5,81%. Sedangkan pekerjaan kepala keluarga sebagai penjual nasi, tukang becak dan tukang bengkel sepeda masing-masing hanya sebanyak 1 KK atau 1,16%.

Komposisi pendidikan kepala keluarga sampel yang terbesar adalah berpendidikan SD yaitu sebanyak 50 KK atau 58,14%, berpendidikan SMP sebanyak 20 KK atau 23,26%, dan berpendidikan SMA sebanyak 15 KK atau 17,44%. Sedangkan untuk kepala keluarga yang berpendidikan sarjana adalah 1 KK atau 1,16%.

Jumlah anggota keluarga dari kepala keluarga sampel dengan jumlah anggota keluarga terkecil adalah 2 orang dan terbesar 10 orang. Sedangkan jumlah anggota keluarga 5 orang merupakan komposisi terbanyak yaitu 30 KK atau 34,88%.

Karakteristik kepala keluarga yang menerima bantuan tidak seluruhnya adalah keluarga miskin, karena hasil penelitian lapangan terdapat keluarga tidak miskin mendapat bantuan modal usaha misalnya para pedagang. Jumlah bantuan modal usaha dari PPG yang diterima oleh masyarakat adalah bervariasi sesuai dengan usaha yang sedang atau akan dilaksanakan. Besarnya bantuan yang diterima responden adalah Rp.180.000,- sampai Rp.3.500.000,-.. Jumlah keluarga yang

menerima bantuan PPG sebesar Rp.1.000.000,- ke bawah adalah sebanyak 58 KK atau 67,44%.

Pendapatan responden sebelum menerima bantuan PPG adalah Rp.200.000,- sampai Rp.1.000.000,-, setelah menerima bantuan PPG pendapatan responden adalah Rp.400.000,- sampai Rp.1.500.000,-.

### **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

Perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Y = Pendapatan) akibat perubahan pada variabel independen (PPG, JK, D1), dari hasil analisis regresi dengan pendekatan kuadrat terkecil didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\ln Y = 11,340 + 0,0658 \ln \text{PPG} + 0,5485 \ln \text{JK} + 0,3363 \text{D1}$$

### ***Pengaruh Bantuan PPG Terhadap Pendapatan***

Hasil estimasi model yang digunakan bahwa koefisien parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti peningkatan jumlah bantuan PPG akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan koefisien regresi bantuan PPG sebesar 0,0658 menggambarkan bahwa pendapatan akan meningkat sebesar 6,58% jika jumlah bantuan PPG meningkat 100%. Peningkatan pendapatan masyarakat masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah bantuan PPG yang diberikan.

### ***Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan***

Hasil estimasi model yang digunakan bahwa koefisien parameternya memiliki hubungan positif, hal ini berarti penambahan jam kerja akan meningkatkan pendapatan. Koefisien regresi jam kerja sebesar 0,5485 menggambarkan bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 54,85% jika jumlah jam kerja ditingkatkan sebesar 100%.

### ***Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Terhadap Pendapatan***

Berdasarkan hasil estimasi model yang digunakan bahwa koefisien parameter dari D1 memiliki hubungan positif, hal ini berarti pemberian bantuan langsung tunai secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Koefisien regresi D1 sebesar 0,3363 menggambarkan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai pendapatannya akan meningkat sebesar 33,63%.

### **Indikator Pendapatan dan Pengurangan Penduduk Miskin**

Penilaian keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan, maka peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilainya. Untuk mengetahui persentase perubahan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1: Indikator Pendapatan (Peningkatan Pendapatan)**

No.	Uraian	
1.	Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2003	Rp.118.897
2.	Batas garis kemiskinan Kab. Aceh Utara tahun 2006	Rp.167.291
3.	Indeks Harga Konsumen (Iht)	5,139
4.	Income Indicator (AI)	0,0647
5.	Poverty Reduction (PR)	0,0339
6.	TAR (Target Sasaran)	0,6628
7.	Poverty Gap Index (P1)	0,1574
8.	Poverty Severity Index (P2)	0,0455

Sumber : Hasil Penelitian 2007(diolah).

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa program PPG melalui bidang ekonomi produktif (bantuan modal usaha) menghasilkan Indikator Pendapatan (AI) sebesar 0,0647 ini berarti bahwa program tersebut dapat menaikkan pendapatan kepala keluarga penerima bantuan sebesar 6,47% pada tingkat kenaikan harga sebesar 5,139. Sedangkan target sasaran dari program adalah sebesar 0,6628 atau sebesar 66,28% dari penerima bantuan adalah keluarga miskin sedangkan sisanya sebesar 33,72% adalah bukan dari keluarga miskin, sehingga bantuan PPG dapat disimpulkan relatif kurang tepat sasaran untuk keluarga miskin.

Berdasarkan Tabel 1 didapat bahwa Poverty Reduction (PR) adalah sebesar 0,0339, hal ini berarti terjadi pengurangan jumlah keluarga miskin penerima bantuan PPG sebesar 3,39% di Kabupaten Aceh Utara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Program PPG yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tidak seluruhnya ditujukan untuk keluarga miskin, karena keluarga miskin yang mendapat bantuan PPG hanya sebanyak 67,28% sedangkan sisanya sebesar 33,72% penerima PPG bukan keluarga miskin.
2. Berdasarkan nilai Income Indicator yang dihasilkan sebesar 0,0647 atau menunjukkan bahwa pendapatan penerima bantuan PPG meningkat sebesar 6,47%. Sedangkan dengan menggunakan regresi linear berganda bantuan PPG terbukti secara parsial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima bantuan. Hal ini terbukti bahwa bantuan PPG dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan dapat mengurangi kemiskinan sebesar 3,39%.
3. Pendapatan keluarga miskin akan meningkat sebesar 54,85% jika adanya peningkatan jumlah jam kerja, dan akan meningkat sebesar 33,63% dengan adanya peningkatan jumlah bantuan langsung tunai yang diterima keluarga miskin.

4. Pendapatan rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara berada 15,47% di bawah batas kemiskinan, dengan kesenjangan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin sebesar 4,55%.
5. Peningkatan pendapatan akibat bantuan PPG sebesar 6,47% belum mencukupi untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin di atas batas kemiskinan, karena rata-rata pendapatan penduduk miskin 15,47% di bawah batas kemiskinan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan kebijakan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PPG hendaknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan.
2. Kebijakan penerapan program atau kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten melalui pengadopsian pola pelaksanaannya dari suatu program nasional yang dianggap berhasil, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap keberhasilan program tersebut di daerahnya, karena tidak semua program yang secara nasional dianggap berhasil tetapi di daerah tertentu program tersebut tidak sesuai.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hendaknya memperuntukkan bantuan PPG hanya kepada keluarga miskin karena program PPG dapat meningkatkan pendapatan, tetapi masih banyak penerima bantuan bukan dari keluarga miskin. Sehingga tujuan untuk mengurangi kemiskinan tidak seperti yang diharapkan, *pengurangan kemiskinan yang diharap tetapi peningkatan kesenjangan pendapatan yang didapat.*
4. Pemberian bantuan PPG hendaknya lebih diutamakan untuk gampong-gampong yang terbelakang dan terisolir, demi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesenjangan antar gampong.
5. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap program secara intensif dan kajian terhadap identifikasi kebutuhan usaha masyarakat benar-benar proporsional agar tujuan program benar-benar tercapai dan dipahami oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, (2005), *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2002), *Pedoman Umum Program Pembangunan Gampong Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2002*, Bappeda Kabupaten Aceh Utara.
- Badan Pusat Statistik, (2003), *Penduduk Fakir Miskin 2004*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2005), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara*, BPS Kabupaten Aceh Utara.
- Bappenas, (1994), *Kaji Tindak Program IDT 1994 – 1997*, Aditya Media, Yogyakarta.

- Basri, Faisal, (1995), *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI Distorsi Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta.
- Diliana, Fransiska Bonita, (2005), *Perbandingan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang Tahun 2003*, STIS, Jakarta.
- Dillon HS, (2003), Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Juni 2003, 5 – 23.
- Hasibuan, Nurimansyah, (2004), Kemiskinan Struktural di Indonesia Menembus ke Lapisan Bawah, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Volume VII, 65 – 97.
- Insukindro, (1991), *Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984 –1987*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kusnaedi, (1995), *Membangun Desa*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Mubyarto, (1994), *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Adtya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto, (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi*, Adtya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto, (2000), *Kisah-kisah IDT dan Program Menghapus Kemiskinan di Sulawesi*, Yayasan Agro Ekonomi.
- Nazir, Moh., (2003), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachbini, J. Didik, dkk., (1995), *Negara Dan Kemiskinan di Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Masbar, Raja, (2002), Batas Garis Kemiskinan : Kasus Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1. Vol. 2. Agustus 2002, 271 – 284.
- Todaro, (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- World Bank Institute, (2002), *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*, Institute Bank Dunia, Jakarta.

## PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN JASA PADA PERUM PEGADAIAN LHOKSEUMAWE

**Marlina**  
**Heriyana**  
**Rasyimah**  
**Nurainun**

**Abstract:** *This research aims to find out customer perception about service provided by PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe. Another aim is to examine obstacles occurred when providing service to customers. This is a descriptive as well as qualitative research. Descriptive means examining data by collecting, classifying, interpreting and analyzing. Thus data and information can describe a certain situation from the field. Qualitative means a library research conducted to find out theory about customers perception, customers service and Perum Pegadaian. The result of four variables calculation (reliability, responsiveness, faith, empathy and shape) in general shows average value i.e. 3.75 which is close to satisfaction.*

**Key words:** *Customers perception, customer's service*

---

Marlina, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
Heriyana, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
Rasyimah, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
Nurainun, Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

## **PENDAHULUAN**

Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan manusia akan barang maupun jasa juga semakin tinggi dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan jasa disini adalah yang menyangkut dengan pelayanan jasa. Pelayanan jasa tidak lepas dari peran utama orang (karyawan) yang bekerja di dalam perusahaan. Pelayanan yang diberikan yaitu untuk memuaskan konsumen sehingga nantinya konsumen akan merasa yakin dan puas dengan perusahaan yang menawarkan produk jasa tersebut.

PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe merupakan sebuah perusahaan umum yang bergerak dibidang jasa perkreditan yang BUMN nya di bawah Departemen Keuangan. Perusahaan ini hampir sama seperti Bank pada umumnya yaitu memberikan jasa peminjaman kepada Nasabah/Konsumen secara kredit, hanya bedanya dengan bank, Perum Pegadaian Lhokseumawe bisa memberikan pinjaman untuk nasabah sesuai dengan harga barang yang digadaikan pada perusahaan. Nasabah/Konsumen yang akan melakukan peminjaman harus membawa barang yang akan ditukarkan, sesuai dengan pinjaman yang dibutuhkan. Konsumen yang menggadaikan barangnya berasal dari berbagai tingkat status ekonomi, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dan barang – barang yang digadaikan juga mulai dari yang harga rendah sampai dengan harga yang tinggi.

Perkembangan dunia perkreditan di Indonesia yang tumbuh amat cepat menimbulkan persaingan yang semakin tajam. Pegadaian sebagai salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perkreditan tidak akan lepas dari pengaruhnya. Oleh karena itu disadari oleh Pegadaian untuk mencari faktor penentu agar mampu mempertahankan keberadaan perusahaan dalam sektor bisnis perkreditan. Salah satu faktor yang dipandang perlu untuk meningkatkan daya saing adalah perbaikan kualitas pelayanan.

Tujuan perusahaan adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan sasaran, begitu juga dengan tujuan PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe yaitu memberikan pelayanan jasa kepada konsumen untuk menarik konsumen agar tetap bekerja sama atau menjadi pelanggan tetap perusahaan. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar-benar memuaskan dan perusahaan setidaknya dapat memahami bagaimana karakter konsumen yang datang ke perusahaan.

Sistem pelayanan operasional Pegadaian yang ada sekarang telah dirasakan memadai untuk menjawab tantangan pada saat ini, tetapi masih belum mampu menjamin kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keamanan pelayanan di masa yang akan datang. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan dan keinginan nasabah selalu berubah sesuai dengan situasi lingkungan eksternal dan internal. Hal demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada nasabah pegadaian. Pelayanan terhadap nasabah yang diberikan oleh karyawan mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang karyawan Pegadaian kepada masyarakat. Sikap dan perilaku karyawan terhadap nasabah sangat penting. Baik dan buruknya sikap dan perilaku karyawan dalam melayani nasabah akan mencerminkan citra perusahaan.

Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka, namun

bertindak sebaliknya. Pelanggan mungkin tidak memahami motivasi mereka yang lebih dalam. Oleh karena itu karyawan yang bekerja di perusahaan harus benar-benar bisa memahami bagaimana melayani konsumen dari berbagai tingkat ekonomi dan sosial yang berbeda dan karakter yang dimiliki konsumen, sehingga nantinya konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh perusahaan.

Perum Pegadaian adalah satu satunya lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dan terakhir PP 103 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan selaku salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian mempunyai misi utama :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Perum Pegadaian telah melaksanakan kegiatan usaha :

- a. Usaha Inti terdiri dari : Jasa Gadai, Jasa Taksiran, Jasa Titipan
- b. Usaha lain terdiri dari : Unit Toko Emas Galeri “24”, Koin Emas ONH, Gadai Gabah, Kredit Kelayakan Usaha (KUP), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Usaha Persewaan Gedung

- c. Usaha Syariah

Keunikan Pegadaian tercermin dari produknya, tidak ada lembaga kredit lain yang mau memberikan kredit dua puluh ribu rupiah. Lembaga kredit lain pasti menganggap jumlah kredit seperti itu tidak efisien. Disamping itu tidak ada lembaga kredit yang bisa menerima barang jaminan mulai dari kain, sarung, barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan barang bergerak lainnya. Penerimaan barang jaminan seperti ini secara ekonomis kurang efisien, karena memerlukan biaya investasi gudang yang besar dan pemeliharaan barang jaminan yang cukup melelahkan.

Keunikan dalam jangka waktu pengembalian kredit yang tidak dihitung bunga-berbunga dengan jangka waktu (periode kredit) empat bulan, seolah-olah tanpa batas. Setiap empat bulan cukup dengan membayar sewa-modal, pinjaman telah dapat diperpanjang satu periode dan demikian seterusnya. Bila suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah memasrahkan barang jaminannya, maka Pegadaian akan berusaha menjualkan barang jaminannya di muka umum (lelang resmi) dengan harga setinggi-tingginya. Bila ada kelebihan dari penjualan itu, Pegadaian akan mengembalikan kepada nasabah.

Citra Pegadaian sebagai sebuah lembaga yang usang, kumuh, miskin, sempit tumbuh mewarnai persepsi masyarakat. Bagi masyarakat miskin atau orang-orang yang terdesak kebutuhan keuangan, Pegadaian dianggap sebagai Dewa Penolong.

Sebaliknya orang-orang yang berkecukupan atau yang disebut masyarakat *elite* sering memandang dengan sebelah mata dan terkesan sinis. Mereka menganggap Pegadaian sebagai lembaga warisan Belanda yang menjatuhkan martabat (gengsi), riba, identik dengan kemiskinan.

Namun sekarang persepsi itu sudah mulai menghilang. Nasabah yang membutuhkan jasa Pegadaian tidak hanya dari masyarakat miskin yang terdesak kebutuhan keuangan, masyarakat yang mampupun sudah mulai banyak yang datang ke Pegadaian untuk meminjam kredit.

Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah nasabah Perum Pegadaian Lhokseumawe dari tahun 2002-2005 (bulan Januari-Mei) sesuai dengan profesi.

**Tabel 1: Jumlah Nasabah**

No	Profesi	Jumlah Nasabah							
		2002	2003	2004	2005				
					Jan	Feb	Maret	April	Mei
1	Wira Usaha	1,051	2,017	7,149	319	440	604	715	896
2	Petani/Nelayan/Tukang	262	1,456	1,683	21	25	50	52	40
3	Karyawan	6,245	1,626	6,105	1,335	1,136	901	926	1,039
4	Pelajar/Mahasiswa	6,245	6,017	1,340	7	13	44	22	20
5	Ibu Rumah Tangga	6,245	6,017	7,202	305	496	813	650	420
6	PNS/TNI/POLRI	250	1,354	1,560	350	400	450	483	450
					2,337	2,510	2,862	2,848	2,865
					Perkiraan jumlah nasabah dalam tahun 2005				
Jumlah		20,298	18,487	25,039	2,337+2,510+2,862+2,848+2,865=13,422				
					13,422 : 5 = 2,684 x 12 = 32,208				

Sumber : PERUM Pegadaian Lhokseumawe 2003-2005 (Januari-Mei)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pada tahun 2002 berjumlah 20.298 orang, tahun 2003 jumlah nasabah menurun 18,868 orang, tetapi pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 25,039. Untuk tiga tahun ini terjadi naik turun jumlah nasabah (fluktuatif). Hal ini disebabkan karena sebagian nasabah pada tahun 2003 tidak banyak membutuhkan omzet kredit dari pihak Perum Pegadaian Lhokseumawe.

Berdasarkan data dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas pelayanan jasa Perum Pegadaian Lhokseumawe semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah peningkatan kuantitas pelayanan tersebut diiringi pula oleh peningkatan kualitas?

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana persepsi nasabah pada pelayanan jasa Perum Pegadaian Lhokseumawe. (2) Hambatan-hambatan Perum Pegadaian Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Prilaku Konsumen.**

Mengenai perilaku konsumen tidaklah mudah, kadang mereka terus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka bertindak sebaliknya. Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka secara lebih mendalam, sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian. Untuk itu para pemasar perlu mempelajari keinginan, persepsi, pilihan, dan perilakunya dalam berbelanja.

Menurut Setiadi (2003:3) menyebutkan "Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini".

Swastha DH (2000:10) mendefinisikan "Perilaku Konsumen adalah sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut".

Engel (1994:3) mendefinisikan "Perilaku Konsumen adalah tindakan konsumen langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli suatu tindakan".

### **Karakteristik Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen.**

Menurut Kotler (1997:154-165) Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.

#### **1. Faktor Kebudayaan.**

Faktor-faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang paling luas dan paling dalam pada perilaku konsumen. Para pemasar perlu memahami peran yang dimainkan kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial konsumen.

##### **a. Kebudayaan**

Kebudayaan adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Perilaku manusia secara luas dipelajari. Tumbuh dalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Para pemasar selalu mencoba menempatkan pergeseran budaya dalam rangka mengkhayalkan produk baru yang diinginkan. Contoh, pergeseran budaya menuju perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan dan kebugaran telah menciptakan industri raksasa untuk peralatan dan pakaian olah raga, makanan yang lebih sehat dan lebih alami, serta jasa kesehatan dan kebugaran.

##### **b. Subbudaya**

Setiap budaya memuat subbudaya yang lebih kecil, atau kelompok-kelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Banyak dari sub-subbudaya ini membentuk segmen pasar yang penting.

##### **c. Kelas Sosial**

Kelas sosial merupakan bagian-bagian yang secara permanent dan tersusun di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki nilai, kepentingan atau minat, dan perilaku yang sama.

## 2. Faktor-faktor Sosial.

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, dan peran dan status sosial konsumen. Karena faktor-faktor sosial ini dapat mempengaruhi tanggapan konsumen, perusahaan-perusahaan harus memperhitungkannya ketika merancang strategi-strategi pemasaran mereka.

### a. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok itu disebut kelompok keanggotaan. Sebagian merupakan kelompok-kelompok primer dengan orang-orang yang berinteraksi secara regular namun informal, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Sebagian adalah kelompok-kelompok sekunder, kelompok yang lebih formal dan memiliki lebih sedikit interaksi regular, termasuk organisasi-organisasi seperti kelompok keagamaan, asosiasi profesional, dan serikat perdagangan.

### b. Keluarga

Anggota-anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting di dalam masyarakat. Para pemasar tertarik pada peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian aneka-ragam produk dan jasa.

### c. Peran dan Status

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam istilah peran dan status. Peran berisikan kegiatan-kegiatan yang diharapkan seseorang untuk dilakukan mengacu pada orang-orang disekitarnya. Setiap peran akan mempengaruhi sebagian perilaku pembeliannya. Setiap peran membawa status yang mencerminkan pengakuan umum masyarakat sesuai dengan status.

## 3. Faktor-faktor Pribadi

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti:

### a. Usia dan Tahap Daur Hidup

Orang-orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli di sepanjang waktu kehidupan mereka. Mereka memakan makanan bayi pada tahun-tahun pertama kehidupan, menyantap aneka makanan pada masa-masa pertumbuhan dan pendewasaan, dan melakukan diet khusus pada tahun-tahun terakhir mereka. Selera mereka terhadap pakaian, perabotan, dan rekreasi juga berkaitan dengan usia.

### b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli, pemasar berupaya mengidentifikasi kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa. Perusahaan bahkan dapat berspesialisasi dalam membuat produk yang dibutuhkan kelompok pekerjaan tertentu.

### c. Situasi Ekonomi

- Situasi ekonomi seseorang akan sangat mempengaruhi pilihan produk. Penghasilan dengan ketat mengamati kecenderungan di dalam pendapatan, tabungan, dan tingkat bunga pribadi.
- d. **Gaya Hidup**  
Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang sebagaimana tercermin dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup lebih banyak menjelaskan sesuatu ketimbang kepribadian dan kelas sosial seseorang. Gaya hidup menggambarkan pola tindakan dan interaksi seseorang secara menyeluruh di dunia.
  - e. **Kepribadian dan Konsep-Diri**  
Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologis unik yang mengarah secara relative pada tanggapan yang konsisten dan abadi pada lingkungan yang dimiliki seseorang. Konsep diri adalah citra diri, atau gambaran mental yang kompleks yang ada dalam diri manusia.
4. **Faktor-faktor Psikologis**  
Pilihan-pilihan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu :
- a. **Motivasi**  
Motivasi adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada suatu saat. Ada kebutuhan biologis, yang muncul dari keadaan yang memaksa seperti rasa lapar, haus, atau merasa tidak nyaman. Kebutuhan lainnya bersifat psikologis, muncul dari kebutuhan untuk diakui, dihargai, ataupun rasa memiliki. Kebanyakan kebutuhan ini tidak akan cukup kuat untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak pada suatu waktu tertentu.
  - b. **Persepsi**  
Persepsi adalah proses yang dengan proses itu orang-orang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi informasi untuk membentuk gambaran dunia yang penuh arti.
  - c. **Pembelajaran**  
Pembelajaran menjelaskan perubahan-perubahan dalam perilaku individual yang muncul dari pengalaman.
  - d. **Kepercayaan dan Sikap**  
Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang seseorang miliki tentang sesuatu. Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan.

### **Persepsi Konsumen.**

Memahami tanggapan konsumen pada dasarnya adalah bagaimana seseorang berbuat sesuatu yang dipengaruhi oleh perasaan yang ditimbulkan dalam jiwa seseorang dan diungkapkan melalui penglihatan, perasaan, pendengaran sentuhan serta senyuman. Dalam menerima rangsangan sebuah produk barang atau jasa, masing-masing konsumen mempunyai cara yang berbeda untuk menanggapi maksud

dari produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan persepsi masing-masing konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Menurut Robbins (2001:88) mendefinisikan “Persepsi adalah sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberik makna kepada lingkungan mereka.

Jadi persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara.

Menurut Stanton yang dikutip oleh Setiadi (2003:160) mendefinisikan “Persepsi sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima indera”.

Jadi persepsi seorang konsumen atas berbagai stimulus yang diterimanya dipengaruhi oleh karakteristik yang dimilikinya. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya.

Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Kepentingan individual kita cukup berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh orang lain.

Karakteristik-karakteristik dari objek yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut dari objek membentuk cara kita memandangnya. Karena objek tak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu objek dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi.

Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu itu. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi.

### **Pelayanan Jasa**

Daya tarik sebuah perusahaan jasa tidak hanya terletak pada kantornya yang lengkap dengan fasilitasnya, atau pada alat-alatnya yang serba canggih tetapi juga pada citra dan pelayanan dari karyawannya. Menurut Mahmoeddin (1996:5) yang dimaksudkan dengan “citra adalah pelayanan yang cepat, tepat, disertai etiket dan sopan santun kepada nasabah”.

Menurut Zethaml and Bitner (1996:5) yang dikutip oleh Lupiyoadi mendefinisikan jasa adalah: “*Service is all economic activitiex whose output is not a physical product or construction is generally consumed at that time it is produce, and provides added value in forms (such as convenience, amusement, confort or health)*”.

Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen).

Kotler (2001:602) mendefinisikan jasa sebagai “setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak”.

Dari definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berwujud.

Jadi etiket pergaulan dan etiket pelayanan merupakan suatu ketrampilan yang perlu dihayati sebaik-baiknya. Belajar etiket akan membantu para karyawan untuk mengetahui apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Jika para karyawan memiliki etiket pelayanan yang memuaskan nasabah, berarti perusahaan itu telah memiliki *asset* tersendiri dari perusahaan.

Ditambahkan oleh Mahmoeddin (1996:12) dalam etiket pelayanan, para nasabah sangat mengharapkan kenyamanan, keamanan, ketepatan, dan kecepatan yang semuanya bermuara kepada kepuasan. Oleh karena itu kepada karyawan pemberi jasa, diharapkan berlaku sopan terhadap atasan, terhadap rekan sekerja, terhadap bawahan, dan terutama sekali terhadap para langganan.

Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan haruslah terlebih dulu memahami pekerjaan yang akan diembannya terutama yang berkenaan dengan pelayanan terhadap nasabah.

Menurut Kasmir (2003:219) ada 10 dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami yaitu :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih.
2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum.\
3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal.
4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar.
6. Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannya.
7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan.
8. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan.
9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan.
10. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani.

Dalam melayani sangat diperlukan berbagai sikap yang mampu menarik minat nasabah dalam berhubungan, intinya nasabah betah dan tidak bosan bila berhubungan, kemudian nasabah juga tidak merasa tersinggung oleh sikap yang mereka anggap tidak pantas.

### **Karakteristik, Klasifikasi Jasa & Faktor Yang Menjadi Penentu Mutu Jasa.**

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk fisik). Boyd (2000:283-286) menyebutkan karakteristik jasa ada 5 yaitu:

1. Tidak berwujud (*Intangible*)  
 Jasa akan mempengaruhi perolehan dan keberhasilan memelihara pelanggan. Karena calon konsumen memiliki kesulitan dalam mengalami (melihat, menyentuh, merasakan, mengetahui rasa) jasa yang ditawarkan, mereka didorong untuk membeli janji-janji. Tetapi janji juga bersifat tidak berwujud; oleh sebab itu, penjual perlu menjadikannya berwujud bagi calon pelanggan. Hal ini menjelaskan dekorasi kantor bank dan kantor pengacara yang bagus dan menentramkan, seragam pekerja restoran cepat saji yang cerah dan bersahabat, dan dekorasi serta suasana toko dan hotel yang elegan. Hal-hal ini menjadi bukti wujud atas jasa tidak berwujud yang ditawarkan.
2. Daya Simpan (*Perishability*)  
 Jasa tidak bisa menjadi inventaris. Kamar motel dan kursi pesawat kosong, kapasitas telepon yang tak terpakai, dan waktu ahli kesehatan dan pengacara tidak dapat diminta lagi. Lebih jauh lagi ketika terjadi kelebihan permintaan, sejumlah konsumen harus dilepaskan, karena tidak ada inventaris cadangan tersedia. Jadi, organisasi jasa harus melakukan segala hal untuk mengantisipasi beban puncak untuk menyesuaikan dengan permintaan terhadap kapasitas. Dua cara utama untuk memecahkan masalah ini adalah dengan memanipulasi permintaan atau penawaran.
  - a. Memanipulasi permintaan. Dapat dikerjakan dengan berbagai cara, termasuk harga, iklan, penjualan barang atau jasa lain.
  - b. Memanipulasi penawaran. Dapat dilakukan melalui pelatihan bagi pekerja agar mampu mengerjakan banyak hal, substitusi mesin bagi pekerja.
3. Kontak Pelanggan (*Customer Contact*)  
 Jumlah kontak pelanggan penting untuk ditentukan karena mempengaruhi setiap produksi jasa dan keputusan penyerahan. Jadi, system jasa kontak tinggi (pendidika, kesehatan, dan perbankan) lebih sulit untuk dimanipulasi dibandingkan sistem kontak rendah (sewa mobil, binatu, dan reparasi peralatan) karena konsumen lebih banyak terlibat dalam proses, mempengaruhi waktu permintaan, dan sifat ruang lingkup jasa.
4. Keseragaman (*Variability*)  
 Keberagaman unsur manusia, mutu jasa bervariasi bergantung pada siapa yang memproduksinya dan kapan. Ini menjadi masalah sulit bagi perusahaan yang menghasilkan banyak unit jasa seperti bank, hotel, penerbangan, perusahaan sewa mobil, dan toko pengecer.
5. Penggunaan Saluran Distribusi.  
 Karakteristik kelima dari perusahaan-perusahaan jasa adalah bahwa mereka tidak membutuhkan lini distribusi fisik seperti yang dilakukan perusahaan yang menghasilkan barang. Mereka menggunakan beberapa kombinasi dari pabrik jasa, outlet eceran, atau titik konsumsi. Ini berarti bahwa perusahaan

jasa menganggap perlu untuk melibatkan diri dalam kontak yang lebih banyak dan berbeda dengan konsumennya daripada yang dilakukan perusahaan produsen barang.

Griffin (1996:6) yang dikutip oleh Lupiyoadi menyebutkan karakteristik Jasa ada 3 yaitu:

- a. *Intangibility* (tidak berwujud)  
Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman.
- b. *Unstorability*  
Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga tidak dapat (*inseparability*) dipisahkan mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.
- c. *Customization*.  
Jasa juga sering kali didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan.

Karakteristik jasa menurut Kotler (2001:605-607) ada 4 (empat) yaitu:

- a. Tidak berwujud  
Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Seseorang yang menjalani “pengencangan kulit wajah” tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli jasa itu, dan pasien di kantor psikiater tidak dapat mengetahui hasil pastinya. Tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti itu, untuk mewujudkan yang tidak berwujud.
- b. Tidak dapat dipisahkan  
Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan melewati berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsi. Jika seseorang memberikan pelayanan, maka penyedinya merupakan bagian dari jasa itu. Karena klien juga hadir saat jasa itu dilakukan, interaksi penyedia-klien merupakan ciri khusus pemasaran jasa. Baik penyedia maupun klien mempengaruhi hasil jasa.
- c. Variabilitas  
Karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu diberikan, jasa sangat bervariasi. Beberapa dokter memiliki keramahan perawatan yang sempurna dan sangat baik dengan anak-anak, yang lain lebih lugas dan kurang sabar dengan anak-anak.
- d. Tidak tahan lama  
Jasa tidak bisa disimpan. Sebagian dokter memungut banyak kepada pasien atas pertemuan yang tidak dipenuhi karena nilai jasa itu ada hanya pada saat itu. Sifat jasa itu mudah lenyap (*perishability*) tidak menjadi masalah bila permintaan tetap. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit.

Parasuraman dkk yang dikutip Kotler (2001:616) menyebutkan ada lima penentu mutu jasa, yaitu :

1. Keandalan.  
Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
2. Daya tanggap.  
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.
3. Keyakinan.  
Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
4. Empati.  
Syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5. Berjud.  
Penampilan fasilitas fisik, peralatan, petugas, dan media komunikasi.

### **Pegadaian**

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kesulitan dana, kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjamin barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminakan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminakan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian.

Menurut Kasmir (2002:246) “usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan varang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai varang yang digadaikan.
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Kasmir (2002:248-250) tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan

cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sangsi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sangsi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah :

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak Pegadaian tidak memperlumahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Menurut Kasmir (2002:250-251) jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian adalah:

1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: Emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam.
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti: Mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor, sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang elektronik antara lain: televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik.
4. Mesin-mesin seperti: Mesin Jahit, mesin kapal motor.
5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai.

Menariknya peminjaman uang di pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan.

Menurut Kasmir (2002:253-254) secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian adalah :

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian.
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.

4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjamannya beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dilakukan sebagai berikut:

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar langsung dibawa pulang.
3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjamannya dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jika nasabah sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.
5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

Dalam praktiknya disamping usaha peminjaman uang Perum Pegadaian juga melakukan usaha lain yaitu:

1. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai ril barang-barang berharga miliknya seperti, emas, intan, berlian, mobil, televisi dan barang-barang lainnya.
2. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran atau kecurian.
3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.
4. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya.

Penyimpanan barang gadai nasabah sudah cukup aman. Penyimpanan barang-barang berupa kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin dan barang-barang keperluan rumah tangga disimpan dalam gudang yang ditutupi dengan pintu besi, sedangkan untuk barang-barang perhiasan, disimpan dalam brankas besi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Teknik Pengambilan sampel dilakukan secara *proportionate stratified random sampling*. Jumlah sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan nasabah Pegadaian di Lhokseumawe yang sudah menikmati pelayanan pegadaian.

Adapun teknik stratifikasi pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Wirausaha	$= \frac{7.149}{25.039} \times 100 = 28.5\%$
2. Petani/Nelayan/Tukang	$= \frac{1.683}{25.039} \times 100 = 6.72\%$
3. Karyawan	$= \frac{6.105}{25.039} \times 100 = 24.45\%$
4. Pelajar/Mahasiswa	$= \frac{1.340}{25.039} \times 100 = 5.4\%$
5. Ibu Rumah Tangga	$= \frac{7.202}{25.039} \times 100 = 28.7\%$
6. PNS/TNI/POLRI	$= \frac{1.560}{25.039} \times 100 = 6.2\%$

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### *Keandalan*

Keandalan diukur dengan 2 indikator yaitu :

1. Ketelitian dan keterampilan karyawan/karyawati dalam bekerja.
2. Kemampuan karyawan/karyawati menjelaskan hal-hal yang belum diketahui nasabah.

Hasil pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 1: berikut ini:

**Tabel 1: Keandalan**

No	Uraian	Jawaban					X	Ket
		1	2	3	4	5		
1	Ketelitian dan keterampilan karyawan dalam bekerja	1	1	14	61	23	4.04	Baik
2	Kemampuan karyawan/i menjelaskan hal-hal yang belum diketahui nasabah.	-	3	24	39	34	4.04	Baik
Rata – rata keandalan							4.04	Baik

Data diolah (2006)

Pada tabel 1, untuk variabel keandalan untuk ketelitian dan keterampilan karyawan sebanyak 1 responden atau 1.0 % menyatakan bahwa karyawan/i PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe bekerja sangat tidak baik, sebesar 1 atau 1.0 % menyatakan tidak baik. Sedangkan yang menyatakan netral adalah sebanyak 14 responden atau 14.0 % dan sebanyak 61 responden atau sebesar 61.0 % menyatakan baik serta 23 responden menyatakan bahwa ketelitian dan keterampilan karyawan/i pada PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe sangat baik. Dan apabila diambil dari rata-rata jawaban dari keseluruhan responden, yaitu 4.04 ini adalah kategori baik.

Sedangkan untuk kemampuan karyawan/i untuk menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh nasabah, 3 responden atau 3.0 % menyatakan bahwa karyawan/i

PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe belum bisa melakukan tugasnya dengan baik (tidak baik) dalam memberikan informasinya kepada nasabah. Sedangkan 24 responden atau 24.0% menyatakan netral sedangkan responden yang menyatakan baik adalah sebesar 39 atau 39.0 % dan sebesar 34 atau 34.0 % responden menyatakan sangat baik. Untuk keseluruhan ini sudah masuk katagori baik untuk sebuah pelayanan yaitu 4.04.

Dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 2 variabel keandalan, pihak PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe sudah melaksanakan dengan baik dalam memberikan pelayanannya kepada nasabah dengan rata-rata 4.04.

### Daya Tanggap

Daya tanggap diukur dengan menggunakan 3 variabel yaitu:

1. Kecepatan pelayanan transaksi yang dilakukan Perum Pegadaian Lhokseumawe.
2. Penguasaan kerja karyawan/karyawati yang bertugas di bagian pelayanan.
3. Pelayanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian Lhokseumawe.

Hasil pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2: Daya Tanggap**

No	Uraian	Jawaban					X	Ket
		1	2	3	4	5		
1.	Kecepatan pelayanan transaksi yang dilakukan Perum Pegadaian Lhokseumawe	1	3	20	68	8	3.79	Baik
2.	Penguasaan kerja karyawan/karyawati yang bertugas di bagian pelayanan	-	7	29	37	27	3.84	Baik
2	Pelayanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian Lhokseumawe	-	28	29	30	13	3.28	Netral
Rata – rata Daya tanggap							3.63	Baik

Data diolah (2006)

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa daya tanggap untuk kecepatan pelayanan transaksi 1 responden atau 1.0 % menyatakan sangat tidak baik, 3 responden atau 3.0 % menyatakan tidak baik, 20 responden atau 20.0 % menyatakan netral, dan yang menyatakan sangat baik 68 responden atau 68.0 % dan yang menyatakan sangat baik sebesar 8 responden atau 8.0 %. Untuk keseluruhan pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan bahwa kecepatan pelayanan untuk transaksi bisa dikatakan baik rata-ratanya adalah 3.79 hampir mendekati 4 (baik).

Sedangkan pada penguasaan kerja karyawan yang bertugas pada bagian pelayanan 7 responden atau 7.0 % menyatakan tidak baik, 29 responden atau 29.0 % menyatakan netral, dan 37 responden atau 37.0 % menyatakan baik sebesar 27 responden atau 27.0 % sangat baik

Dari penilaian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu hampir semua responden menyatakan baik untuk penguasaan kerja karyawan/i terutama bagian pelayanan yaitu rata-ratanya adalah 3.84 mendekati puas (nilai 4).

Sedangkan pada pelayanan yang diberikan PERUM PEGADAIAN, 28 responden atau 28.0 % menyatakan tidak baik, 29 responden atau 29.0 % menyatakan netral, 30 responden atau 30.0 % menyatakan puas, serta 13 responden atau 13.0 % menyatakan sangat baik. Melihat penilaian ini, ternyata pihak PERUM PEGADAIAN harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik lagi, hal ini kalau dilihat rata-ratanya mendekati netral (3.28) masih jauh dari nilai puas (4).

Namun, dari 3 variabel yang diajukan pada variabel daya tanggap maka diperoleh hasil 3.63 % maka dapat disimpulkan bahwa untuk daya tanggap persepsi nasabah mendekati baik.

### Keyakinan

Keyakinan diukur dengan menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Kesopanan karyawan terhadap nasabah.
2. Kemampuan karyawan dalam meyakinkan nasabah terhadap jasa-jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian Lhokseumawe.

Hasil pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada lembaran berikut ini:

**Tabel 3: Keyakinan**

No	Uraian	Jawaban					X	Ket
		1	2	3	4	5		
1	Kesopanan karyawan terhadap nasabah	-	17	40	34	9	3.35	Netral
2	Kemampuan karyawan/i menjelaskan hal-hal yang belum diketahui nasabah.	-	2	27	59	12	3.81	Baik
Rata – rata keyakinan							3.58	Baik

Data diolah (2006)

Pada tabel 3 memperlihatkan untuk kesopanan karyawan 17 responden atau 17.0 % yang menyatakan tidak baik dan untuk yang menyatakan netral sebesar 40 responden atau 40.0 %, dan 34 responden atau 34.0 % menyatakan baik, 9 responden atau 9.0 % menyatakan sangat baik. Dari segi kesopanan pihak perum pegadaian harus betul – betul memperhatikan variabel ini. Karena kalau dilihat dari rata-rata 3.35 masih banyak sekali reponden yang merasakan bahwa kesopanan para karyawan/i belum seperti yang diharapkan oleh nasabah.

Untuk kemampuan karyawan meyakinkan nasabah sebanyak 2 responden atau 2.0 % menyatakan tidak baik, 27 responden 27.0 % menyatakan netral, 59 responden atau 59.0 % menyatakan baik, dan yang menyatakan sangat baik sebesar 12 responden atau 12.0 %.

Dari 2 variabel pertanyaan untuk keyakinan diperoleh hasil 3.58 %, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi nasabah PERUM PEGADAIAN untuk keyakinan adalah hampir mendekati baik (nilai 4).

### Empati

Empati diukur dengan menggunakan 3 variabel yaitu:

1. Keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
2. Sambutan kepada nasabah yang baru datang.
3. Sikap terhadap nasabah yang menunggu lama.

Hasil pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4: Empati**

No	Uraian	Jawaban					X	Ket
		1	2	3	4	5		
1	Keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah	-	28	29	30	13	3.28	Netral
2	Sambutan kepada nasabah yang baru datang	-	2	27	59	12	3.81	Baik
3	Sikap terhadap nasabah yang menunggu lama	-	17	39	35	9	3.95	Baik
Rata – rata empati							3.68	Baik

Data diolah (2006)

Pada tabel 4 memperlihatkan persepsi nasabah terhadap empati. Untuk keramahan karyawan 28 responden atau 28.0 % menyatakan tidak baik, 29 responden atau 29.0 % menyatakan netral, 30 responden atau 30.0 % menyatakan baik, dan 13 responden atau 13.0 % yang menyatakan sangat baik.

Untuk sambutan kepada nasabah, 2 responden atau 2.0 % menyatakan tidak baik, 27 responden atau 27.0 % menyatakan netral, 59 responden atau 59.0 % menyatakan baik dan yang menyatakan sangat baik sebanyak 12 responden atau 12.0 %

Untuk sikap terhadap nasabah, 17 responden atau 17.0 % menyatakan tidak baik, 39 responden atau 39.0 % menyatakan netral, dan yang menyatakan baik sebanyak 35 responden atau 35.0 % serta yang menyatakan sangat baik sebesar 9 responden atau 9.0 %.

Dari 3 variabel pertanyaan untuk empati diperoleh hasil 3,68 %, maka dapat disimpulkan bahwa untuk persepsi nasabah terhadap empati mendekati baik.

### Berwujud

Berwujud diukur dengan menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Kenyamanan pada gedung Perum Pegadaian Lhokseumawe.
2. Ruangan penyimpanan barang-barang yang digadaikan nasabah pada Perum Pegadaian Lhokseumawe.

Hasil pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5: Berwujud**

No	Uraian	Jawaban					X	Ket
		1	2	3	4	5		
1	Kenyamanan dalam gedung	1	6	16	51	26	3.95	Baik
2	Ruangan penyimpanan barang-barang gadai	-	-	37	53	10	3.73	Baik
Rata – rata berwujud							3.84	Baik

Data diolah (2006)

Tabel 5 di atas menunjukkan persepsi nasabah terhadap aspek berwujud, untuk kenyamanan pada gedung, 1 responden atau 1.0 % menyatakan sangat tidak baik, 6 responden atau 6.0 % menyatakan tidak baik, 16 responden atau 16.0 % menyatakan netral, dan 51 responden atau 51.0 % menyatakan baik dan 26 responden atau 26.0 % menyatakan kenyamanan ruangan di PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe adalah sangat nyaman/baik.

Untuk ruangan penyimpanan barang, 37 responden atau 37.0 % menyatakan netral, 53 responden atau 53.0 % menyatakan baik, 10 responden atau 10.0 % menyatakan sangat baik. Sedangkan yang menyatakan sangat tidak baik dan tidak baik adalah tidak ada.

Dari 2 variabel pertanyaan untuk berwujud diperoleh hasil 3.84 %, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah untuk variabel berwujud adalah baik.

### **Analisa Persepsi Konsumen Pada Pelayanan Jasa Perum Pegadaian Lhokseumawe**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, penulis menghitung secara rata-rata, yang diperoleh hasil rata-rata untuk masing-masing aspek adalah: untuk keandalan 4.04 % , untuk daya tanggap 3.63 % , untuk keyakinan 3.58 % , untuk empati 3.68 % , dan untuk berujud 3.84 % , maka nilai rata-rata yang diperoleh untuk 5 aspek tersebut adalah:

$$\frac{4.04 + 3.63 + 3.58 + 3.68 + 3.84}{5} = 3.75$$

Dari hasil tersebut, maka kesimpulannya adalah: bahwa persepsi nasabah pada pelayanan jasa PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe adalah baik.

### **Hambatan-hambatan PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan**

Hambatan-hambatan yang dihadapi Perum Pegadaian Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan adalah:

1. Konsumen kurang memahami budaya antri.
2. Identitas serta domisili (tempat tinggal) dari nasabah sehingga Perum Pegadaian Lhokseumawe mangalami kesulitan sewaktu melakukan pemberitahuan lelang.

3. Tingkat pendidikan nasabah yang rata-rata masih rendah, sehingga terkadang agak sulit menjelaskan tentang peraturan dan kebijaksanaan perusahaan.
4. Pada umumnya nasabah yang datang ke Pegadaian membawa masalah keuangan/dana diiringi dengan perasaan psikologi seperti stress, emosional, sedih, marah, sehingga pegadaian harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sabar sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kewajaran.
5. Sulitnya memperoleh data nasabah yang akurat dan valid. Hal ini sangat berguna untuk mengambil langkah pemasaran yang strategis yang akan diambil oleh perusahaan.

## KESIMPULAN

Konsumen yang telah menggunakan jasa PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe mempunyai persepsi yang positif terhadap pelayanan jasa yang telah diberikan oleh karyawan/i PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe, hal ini dapat dilihat dari nilai 3 pada satuan Likert yaitu 3.75 % mendekati puas (nilai 4)

Hambatan yang sering dialami adalah rendahnya tingkat pendidikan yaitu 11 responden tamatan SLTP dan 57 responden tamatan SLTA merupakan suatu kendala dalam proses penyampaian informasi kepada nasabah PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, Harper, W.,JR et,al (2000) *Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Strategi dengan Orientasi Global*. Jilid I, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Enggel,J.F,R.D Black et,al (1994) *Perilaku Konsumen*. Bina Putra Aksara, Jakarta
- Kasmir (2001) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2003) *Manajemen Perbankan*. Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kotler. Phillip (1994) *Marketing*, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1996) *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 2, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ & Amstrong (1997) *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi Ketiga, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2002) *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*. Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ & AB. Sutanto (2001) *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ & Amstrong (2001) *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi Kedelapan, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat (2001) *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat, Depok
- Mahmoeddin, As (1996) *Etiket Pelayanan Bank Petunjuk Praktis Menjaring Nasabah*. Edisi Ketiga, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Mowen, John, C. (2002) *Prilaku Konsumen*. Edisi Kelima, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Nurainun (1999) *Persepsi Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Askes*. Skripsi tidak dipublikasi, FE Unsyiah, Banda Aceh.

- Rinna Devi (2001) *Persepsi Nasabah Terhadap Pelayanan Jasa Bank Internasional Indonesia Cabang Banda Aceh*. Skripsi tidak dipublikasi, FE Unsyiah, Banda Aceh.
- Robbins Stephen P (2001) *Perilaku Organisasi*. Edisi Kedelapan, Jilid I. Prenhallindo, Jakarta.
- Setiadi, Nugroho, J (2003) *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Sugiyono (1999) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV Bandung.
- Swastha, Handoko (2000) *Manajemen Pemasaran*. Edisi I. BPFE, Yogyakarta.

## ISLAM DAN KEMISKINAN : SATU TINJAUAN TEORITIS

**Munardi**

**Abstrak:** *Islam dalam memandang kemiskinan berbeda dengan pendirian golongan di atas. Islam menolak secara tegas pandangan mereka yang memuji kemiskinan. Rasulullah memuji sikap zuhud dalam menempuh hidup di dunia ini, tetapi sama sekali tidak menyinggung terpujinya kemiskinan, ini karena orang zuhud dalam pandangan Islam ialah orang yang mempunyai harta dan sanggup menjadikan harta di bawah kekuasaannya, bukan dia yang dikuasai atau diperbudak oleh harta. Sebagaimana Islam menolak pandangan golongan yang mensucikan kemiskinan, Islam juga menolak pandangan golongan Kapitalis yang mengira bahwa orang kaya ialah pemilik mutlak terhadap harta kekayaan. Islam berpendapat bahwa kekayaan adalah mutlak milik Allah. Dialah pencipta dan pemberi, sementara manusia hanya pengurus dan pemikul amanah untuk memelihara dan mengembangkannya dalam batas-batas yang diperintahkan oleh Allah. Islam juga menolak pandangan golongan Sosialis yang berusaha untuk menghilangkan kelas dan hak milik individu di dalam masyarakat karena tujuannya yang bertentangan prinsip Islam. Sesungguhnya Islam mengakui perbedaan kelas di kalangan umat manusia dan mengakui hak milik individu sebagai bawaan asasi manusia, dan merupakan sarana yang penting bagi kemajuan masyarakat dan perkembangan ekonomi.*

**Key words:** *islam, kemiskinan*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan fenomena yang selalu hadir di setiap masa, walaupun berbagai usaha telah dilakukan oleh manusia untuk menghapusnya. Namun, kemiskinan tetap terus hadir dan menghiasi kehidupan manusia. Dalam melihat masalah kemiskinan kebanyakan manusia memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda, hal ini disebabkan oleh bedanya idiologi yang mereka yakini dan keterbatasan ilmu yang mereka miliki dalam memahamimasalah kemiskinan. Hal ini sesuai seperti apa yang di kemukakan oleh Yusuf Qhardawi (1982: 15-22), bahwa Pendirian manusia terhadap kemiskinan sejak dari dulu sudah berbeda-beda, diantaranya adalah pendirian golongan yang mensucikan kemiskinan, golongan ini termasuklah orang-orang zuhud, para pendeta, kaum sufi dan orang-orang yang menjauhi kemewahan. Mereka menganggap bahwa kemiskinan bukanlah suatu keburukan yang perlu perlu diselesaikan, karena menurut mereka kemiskinan adalah suatu karunia Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya.

Selanjutnya pendirian golongan kapitalis, dimana mereka memandang kemiskinan itu termasuk salah satu bahaya kehidupan dan permasalahan dunia, tetapi mereka berpendapat bahwa kemiskinan merupakan tanggungjawab si miskin itu sendiri, sehingga tidak mengherankan jika mereka tidak merasa kasihan terhadap golongan miskin tersebut. Sementara golongan Sosialis berpendapat bahwa usaha melenyapkan kemiskinan dan menyadarkan orang miskin adalah hal yang tidak mungkin tercapai, kecuali sumber daya dan kekayaan golongan pemilik modal dihapus terlebih dahulu. Kemudian dibentuk kelas-kelas dalam masyarakat untuk menaburkan benih kedengkian dan kemarahan, sehingga akan berakhir dengan kemenangan golongan buruh.

Islam dalam memandang kemiskinan berbeda dengan pendirian golongan di atas. Islam menolak secara tegas pandangan mereka yang memuji kemiskinan. Rasulullah memuji sikap zuhud dalam menempuh hidup di dunia ini, tetapi sama sekali tidak menyinggung terpujinya kemiskinan, ini karena orang zuhud dalam pandangan Islam ialah orang yang mempunyai harta dan sanggup menjadikan harta di bawah kekuasaannya, bukan dia yang dikuasai atau diperbudak oleh harta.

Sebagaimana Islam menolak pandangan golongan yang mensucikan kemiskinan, Islam juga menolak pandangan golongan Kapitalis yang mengira bahwa orang kaya ialah pemilik mutlak terhadap harta kekayaan. Islam berpendapat bahwa kekayaan adalah mutlak milik Allah. Dialah pencipta dan pemberi, sementara manusia hanya pengurus dan pemikul amanah untuk memelihara dan mengembangkannya dalam batas-batas yang diperintahkan oleh Allah.

Islam juga menolak pandangan golongan Sosialis yang berusaha untuk menghilangkan kelas dan hak milik individu di dalam masyarakat karena tujuannya yang bertentangan prinsip Islam. Sesungguhnya Islam mengakui perbedaan kelas di kalangan umat manusia dan mengakui hak milik individu sebagai bawaan asasi manusia, dan merupakan sarana yang penting bagi kemajuan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pandangan Islam terhadap kemiskinan dan bagaimana cara Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini, karena suatu masalah tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik

dan sempurna kecuali diketahui secara baik dan benar akar permasalahannya, begitu juga halnya dengan permasalahan kemiskinan.

## LANDASAN TEORITIS

### Arti kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Namun, faktor ekonomi adalah pengukur yang sering digunakan oleh para pengkaji masalah sosio-ekonomi. Sebenarnya tidaklah mudah mendefinisikan arti kemiskinan, karena banyak faktor yang perlu dilihat selain faktor ekonomi seperti juga harus dilihat faktor non ekonomi. Untuk itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang standar sehingga dapat diterima oleh semua orang pada setiap masa. (Muhammad Syukri Salleh, 2000 : 3).

Dalam sistem ekonomi konvensional kemiskinan secara umum diartikan dari dua sudut pandang, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. *Kemiskinan absolut* adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal batas negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, kemiskinan absolut dapat dan memang terjadi di berbagai negara, baik di Negara Sedang Berkembang maupun di Negara Maju.

Terdapat satu lagi definisi kemiskinan dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional yaitu kemiskinan relatif. *Kemiskinan relatif* merupakan suatu upaya membandingkan golongan masyarakat kepada kelompok-kelompok miskin dan kaya, kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketidak samaan pendapatan masyarakat dalam sebuah perekonomian.(Chamhuri Siwar, 1988 : 10).

Definisi yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa mereka dalam mendefinisi kemiskinan sangat terpengaruh dengan nilai materi, persoalan kemiskina hanya dilihat berdasarkan kepada kurangnya pendapatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Kalaupun ada faktor-faktor non materi, itupun hanya berkisar pada sisi luar manusia. Misalnya persoalan jumlah pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pokok demi kelangsungan kehidupan manusia, mereka tidak menyentuh sisi kehidupan rohani manusia, yaitu satu sisi yang juga tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam arti kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif materi (kebendaan) dan perspektif non materi (rohani). Dalam mendefinisikan kemiskinan kebendaan ada dua istilah yang dipakai. *Pertama fakir dan miskin*, bahwa yang disebut *fakir* ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidupnya seperti makanan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya. Sementara yang disebut *miskin* ialah orang yang mempunyai harta atau pendapatan yang layak dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada cuma tujuh. (Al – Ghazali 1980 jilid 7).

Sementara dalam masalah ini Abu Yusuf berpendapat bahwa, kedua golongan ini sama, yaitu mereka adalah orang yang memerlukan bantuan orang lain karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Imam mazhab menyebutkan bahwa fakir merupakan mereka yang tidak mempunyai harta atau

pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala keperluan dasar lainnya. Sedangkan yang dikatakan dengan miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan seadanya dalam mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti yang diperlukan sepuluh, yang ada Cuma tujuh. (Yusuf Qhardawi 1998 : 512-514).

Dalam Islam selain adanya kemiskinan kebendaan seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga yang dinamakan kemiskinan jiwa. Kemiskinan jiwa, kalau dilihat dari perspektif ilmu tauhid disebut 'fakir mutlak' yaitu orang yang tidak merasa perlu kepada Allah s.w.t, walaupun mereka adalah orang yang kaya raya. Secara lebih luas kemiskinan jiwa ini dapat diartikan bahwa miskin dunia dan akhirat, di mana di dunia tidak mendapatkan nikmat kesenangan dan kemewahan kebendaan dan di akhirat pula tidak bisa merasakan nikmatnya syurga. Walaupun mereka orang kaya di dunia, tetapi mereka tidak mempunyai Iman, maka pasti akan menderita kekurangan yang tidak adaukupnya.

Surtahman Kastin (1996 : 74-75), menjelaskan bahwa kemiskinan jiwa merupakan miskin dunia akhirat, dimana di dunia orang tersebut tidak mendapatkan nikmat kesenangan dan kemewahan kebendaan dan di akhirat akan lebih parah lagi karena tidak dapat merasakan nikmatnya syurga. Selanjutnya dia menyebutkan bahwa, walaupun mereka orang kaya di dunia, tetapi mereka tidak punya iman, pasti dia akan menderita kekurangan yang tidak adaukupnya, sibuk yang tiada lapangnya dan riasau yang tiada senangnya, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak.

Dari penjelasan di atas jelas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara Islam dan Konvensional dalam memaknai arti kemiskinan, dimana Islam melihat kemiskinan ini tidak hanya bersandarkan kepada dimensi materi semata, tetapi mesti merangkumi kedua-dua dimensi baik itu materi maupun rohani, harta dan jiwa. Oleh itu iman dan taqwalah yang menentukan kaya dan miskinnya seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketaqwaan seseorang maka semakin kayalah jiwa dan sebaliknya. Sementara dalam mendefinisikan kemiskinan kebendaan terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu fakir dan miskin. Dalam bahasa ilmu ekonomi konvensional, maksud miskin disini adalah miskin mutlak, sedangkan maksud fakir lebih cenderung kepada miskin relatif. Perbedaan pandangan antara Islam dengan konvensional ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka terhadap kehidupan di dunia ini, dimana Islam melihat bahwa kehidupan manusia tidak akan terhenti di dunia ini semata-mata, tetapi kehidupan ini akan terus berlanjut dengan kehidupan akhirat, hal ini berbeda dengan Konvensional dimana mereka beranggapan bahwa kehidupan manusia ini akan selesai hanya di dunia ini saja.

### **Penyebab Kemiskinan**

Dari segi ekonomi, kemiskinan dikatakan berawal dari kemampuan produksi yang rendah. Pengeluaran yang rendah pula berawal dari ketiadaan atau kekurangan faktor produksi seperti modal, tanah dan teknologi. Dari sisi sosiologi, kemiskinan dikatakan disebabkan oleh personaliti dan kebudayaan seperti malas bekerja,

bergantung pada nasib dan merasa puas dengan rezeki yang ada tanpa perlu berusaha lagi. (Muhammad Syukri Salleh 2000 : 5).

Selain itu ada juga penulis yang percaya bahwa kemiskinan terjadi karena peminggiran golongan miskin dari kesempatan mereka dalam mendapatkan faktor produksi, pendidikan, perumahan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. (Mohd Taib Dora : 12).

Seperti yang telah dijelaskan dalam mendefinisikan kemiskinan bahwa penyebab kemiskinan dari pandangan ilmu ekonomi konvensional hanya berkisar materi semata, ia tidak menyentuh sisi rohani manusia. Sementara Islam melihat sebab kemiskinan itu juga dari dua sisi yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan harta dan kemiskinan yang disebabkan oleh pengingkaran terhadap ajaran agama.

Penyebab kemiskinan harta pembahasannya adalah sama seperti yang telah dibahas oleh ekonomi konvensional, baik itu kemiskinan yang disebabkan oleh peminggiran masyarakat miskin dari pembangunan maupun disebabkan oleh budaya malas bekerja. Seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Qadir (2001 : 211-212) tentang salah satu penyebab kemiskinan dalam hal materi bahwa, jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat disebabkan oleh tertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya. Selain itu kemiskinan harta juga disebabkan oleh kebodohan mereka karena tidak mampu mengolah sumber daya alam secara sewajarnya dan tidak melakukan distribusi pendapatan secara adil. (Mhd. Arshad bin Hj Taib 1989 : 8).

M. Quraish Shihab (1992 : 5) juga mempunyai pendapat yang hampir sama seperti yang telah dikatakan oleh Mhd. Arshad, bahwa penyebab kemiskinan dalam bentuk materi adalah sikap berdiam diri dan enggan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha disebabkan oleh manusia lain. Dalam pandangan beliau bahwa Allah s.w.t telah menjamin rizki bagi setiap makhluk yang telah diciptakannya, sumberdaya alam yang telah diciptakan oleh Allah s.w.t tidak terbatas. Seandainya satu sumber telah habis, maka masih ada sumber yang lain jika mereka mau berusaha. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas, akan tetapi sikap sebagian manusia terhadap manusia yang lain dan sikap manusia terhadap dirinya sendirilah yang menjadikan mereka tidak mendapatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah s.w.t.

Sementara itu seseorang dikatakan mengalami kemiskinan jiwa sekiranya rasa ketauhidan mereka kepada Allah s.w.t sangat rendah apalagi jika tidak ada sama sekali, walaupun mereka memiliki harta dalam jumlah yang banyak, tetapi mereka tidak akan mau mengeluarkan harta tersebut pada jalan Allah. Sedangkan bagi orang miskin, kemiskinan jiwa ini timbul ketika mereka tidak memiliki sifat sabar yang akhirnya akan melahirkan sifat hasad dan dengki dalam hati mereka.

Muhammad Syukri Salleh (2000 : 7) menjelaskan bahwa seseorang mengalami kemiskinan jiwa akibat sifat loba dengan harta dan tidak mau membantu orang lemah, mereka ini menerima laknat dari Allah s.w.t karena sikap mereka yang demikian. Walaupun kaya harta namun jiwa mereka miskin. Mereka senantiasa tidak merasa cukup dan puas dengan apa yang ada, mereka sibuk memburu dunia dengan

kerakusannya dan bersikap bakhil terhadap dunia, akhirnya mereka tiada menemui kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup, jiwa terasa kosong dan menderita. Selain itu kemiskinan jiwa juga disebabkan *kerana mereka tidak ridha kepada keadilan Allah s.w.t*, mereka menganggap bahwa Allah s.w.t membiarkan mereka hidup menderita.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa Islam dan Konvensional mempunyai kesamaan dalam memahami penyebab kemiskinan kebendaan, bahwa kemiskinan kebendaan disebabkan oleh sifat malas, distribusi sumber daya yang tidak adil, peminggiran golongan miskin terhadap kesempatan kerja dan partisipasi mereka dalam politik serta berbagai sebab lainnya yang menyebabkan golongan miskin terhalang untuk mendapatkan pendapatan yang cukup guna menafkahi diri dan keluarganya.

Namun yang membedakan antara penyebab kemiskinan dalam Islam dan konvensional ialah terletak pada penyebab kemiskinan jiwa. Di mana hal ini tidak dibicarakan dalam sistem ekonomi Konvensional sedangkan ekonomi Islam begitu serius dalam memandang hal ini. Ini karena dalam Islam kehidupan manusia itu tidak hanya di dunia ini saja, tetapi kehidupan ini akan berlanjut kepada kehidupan akhirat. Seseorang yang hidup di dunia dalam keadaan kaya raya tetapi jiwanya miskin akan mengalami penderitaan di akhirat. Penyebab kemiskinan jiwa sangat banyak, tetapi yang utama yang menyebabkan miskin jiwa adalah keingkaran manusia kepada Allah s.w.t atau syirik. Selanjutnya dari keingkaran itu akan diikuti oleh sifat bakhil, kikir, dengki, ujub dan berbagai sifat lainnya yang menyebabkan manusia mengalami kemiskinan jiwa.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian masalah Kemiskinan dalam Islam**

Suatu masalah tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna kecuali diketahui secara baik dan benar akar permasalahannya, begitu juga halnya dengan kemiskinan. Cara umum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan lebih cenderung memberi tumpuan kepada sektor eksternal saja walau dari apapun perspektif permasalahan kemiskinan itu dilihat. Persoalan-persoalan daya produksi, pendapatan dan kebutuhan pokok serta banyak masalah lainnya hanya berhubungan dengan nilai materi semata. Kalaupun ada masalah internal itu hanya meliputi masalah kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan permasalahan lainnya.

Berdasarkan kepada alasan di atas, maka konsep penanggulangan kemiskinan menurut Islam haruslah merangkumi kedua aspek yang ada pada manusia, baik itu masalah kemiskinan jiwa maupun masalah kemiskinan harta. Adalah tidak mungkin permasalahan kemiskinan harta dapat diselesaikan jika masalah kemiskinan jiwa tetap diabaikan. Oleh karena itu penyelesaian kemiskinan tersebut haruslah diselesaikan secara terpadu, yaitu dalam menaggulangi masalah kemiskinan ini mestilah dilakukan secara serentak baik kemiskinan harta maupun kemiskinan jiwa.

Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif menyediakan kedua-dua bentuk penyelesaian masalah kemiskinan ini, baik untuk menyelesaikan kemiskinan jiwa maupun menyelesaikan masalah kemiskinan harta, dalam bagian ini penulis

mencoba menguraikan konsep untuk membasmi kemiskinan jiwa dan kemiskinan harta yang dimiliki oleh Islam, mudahan-mudahan dapat bermanfaat.

#### *a. Penyelesaian masalah Kemiskinan Jiwa*

Secara umum, miskin jiwa berarti miskin iman dan taqwa, cara untuk mengurangi kemiskinan jiwa berarti harus diusahakan untuk meningkatkan iman dan taqwa. Oleh karena tempat iman dan taqwa itu adalah hati, maka dalam hal ini masalah artinya dengan membersihkan hati agar kosong dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Untuk dapat mengurangi kemiskinan jiwa ini, maka seseorang atau masyarakat harus mempunyai ilmu, terutama ilmu Agama, karena ilmu memiliki peranan penting untuk menghindarkan seseorang dari kemiskinan jiwa. Hanya orang yang berilmulah yang dapat membedakan hal apa saja yang akan dapat membawa seseorang itu kepada kemiskinan jiwa, dan mereka akan berusaha untuk dapat keluar atau menghindari kemiskinan jiwa ini. Di antara kemiskinan jiwa ini adalah sifat cinta dunia, kekuasaan duniawi, sombong, riya, bakhil dan sebagainya yang dapat merusakkan hati (Surtahman Kastin Hassan 1996 : 77-78).

Untuk menghapus kemiskinan jiwa ini, Islam ada caranya tersendiri yang beda dengan konsep menghapus kemiskinan kebendaan. Di bawah ini akan dijelaskan dua konsep yang telah dipilih dari sekian banyak konsep yang dimiliki oleh Islam untuk menanggulangi kemiskinan jiwa, hal itu seperti dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Qana'ah

Qana'ah artinya menerima dengan rela apa yang ada, atau cukup dengan apa yang dimilikinya setelah ia berusaha sedaya upaya. Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya itu hanya dicapai setelah bekerja dan berusaha. Qana'ah yang dimaksud di sini ialah qana'ah hati bukan qan'ah ikhtiar. Dalam qana'ah ikhtiar seseorang merasa cukup dengan ikhtiar mereka dan oleh itu tidak mau berusaha lagi. Tetapi dalam qana'ah hati, mereka berusaha dan berikhtiar sedapat mungkin dan setelah itu baru bertawakal kepada Allah s.w.t dan ridha dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah s.w.t. Pentingnya sifat qana'ah ini telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w "*Berbahagiaalah sesiapa yang mendapat petunjuk masuk Islam, sedang keadaan hidupnya sederhana tetapi qana'ah*" (H.R Tirmidzi). Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa "*Qana'ah itu umpama harta yang tidak habis dan perbendaharaan yang tidak akan berkurang*" (H.R. Thabrani).

Qana'ah ini berbeda dengan sifat fatalistik, di mana seseorang rela menerima apa yang ada dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki tanpa perlu berusaha untuk merubahnya, padahal ia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ia merasa bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan dan tidak perlu berusaha untuk merubahnya, sifat seperti ini biasanya dapat kita lihat pada pengikut golongan Jahariah (Yusuf Qardawi 2002 : 33-35).

Imam Al-Ghazali (1990 : 551-553), menjelaskan bahwa sifat qana'ah ini mestilah dimiliki oleh orang miskin agar mereka tidak tamak kepada harta benda orang lain, atau menginginkan sesuatu yang ada dalam tangan orang lain. Pokok dalam berqana'ah ini ialah senantiasa hidup sederhana di mana di dalamnya terlukiskan kemuliaan jiwa. Selain itu sifat qana'ah ini mengandungi lima perkara

yaitu ; menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada Allah s.w.t tambahan yang pantas disertai dengan usaha, menerima dengan sabar segala ketentuan Allah serta bertawakal kepada Allah s.w.t dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia.

Menurut Yusuf Qhardawi (2002 : 198-201) sifat qana'ah akan memberikan pengaruh kepada manusia, diantaranya:

1. Sifat qana'ah akan dapat menghilangkan sifat loba dan serakah terhadap dunia di dalam jiwa manusia, sehingga dia tidak akan berlomba untuk mengujarnya. Ini karena sifat serakah merupakan sifat alami yang melekat pada setiap manusia. Jika seseorang diberikan satu lembah emas, dia akan mencari lembah emas kedua, dan sekiranya dia mendapatkan lembah emas kedua, maka dia pun ingin memiliki lembah emas yang ketiga.
2. Manusia akan menggunakan cara yang halal dalam mencari rizki, oleh karena itu seorang mukmin akan bersungguh-sungguh untuk mencari rizki, tapi dengan menggunakan cara-cara yang halal dan tidak berlebih-lebihan. Tidak seperti orang yang menghabiskan waktunya siang dan malam dengan hati yang tamak dan jiwa yang selalu menggunakan kemewahan harta benda, sehingga mereka tidak merasakan ketenangan hati, tidak memperhitungkan jiwa yang ingin beristirahat dan tidak memperdulikan kejernihan akal.
3. Manusia tidak akan mencoba-coba untuk melakukan apa yang tidak mampu ia lakukan dan akan menerima apa yang dikarunikan Allah s.w.t kepadanya karena memang ia tidak sanggup merubahnya. Ia tidak berangan-angan dalam hidupnya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin ia miliki, karna panjang angan-angan hanya akan membuat dia lupa akan kehidupan akhirat.

## 2. Zuhud

Zuhud menurut pengertian syara' adalah mengambil barang yang halal setelah menyakini kehalalannya dalam jumlah yang diperlukan. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia sama sekali, tetapi sebaliknya mengambil darinya sekadar keperluan biarpun dalam jumlah yang banyak. Apabila sesuatu barang itu dianggap perlu, maka tetaplh hukumnya boleh asalkan tidak berlebih-lebihan.

Al-Ghazali (1990 : 560) khawatir mengenai salah tafsir tentang zuhud ini, beliau berkata bahwa "Mungkin ada yang mengira bahwa orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan harta, padahal tidaklah demikian. Karena meninggalkan harta dan menampakkan hidup prihatin sangatlah mudah bagi orang-orang yang setiap hari memakan makanan sedikit dan selalu tinggal di kuil-kuil yang tidak berpintu, tetapi tujuannya mereka yang sebenarnya adalah agar keadaan mereka itu diketahui orang dan mendapatkan pujian, hal ini jelas tidak menunjukkan sifat zuhud".

Said Hawwa (1998 : 329) mengutip pendapat Al-Ghazali bahwa tanda-tanda zuhud ada tiga:

1. Tidak terlalu bergembira jika mendapatkan sesuatu, dan tidak terlalu bersedih jika kehilangan sesuatu. Pada kedua keadaan itu sama saja. Allah s.w.t berfirman "*Kami jelaskan kepada kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang*

*diberikannya kepadamu. Dan Allah s.w.t tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri” (Q.S. Al-Hadid : 32).*

2. Senantiasa memandang sama kepada orang yang memuja dan mencelanya.
3. Senantiasa merasa tenang ketika berhadapan dengan Allah dan hatinya sangat cinta membuat amal baik.

Disamping itu Al-Ghazali juga menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat empat peranan zuhud, hal itu seperti di bawah ini:

1. Zuhud sebagai kaedah atau jalan terbaik bagi manusia untuk berhasil melepaskan diri dari ujian Allah s.w.t dalam bentuk kemewahan dunia. Allah s.w.t menjadikan dunia dan isinya untuk manusia. Manusia yang tidak tergoda dengan dunia ini karena sifat zuhudnya dan tetap dekat dengan Allah s.w.t dianggap berhasil melalui ujian ini. Allah s.w.t berfirman “*Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya* (Q.S Al-Kahfi : 18)
2. Zuhud merupakan sebab lahirnya sifat-sifat terpuji yang lain, umpamanya sifat murah hati. Beliau berkata “*Bukankah kikir itu buahnya cinta kepada dunia, dan murah hati buahnya zuhud ? Memuja buah adalah memuja kepada yang membuahkannya, yaitu zat Allah s.w.t”.*

Zuhud ini tidak hanya terbatas kepada golongan miskin saja atau hanya kepada golongan kaya semata-mata. Sebaliknya ia dapat diartikan dengan dua cara, *yakni zuhud* orang yang kaya dan *zuhud orang miskin*. Orang kaya patut berzuhud untuk menghindari dari sifat tamak yang dapat membawa kepada sifat-sifat keji lainnya. Orang miskin juga patut berzuhud agar tidak dicaci atau dibenci orang, sekiranya barang yang diminta itu tidak diberikan.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi masalah kemiskinan jiwa, pembangunan insan serta peningkatan iman dan taqwa adalah merupakan dasar yang paling utama. Mengiringi iman dan taqwa ini akan lahir sifat-sifat terpuji seperti qana’ah, zuhud, tawakkal dan lain-lain. Sementara iman dan taqwa tidak mungkin dapat ditingkatkan kecuali dimensi kerohanian menjadi penekan utama dalam usaha membasmi kemiskinan, karena tidak ada artinya seseorang yang memiliki harta dan kekayaan yang melimpah tetapi jiwanya miskin dengan tiada cahaya keimanan di dalam hatinya.

#### *b. Penyelesaian Kemiskinan Materil (kebendaan).*

Pada dasarnya, hukum miskin materi (harta) dalam Islam adalah *Mubah* (boleh). Namun, Islam mensyaratkan bahwa kemiskinan materi ini jangan sampai memcacatkan agama, anggota badan dan nyawa seseorang. Dalam arti lain, Islam membenarkan kemiskinan materi selagi orang-orang miskin tidak terhina dan hilang sifat kemanusiaannya. Sekiranya kemiskinan materi memberikan dampak yang negatif kepada seseorang terutama terhadap agama maka hukumnya terbagi kepada dua. *Pertama*, apabila kemiskinan materi disebabkan oleh sifat malas berusaha maka hukumnya adalah haram, artinya orang yang malas tersebut akan berdosa. *Kedua*, jika kemiskinan terjadi karena faktor-faktor yang tidak dapat dihindari seperti tidak dapat bekerja karena memberikan tumpuan sepenuhnya kepada urusan perjuangan di jalan

Allah s.w.t, ditimpa bencana atau akibat usahanya tidak berhasil maka hukumnya tidak berdosa (M. Syukri Salleh : 2000 - 10).

Islam telah menyediakan sebuah konsep yang matang untuk membasmi atau mengurangi kemiskinan materi ini, menurut Yusuf Qhardawi (1982 : 62) pembasmian kemiskinan materi dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah:

- Pemberdayaan usaha produktif.

Islam menerima pandangan positif mengenai kehidupan di muka bumi dan tidak membedakan dimensi materi dan rohani. Islam dengan tegas mencela pertapaan dan sangat menghargai setinggi-tingginya kegiatan perdagangan dan perekonomian yang sah. Semangat kerja dalam Islam dapat dengan mudah dilihat dari berbagai ayat dan hadist. Manusia diperingatkan bahwa Allah s.w.t telah menciptakan siang dan malam silih berganti sehingga manusia dapat mencari penghidupan disiang hari dan beristirahat di malam hari. Manusia didorong supaya bermanfaat untuk dirinya sendiri dari kesempatan yang banyak sekali diberikan untuk berusaha lebih produktif sebagai karunia tak terhingga, bahkan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dengan cara yang jujur dan tidak mengabaikan kewajiban kepada Allah s.w.t juga dipandang sebagai ibadah dalam Islam.

Untuk memperbaiki jumlah pendapatan golongan miskin, maka mereka harus didorong untuk bekerja lebih produktif, mereka harus didorong untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Dimana kebanyakan mereka berada di sektor informal, maka sektor ini harus di dorong dan diperhatikan oleh pemerintah dan memberikan peluang yang lebih baik untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka. Imam Hasan Al-Banna memberikan perhatian yang serius dalam usaha mengembangkan sektor kecil ini, dalam pembahasannya mengenai reformasi ekonomi umat Islam beliau menekankan bahwa sektor ini akan membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi golongan miskin.

Untuk memberi ruang kepada pengembangan usaha mikro ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, harus ada suatu perubahan cara hidup dari sebuah masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan barang yang di import dan menggantikannya dengan gaya hidup sederhana dengan membiasakan diri menggunakan barang dalam negeri. Dengan demikian barang yang dihasilkan oleh sektor mikro ini akan mendapatkan tempat di pasar. *Kedua*, harus ada perubahan dalam kebijakan terhadap sektor ini sedemikian rupa sehingga mereka tidak dipinggirkan, mereka harus terus diberikan dorongan dan bantuan untuk merealisasikan potensi mereka. *Ketiga*, sektor mikro ini harus diberdayakan dengan memberikan bantuan yang diperlukan seperti input yang lebih baik, tehnik pemasaran yang lebih baik dan pelayanan yang lain untuk dapat bersaing baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan barang-barang yang dihasilkan oleh industri-industri besar. *Keempat*, mereka harus diberdayakan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan. *Kelima*, perlu menghapuskan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu perkembangan sektor ini (M. Umer Chapra 2000:317).

- Membumikan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir dan miskin

Menurut ajaran Islam, adalah menjadi kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk kesejahteraan golongan fakir dan miskin. Al-qur'an mengingatkan bahwa pemberian tersebut tanpa mengharapkan imbalan atau ganjaran tertentu di dunia melainkan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah s.w.t dan keselamatan di akhirat. Istilah dalam Al-qur'an yang paling sering disebutkan berulang kali berhubungan dengan pemberian sukarela untuk kesejahteraan golongan miskin ini adalah infaq, sedakah, zakat dan it'am (memberi makan) (Ziauddin Ahmad 1998: 38).

Islam menekankan pemberian sukarela untuk kesejahteraan golongan miskin tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan melainkan juga untuk meningkatkan kepedulian sosial dan persaudaraan. Jika dalam sebuah masyarakat telah melupakan penderitaan golongan miskin, maka mereka seluruhnya akan mengalami kesulitan disebabkan tidak ada lagi persaudaraan di kalangan mereka.

Islam menggabungkan beberapa institusi untuk mengelola pemberian sukarela bagi kesejahteraan golongan miskin, seperti institusi wakaf dan manihah. *Wakaf* maksudnya penyerahan harta untuk kepentingan pihak lain selain pemilik harta, golongan miskin akan mendapatkan manfaat langsung daripada mekanisme wakaf apabila harta yang di wakafkan khusus dipergunakan untuk kepentingan mereka. *Sementara manihah*, merupakan pemberian aset produktif untuk golongan miskin dengan percuma untuk jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Nabi s.a.w untuk memungkinkan para penduduk Madinah memberikan bantuan kepada penduduk Mekkah yang berhijrah.

- Pembentukan sistem jaminan sosial.

Islam telah menetapkan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk menjamin keperluan minimum untuk seluruh warga negaranya. Begitu juga sudah merupakan kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah untuk diri dan keluarganya. Tetapi dalam perkara jika seseorang tidak mampu memberikan nafkah karena penghasilannya tidak mencukupi, maka dalam hal ini orang tersebut berhak memperoleh bantuan sosial.

Zakat merupakan salah satu sistem jaminan sosial yang bersifat keagamaan, dan ia merupakan satu undang-undang yang pertama lahir untuk membantu golongan miskin. Oleh karena itu zakat merupakan satu sistem perundangan yang harus dilaksanakan oleh negara Islam, dalam menghimpun dan mendistribusikan kembali kepada yang berhak. Ia bukanlah suatu sistem kebajikan individu atau sedakah yang bersifat suka rela, tetapi ia merupakan satu hak yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t yang harus diserahkan kepada golongan miskin.

Cara bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat ini diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam. Walaupun zakat merupakan sumber utama dalam sistem jaminan sosial Islam, namun jika hasil dari zakat tidak mencukupi untuk membantu golongan miskin, maka harus ditambah dari dana belanja pemerintah sejumlah yang diperlukan.

## **KESIMPULAN**

Keseluruhan huraian di atas membawa kepada kesimpulan bahwa kemiskinan bukanlah bersifat satu dimensi dan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan kepada

ukuran material semata. Atas sebab itu, penyelesaian masalah kemiskinan dengan menggunakan cara yang umum digunakan adalah belum begitu tepat lantaran tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang konsep kemiskinan. Sistem konvensional hanya coba menghapuskan kemiskinan materi semata, tanpa memperhatikan sisi rohani manusia.

Konsep kemiskinan dalam Islam meliputi dimensi yang lebih luas, yaitu kemiskinan materi dan kemiskinan jiwa, dimana setiap kemiskinan itu adalah masalah. Namun kemiskinan harta hanya bermasalah besar jika yang miskin harta itu juga miskin jiwa, sedangkan kemiskinan jiwa menimbulkan akibat yang berterusan sampai ke akhirat. Oleh karena itu Islam telah menyediakan cara penyelesaian dari kedua-dua kemiskinan tersebut. Terhadap pembasmian kemiskinan jiwa, disediakan cara untuk pengobatan hati atau rohani, sementara terhadap kemiskinan harta ada caranya tersendiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua-dua cara pembasmian kemiskinan tersebut harus dilakukan secara serentak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di kalangan umat Islam, *Wallahu'alam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1974. Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Pentafsiran Al-Qur'an. Indonesia : P.T Intermasa.
- Chamhuri Siwar.1988. *Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan: Satu Sorotan*. Dlm, Chamhuri Siwar dan Mohd. Hafiah Piei, *Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Humaidi Tatapangarsa. 1997. *Akhlaq yang Mulia*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Imam Al-Ghazali. 1990. *Bimbingan Mukmin*. Terj. Syed Ahmad Semit. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Imam Ghazali (Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali), 1980. *Ihya Ulumuddin*, Jilid 5 dan 7, Indonesia: penerbit Asli.
- M. Quraish Shihab. (tanpa tanggal). *Kemiskinan*. <http://www.Media.isnet.org/Islam/Quraish/Wawasan/index.html>. diakses 20 febuari 2003
- M. Quraish shihab. 1992. *Membumikan Al-Qu'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- M. Umar Chapra. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.
- Mohd. Taib Dora. 2000. *Peminggiran Sosial: keluarga Melayu Termiskin Bandar*. Johor Darul Ta'zim: Universiti Teknologi Malaysia.
- Mohd. Arshad bin Haji Taib. 1989. *Kemiskinan dan Penyelesaian Menurut Islam*. Tesis PhD. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Muhammad Syukri Salleh (2000). *Pengurusan Kemiskinan*. <http://www.geocities.com/m.syukrimiskinrembau.html>. diakses 10 Januari 2003.

- Muhammad Syukri Salleh. (2000). *Mencari Semula Erti Kemiskinan*. <http://www.geocities.com/muhammadsyukri/PEMIKIRMiskin.html>. diakses 15 Januari 2003.
- Sa'id Hawwa. 1998. *Mensucikan jiwa: Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu Intisari Ihya U'lumuddin Al Ghazali*. Terj. Annur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Robbani Press.
- Surtahman Kastin Hassan . 1996. *Kemiskinan dan pembasmian kemiskinan mengikut perspektif Islam*. Dlm. Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj. Idris, Kemiskinan dalam Arus Pembangunan Ekonomi Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Yusuf Qhardawi. 2002. *Takdir*. Terj. Abduh Zulfidar Akaha. : Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf Qhardawi. 1988. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Terj. Salman Harun at.all. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara dan Mizan.
- Yususf Qhardawi. 1982. *Problem Kemiskinan: Apa Konsep Islam*. Terj. Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ziauddin Ahmad. 1998. *Al-Qur'an : Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Terj. Ratri Pirianita. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

## PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PIDIE

Rusydi

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja 36 pegawai tetap pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie tahun 2008. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan yang cukup berarti antara pengawasan dengan disiplin kerja pegawai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi yaitu :  $Y = 0,711 + 1,126 X$ , dengan nilai  $r^2 = 0,865$  dan  $r = 0,930$ . Persamaan regresi tersebut bermakna setiap perubahan satu-satuan pengawasan mengakibatkan meningkatnya disiplin kerja pegawai sebesar 1,126 satuan. Adapun nilai  $r$  yang diperoleh menunjukkan bahwa pengawasan mempengaruhi disiplin kerja secara kuat. Dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi diperoleh  $r^2$  pengawasan sebesar 0,865. Hal ini menunjukkan pengaruh yang besar karena hanya 86,5% saja pengawasan yang dipengaruhi disiplin kerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 13,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan di dalam penelitian ini.

**Key words:** pengawasan, disiplin kerja

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan suatu organisasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta sangat tergantung kepada manajemen yang ditetapkan. Salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang telah digariskan adalah pengawasan.

Penerapan pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen ini telah lama diterapkan di instansi-instansi pemerintah di Indonesia. Salah satu instansi pemerintah yang telah menjalankan pengawasan adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

Kantor departemen agama kabupaten Pidie melakukan pengawasan untuk pencapaian yang telah direncanakan yaitu segala aktifitas pegawai sesuai dengan term of reference dan standart operasional prosedur yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang sebaik baiknya dan tidak ada penyimpangan sesuai dengan yang telah digariskan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu: Bagaimana Pengaruh Pengawasan di dalam menegakkan disiplin kerja pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Fungsi Pengawasan**

Pengawasan pada hakekatnya merupakan aktivitas kerja untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga segala penyimpangan yang akan terjadi dapat dihindari sedini mungkin, dengan cara mengamati setiap perbuatan baik telah selesai di kerjakan maupun yang sedang dan akan dilaksanakan. Untuk menjelaskan lebih lanjut masalah/tentang pengawasan, penulis ingin mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pengawasan.

Manullang (1990:23) Penjelasannya, pengawasan adalah : “Salah satu fungsi manajemen yang berupa mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula”.

Sedangkan menurut Sukamdiyo (1996:44) menyatakan, pengawasan adalah: “Proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula”.

Salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan maupun perusahaan tergantung pada keahlian dan kecakapan pemimpin atau manajer dalam menjalankan fungsinya dan dalam lingkungan kerja. Dengan demikian pimpinan dalam melakukan tugas pengawasan harus mengerti arti dan tujuan dari pengawasan itu.

Dalam hal ini Halsey (1990:21) menyebutkan ada enam sifat utama yang harus dimiliki seseorang untuk menuju suksesnya pengawasan tersebut, yaitu :

1. Kecermatan (throroughness)

2. Keadilan (fairness)
3. Daya usaha (initiative)
4. Kegairahan (enthusiasm)
5. Pengendalian perasaan (emotional control)
6. Kebijaksanaan

Menurut Terry (1991:18) pengawasan “mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan di evaluasi dan penyimpangan diperbaiki supaya tujuan dapat dicapai dengan baik”.

Siagian (1993:137) memberikan ciri-ciri pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat “fact finding” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan faktor-faktor tentang bagaimana tugas dalam menjalankan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif berarti bahwa proses pengawasan harus dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini harus dilaksanakan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Kalau pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan tujuannya harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan malahan pengawasan itu menghambat efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika tidak ada ketidakbenaran, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Dari beberapa ciri yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan berfungsi, antara lain :

1. Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan dan sebelum kemacetan itu timbul.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan yang timbul.
3. Mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan terhadap beban tugas.
4. Mendidik dan membina karyawan agar mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

### **Disiplin**

Semangat kerja adalah suatu keadaan dimana setiap waktu berada dalam suatu organisasi, semangat kerja merupakan suatu hal yang sangat berhubungan erat dengan lainnya. Dengan semangat kerja yang tinggi lebih menciptakan disiplin yang tinggi pula, sebaliknya dengan semangat mereka yang rendah maka segala peraturan yang

dijalankan akan sia-sia. Hal ini dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan, tingkat absensi yang tinggi serta pemindahan pegawai yang sering.

Masalah disiplin merupakan suatu masalah yang perlu ditegakkan dalam suatu instansi, dimana kadang kala pemimpin harus memberikan ancaman terhadap karyawan yang melanggar disiplin, meskipun demikian ancaman tersebut bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik pegawai supaya bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan.

Disiplin disini dapat diartikan sebagai peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan.

Handoko (1993:155), membedakan disiplin dalam tiga jenis yaitu :

- Disiplin preventif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Tujuan dari pada disiplin adalah untuk mendorong disiplin diri diantara para karyawan.
- Disiplin korektif, yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan disiplin (*disciplinari action*). Sasaran pendisiplinan adalah yang bersifat positif yaitu mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan karyawan yang berbuat salah.
- Disiplin progresif, yaitu membicarakan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman lebih serius dilakukan.

Leteiner (1993:71) mengatakan bahwa “Disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang didalam tubuh pekerja itu sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan suka rela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku”.

Dessler (1997 : 71) mengatakan bahwa : “Disiplin adalah suatu proses yang mengoreksi atau menghukum seorang bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur”.

Berdasarkan definisi diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan yaitu suatu sikap dan tingkah laku yang timbul dengan kesadaran sendiri yaitu untuk mentaati segala peraturan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam suatu tingkah laku dan perbuatan yang diinginkan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin**

Disiplin merupakan peraturan yang ditetapkan oleh setiap instansi baik pemerintah maupun swasta, disiplin tidak hanya diartikan sebagai tingkat absensi dan paling tepat waktunya. Untuk itu agar disiplin dapat ditingkatkan maka pimpinan, harus memperhatikan beberapa hal yang dapat mempengaruhi disiplin.

Nitisemito (1990:200) memberikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi disiplin yaitu :

1. Kedisiplinan dan kesejahteraan
2. Kedisiplinan dan ancaman
3. Ketegasan dalam pelaksanaan kedisiplinan

4. Kedisiplinan perlu diantisipasi
5. Kedisiplinan harus menunjang tujuan dan sesuai dengan kemampuan
6. Teladan pemimpin kunci

### **Kriteria Untuk Mengukur Disiplin**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dinyatakan dengan sebutan dan angka adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Kriteria Untuk Mengukur Disiplin**

No	Keterangan	Nilai
1	Amat Baik	91-100
2	Baik	76-90
3	Cukup	61-75
4	Sedang	51-61
5	Kurang	51 kebawah

Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Kesetiaan
2. Prestasi kerja
3. Tanggung jawab
4. Ketaatan
5. Kejujuran
6. Kerjasama
7. Prakarsa
8. Kepemimpinan

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data primer dan informasi yang benar dalam penulisan ini, maka penulis mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie di Jalan Syiah Kuala No. 5 Telp. (0653) 21012 - 21307 Kode Pos 24114 Sigli.

### **Responden**

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat memberikan data yang relevan dengan topik permasalahan. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie

yang berjumlah 36 orang karyawan. Keseluruhan responden menjadi sampel keseluruhan pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berguna untuk kepentingan penulisan ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

#### **a. Field Research (Riset Lapangan)**

##### ▪ Wawancara

Dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana Urusan Kepegawaian serta staf-staf terkait untuk keterangan atau informasi yang diberikan dalam penulisan ini.

##### ▪ Kuisisioner

Pengedaran kuisisioner merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer yang dirancang dalam suatu daftar pertanyaan lengkap. Kuisisioner ini dibagikan kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 36 orang responden.

#### **b. Library Research (Kepustakaan)**

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui referensi-referensi, brosur, bulletin yang berkaitan dengan disiplin kerja karyawan.

Data-data skunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui literatur-literatur, buku-buku bacaan dan sebagainya, untuk dijadikan sebagai landasan teori dalam membahas dan menganalisa hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

### **Peralatan Analisis Data**

Didalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan analisa data secara kualitatif dan kuantitatif.

#### **a. Metode Kualitatif**

Analisa kualitatif dikumpulkan dimana data yang telah dikumpulkan kemudian diolah kembali dan disusun dalam bab hasil penelitian dan dianalisa dengan disertai teori dan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis.

#### **b. Metode Kuantitatif**

Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk angka yang selanjutnya akan dianalisa secara kuantitatif dengan metode distribusi frekuensi yaitu perbandingan jumlah responden yang menjawab setiap pertanyaan menurut alternatif pilihan jawaban yang telah diberikan pada kuisisioner dalam bentuk persentase.

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja dilakukan analisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana yang dinyatakan sebagai berikut : (Subagyo, 2004:156).

$$Y = \alpha + \beta x$$

Dimana :

Y = Disiplin Kerja Pegawai

x = Pengawasan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Parameter yang dinilai

### Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini penulis menggunakan uji F dan uji t yaitu pada tingkat keyakinan (confidence interval 95 %) atau tingkat kesalahannya(alpha)/significance  $\alpha = 0,05$  atau 5%.

Konsep pemikiran :

$t_{hitung} > t_{tabel}$  maka menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$

$t_{hitung} < t_{tabel}$  maka menolak  $H_a$  dan menerima  $H_o$

Dimana :

$H_a$  = Adanya hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan disiplin kerja

$H_o$  = Tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan disiplin kerja.

### Skala Pengukuran

Untuk mengukur variabel-variabel penelitian digunakan skala likert dengan lima rentang. Penggunaan skala ini untuk mengukur item-item pertanyaan yang bersifat positif, terhadap masalah yang diteliti maupun pertanyaan yang bersifat negatif.

Alternatif penilaian dalam pengukuran item-item yang bersifat positif adalah sebagai berikut :

**Tabel 2: Skala Pengukuran**

No	Alternatif Jawaban	Nilai
1	Sangat Setuju (ST)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie diolah, 2008

Pernyataan pokok dalam penelitian ini adalah sangat setuju dan setuju, bila karyawan berpendapat bahwa ada pengaruh dari pengawasan terhadap disiplin kerja, sehingga karyawan memberi pernyataan sangat setuju maka diberikan nilai 5 dan memberi tanggapan setuju akan diberikan nilai 4, untuk tanggapan yang ragu-ragu antara setuju dan tidak setuju, maka diberi alternatif netral dengan nilai 3, sedangkan untuk tanggapan tidak setuju dan sangat tidak setuju berarti karyawan beranggapan tidak ada pengaruh atas pengawasan terhadap disiplin kerja diberi nilai 2 dan 1. Dan dalam penggunaan skala pengukuran tersebut terdapat 2 nilai yang ekstrim yaitu yang paling tinggi nilai 5 dan yang paling rendah nilai 1. Responden yang memilih sangat setuju dengan nilai 5 (lima) berarti pernyataan sesuai arah, kecenderungan dan pemikiran sebagai faktor mempengaruhi disiplin kerja, sedangkan pernyataan sangat

tidak setuju dengan nilai 1, berarti variabel ini bukan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi disiplin kerja karyawan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Departemen Agama adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengurus masalah keagamaan, pelaksanaannya dan realisasinya yang ditujukan kepada masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang susunan organisasi pemerintahan, dinyatakan bahwa Departemen Agama adalah sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sedangkan fungsi Departemen Agama adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan dan melaksanakan kebijaksanaan dibidang agama, memberikan bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengelola kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan yang telah dicapai membuat banyak perubahan yang terjadi dalam struktur, kebijaksanaan, sasaran dan arah kegiatan pelaksanaan tugas-tugas di lembaga ini. Pembangunan di bidang agama pada saat ini mempunyai sasaran menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang penuh keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan yang dinamis untuk memperkuat landasan kehidupan beragama. Sedangkan arah pembangunannya adalah untuk meningkatkan kualitas umat beragama untuk menciptakan kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan serta meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan.

Sasaran pembangunan di bidang agama ditujukan sebagai penataan kehidupan beragama yang harmonis, yang tercermin dari meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan melalui pendidikan dilingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah, perluasan sarana dan prasarana ibadah. Pada hal kebijaksanaan ditekankan pada peningkatan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan hidup beragama, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif umat beragama, serta meningkatkan kesadaran dan peran aktif umat beragama untuk memperkuat landasan bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Untuk melaksanakan sebagian tugas negara dibidang Agama, Pemerintah Republik Indonesia membentuk tiap-tiap kabupaten yang ada di Indonesia yaitu Kantor Departemen Agama.

### **Struktur Organisasi**

Pembentukan Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie didasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373

Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Dengan menitik beratkan kepada Keputusan Menteri Agama tersebut, maka ditetapkan struktur organisasi Kantor Departemen Agama tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota. Struktur atau susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie adalah organisasi yang bertipeologi 1-A, dimana seorang kepala membawahi beberapa bidang dibawahnya yaitu 1 Sub Bagian, 5 buah Seksi dan 1 Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf. Adapun tugas-tugas yang terdapat pada kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie
2. Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Urusan Agama Islam
4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
5. Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum
6. Seksi Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren
7. Seksi Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.
8. Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf

### **Keadaan Pegawai**

Jumlah pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3: Perkembangan Jumlah Pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008**

No	Unit Kerja	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	12	2	14
2	Seksi Urais	3	1	4
3	Seksi Haji dan Umrah	3	1	4
4	Seksi Mapenda	5	2	7
5	Seksi Pekapontren	1	-	1
6	Seksi Penamas	2	1	3
7	Peny. Wakaf dan Zakat	1	2	3
Jumlah		27	9	36

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diolah 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada unit kerja Sekretariat ada 12 orang jenis kelamin laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada Seksi Urais 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sedangkan pada Seksi Haji dan Umrah 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Seksi Mapenda 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan Seksi Pekapontren hanya 1 orang laki-laki. Pada Seksi Penamas 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Sedangkan data jumlah pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie menurut jabatan di setiap unit kerjanya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4: Data Jumlah Pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Menurut Jabatan Tahun 2008**

No	Unit Kerja	Jabatan				Total
		Eselon III	Eselon IV	Eselon V	Staf	
1	Sekretariat	1	1		12	14
2	Seksi Urais		1		3	4
3	Seksi Haji dan Umrah		1		3	4
4	Seksi Mapenda		1		6	7
5	Seksi Pekapontren		1		-	1
6	Seksi Penamas		1		2	3
7	Peny. Wakaf dan Zakat		1		2	3
Jumlah		1	7		28	36

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diolah 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga eselon dan staf pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, dimana pada unit kerja Sekretariat hanya ada 1 orang bereselon III, 1 orang bereselon IV dan 12 orang staf. Pada Seksi Urais hanya ada 1 orang eselon IV dan 3 orang staf, sedangkan pada Seksi Haji dan Umrah 1 orang eselon IV dan 3 orang staf. Seksi Mapenda memiliki 1 orang eselon IV dan 6 orang staf, sedangkan Seksi Pekapontren hanya ada 1 orang eselon IV. Pada Seksi Penamas 1 orang eselon IV dan 2 orang staf, dan pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf hanya ada 1 orang eselon IV dan 2 orang staf.

Sedangkan data jumlah pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5: Data Jumlah Pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2008**

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		4	9	1	14
2	Seksi Urais			4		4
3	Seksi Haji dan Umrah		1	3		4
4	Seksi Mapenda		1	5	1	7
5	Seksi Pekapontren			1		1
6	Seksi Penamas			3		3
7	Peny. Wakaf dan Zakat			3		3
Jumlah			6	28	2	36

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diolah 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan karyawan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie terdapat tiga golongan yaitu golongan II, III dan IV. Dimana setiap seksi memiliki karyawan yang berbeda golongan seperti

pada Sekretariat terdapat 4 orang golongan II, 9 orang golongan III dan 1 orang golongan IV. Sedangkan pada Seksi Urais 4 orang pegawai yang kesemuanya golongan III. Seksi Haji dan Umrah hanya 1 orang golongan II dan 3 orang golongan III, sedangkan Seksi Mapenda hanya terdapat 1 orang golongan II, 5 orang karyawan golongan III dan hanya 1 orang yang golongan IV. Pada Seksi Pekapontren hanya 1 pegawai yang bergolongan III, begitu juga halnya dengan Seksi Penamas, 3 orang pegawai semuanya golongan III, demikian juga Penyelenggara Zakat dan Wakaf hanya 3 orang golongan III.

Pada tingkat pendidikan dari keseluruhan jumlah pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie hanya 5 orang pada Sekretariat tamatan SLTA, 1 orang tamatan Akademi, 8 orang sarjana S1. Pada Seksi Urais memiliki 4 orang tamatan S1. Sedangkan Seksi Haji dan Umrah hanya 1 orang tamatan SLTA, 2 orang tamatan S1 dan 1 orang tamatan Pasca Sarjana atau S2. Seksi Mapenda ada 2 orang tamatan SLTA dan 5 orang tamatan S1, sedangkan Seksi Pekapontren hanya memiliki 1 orang pegawai tamatan S1, begitu juga Seksi Penamas hanya memiliki 3 orang tamatan S1 dan terakhir Penyelenggara Zakat dan Wakaf hanya memiliki 3 orang yang berpendidikan S1. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

**Tabel 6: Data Jumlah Pegawai pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008**

No	Unit Kerja	Pendidikan				Total
		SLTA	Akademi	Sarjana	Pasca Sarjana	
1	Sekretariat	5	1	8		14
2	Seksi Urais			4		4
3	Seksi Haji dan Umrah	1		2	1	4
4	Seksi Mapenda	2		5		7
5	Seksi Pekapontren			1		1
6	Seksi Penamas			3		3
7	Peny. Wakaf dan Zakat			3		3
	Jumlah	8	1	26	1	36

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diolah 2008

### **Karakteristik Responden**

Karakteristik responden menggambarkan identifikasi responden yang dilihat dari segi jenis kelamin, usia, status perkawinan, masa kerja, pendidikan terakhir dan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengedaran kuisioner pada 36 orang pegawai atau 100%. Dari total populasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie untuk melihat distribusi frekuensi jawaban dari masing-masing pegawai untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini :

**Tabel 7: Karakteristik Responden**

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin :		
	▪ Laki-laki	27	75,00
	▪ Perempuan	9	25,00
2.	Status Perkawinan :		
	▪ Menikah	32	88,89
	▪ Belum Menikah	4	11,11
3.	Usia :		
	▪ < 30 tahun	3	8,33
	▪ 31 s/d 40 tahun	17	47,22
	▪ 41 s/d 50 tahun	14	38,89
	▪ > 50 tahun	2	5,56
4.	Tingkat Pendidikan :		
	▪ SLTA	8	22,22
	▪ Akademi/Dipl.	1	2,78
	▪ Sarjana (S-1)	26	72,22
	▪ Pasca Sarjana (S-2)	1	2,78
5.	Masa Kerja :		
	▪ < 5 tahun	10	27,78
	▪ 6 s/d 10 tahun	9	25,00
	▪ 11 s/d 15 tahun	9	25,00
	▪ 16 s/d 20 tahun	4	11,11
	▪ > 20 tahun	4	11,11
6.	Pendapatan Perbulan :		
	▪ 1.000.000-1.500.000	6	16,67
	▪ 1.500.000-2.000.000	22	61,11
	▪ > 2.000.000	8	22,22
Total		36	100,00

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diolah 2008

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel 7 dapat dijelaskan bahwa menurut jenis kelamin sebanyak 27 orang atau 75 % terdiri dari responden laki-laki dan sebanyak 9 orang atau 25 % terdiri dari responden perempuan, dengan demikian responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dalam penelitian ini.

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 32 orang atau 88,89% berstatus menikah, sebanyak 4 orang atau 11,11% berstatus belum menikah.

Berdasarkan usia responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 3 orang atau 8,33% berusia dibawah 30 tahun, responden dengan tingkat usia 31 - 40 tahun sebanyak 17 orang atau 47,22% dari total responden, responden dengan tingkat usia 41 - 50 tahun sebanyak 14 orang atau 38,89 %, kemudian responden dengan usia di atas 50 tahun hanya 2 orang atau 5,56% dari total responden.

Kemudian karakteristik responden selanjutnya adalah mengenai tingkat pendidikan terakhir responden, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 8 orang atau 22,22% responden berpendidikan setingkat SLTA, kemudian responden dengan tingkat pendidikan setingkat Akademi/Diploma sebanyak 1 orang atau 2,78% responden, dengan tingkat pendidikan setingkat Sarjana sebanyak 26 orang atau 72,22%, dan responden dengan tingkat pendidikan setingkat pasca sarjana atau S-2 sebanyak 1 orang atau 2,78%. Dengan demikian responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S-1).

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja di Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 10 orang atau 27,78% mempunyai masa kerja dibawah 5 tahun, sebanyak 9 orang atau 25% mempunyai masa kerja 6 – 10 tahun, sebanyak 9 orang atau 25% mempunyai masa kerja 11 – 15 tahun, sebanyak 4 orang atau 11,11% dengan masa kerja 16 – 20 tahun dan sebanyak 4 orang atau 11,11% mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 6 orang atau 16,67% mempunyai tingkat pendapatan Rp. 1.000.000,- - 1.500.000, kemudian responden dengan tingkat pendapatan Rp. 1.500.000,- - 2.000.000, sebanyak 22 orang atau 61,11% dan responden dengan tingkat pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000,- sebanyak 8 orang atau 22,22%. Dengan demikian responden yang paling dominan dalam penelitian ini adalah responden yang mempunyai tingkat pendapatan antara Rp. 1.500.000,- - Rp. 2.000.000,-

### Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuisioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini uji reliabilitas berdasarkan Crombach Alpha yang lazim digunakan untuk pengujian kuisioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada.

Uji reliabilitas pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie memperlihatkan bahwa penilaian secara keseluruhan tingkat kehandalan kuisioner telah memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan oleh Nunnally (1967:67) untuk lebih jelas besarnya nilai alpha pada masing-masing variabel diperlihatkan pada tabel 8 berikut.

**Tabel 8: Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)**

No	Variabel	Rata-rata	Jumlah Variabel	Nilai Alpha	Kehadiran
1.	Disiplin Kerja (Y)	3.79	7	0,9553	Handal
2.	Pengawasan (X)	4.00	5	0,9446	Handal

Sumber : Data Primer (diolah) 2008

Berdasarkan analisis reliabilitas (uji kehandalan) dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel. Disiplin kerja pegawai diperoleh nilai alpha sebesar 0,9553 dan variabel pengawasan kerja pegawai diperoleh nilai alpha sebesar 0,9446.

demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kehandalan memenuhi kredibilitas crombach alpha sebagaimana dipersyaratkan oleh Nunnally sebesar 0,50.

### **Persepsi Responden Terhadap Pengawasan Kerja** *Pengawasan Kerja*

Pengawasan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu organisasi sebagaimana persepsi responden mengenai pengawasan kerja seperti yang dijelaskan pada tabel 9 berikut ini :

**Tabel 9: Pengawasan (X)**

No.	Variabel	Sangat tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Pengawasan yang dilakukan selama ini terlihat baik dalam bentuk pengawasan awal dalam proses pelaksanaan kerja karyawan dan akhir dari suatu pelaksanaan kerja	0	0	0	0	15	41.67	19	52.78	2	5.56	3.64
2	Mengoreksi terhadap pelaksanaan kerja karyawan jika ada pekerjaan yang belum sesuai dengan yang direncanakan	0	0	0	0	10	27.78	24	66.67	2	5.56	3.78
3	Senantiasa dilakukan pengawasan pada level yang paling bawah sampai ke level yang paling tinggi	0	0	0	0	17	47.22	17	47.22	2	5.56	3.58
4	Pelaksanaan pengawasan tetap pada ruang lingkup yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku	0	0	0	0	0	0.0	21	58.33	15	41.67	4.42
5	Adanya tindakan tertentu bila karyawan melakukan kesalahan	0	0	0	0	0	0.0	15	41.67	21	58.33	4.58
Rata-rata											4.00	

Sumber: Data Primer (diolah) 2008

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pengawasan dapat mendorong pelaksanaan kerja karyawan dengan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,64, pernyataan bahwa mengoreksi terhadap pelaksanaan kerja karyawan jika ada pekerjaan yang belum sesuai dengan yang direncanakan diperoleh nilai rata-rata 3,78, pernyataan mengenai senantiasa dilakukan pengawasan pada level yang paling bawah sampai level yang paling tinggi diperoleh nilai rata-rata 3,58, pernyataan mengenai pelaksanaan pengawasan tetap pada ruang lingkup yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku diperoleh nilai rata-rata 4,42, pernyataan mengenai adanya tindakan tertentu bila karyawan melakukan kesalahan diperoleh nilai rata-rata 4,58, berdasarkan hasil analisis dari variable pengawasan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00, dengan demikian responden menyatakan sangat setuju terhadap semua pernyataan dalam variabel pengawasan kerja.

### Disiplin Kerja

Pada tabel 10 berikut ini akan menjelaskan, mengenai disiplin kerja, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 10: Disiplin Kerja (Y)**

No.	Variabel	Sangat tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Kehadiran para karyawan sangat baik	0	0	0	0	11	30.56	13	36.11	12	33.3	4.03
2	Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya	0	0	0	0	14	38.89	20	55.56	2	5.56	3.67
3	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan	0	0	0	0	0	0.0	19	52.78	17	47.22	4.47
4	Konsisten terhadap resiko yang diterima dan keputusan yang dibuat	0	0	0	0	23	63.89	10	27.78	3	8.33	3.44
5	Mentaati peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	28	77.78	4	11.11	4	11.11	3.33
6	Ketaatan mematuhi peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasan	0	0	0	0	14	38.89	15	41.67	7	19.44	3.81
7	Kesanggupan tidak melakukan larangan yang ditentukan	0	0	0	0	13	36.11	17	47.22	6	16.67	3.81
Rata-rata											3.79	

Sumber : Data Primer (diolah), 2008

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dijelaskan bahwa kehadiran para karyawan diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,03, pernyataan responden mengenai kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya diperoleh nilai rata-rata 3,67, pernyataan mengenai tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan diperoleh nilai rata-rata 4,47, pernyataan mengenai konsisten terhadap resiko yang diterima dan keputusan yang dibuat diperoleh nilai rata-rata 3,44.

Pernyataan mengenai mentaati peraturan perundang-undangan diperoleh nilai rata-rata 3,33, pernyataan responden mengenai ketaatan mematuhi peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasan diperoleh nilai rata-rata 3,81 dan pernyataan responden mengenai kesanggupan tidak melakukan larangan yang ditentukan diperoleh nilai rata-rata 3,81, dan semua pernyataan dalam variabel disiplin kerja diperoleh nilai rata-rata 3,79.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap pegawainya dapat meningkatkan semangat kerja pada setiap diri pegawai. Tanpa adanya pengawasan, pekerjaan yang dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik dan tentu akan mengalami banyak penyimpangan.

Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu instansi, sebab pengawasan berpengaruh bagi keberhasilan suatu organisasi. Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas mengenai fungsi pengawasan dalam menjalankan organisasi, maka sebagai landasan yang sangat mendasar dari kajian ini penulis ingin melaksanakan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai Departemen Agama Kabupaten Pidie. Dimana variabel pengawasan tersebut yang merupakan variabel terikat yang diidentifikasi sebagai variabel dependent (x).

**Tabel 11: Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Masing-Masing Variabel Bebas terhadap Terikat**

Nama Variabel	B	Standar Error	t-hitung	t-tabel	Signifikan
Konstanta	0,711	0,307	2,316	2,030	0,027
Pengawasan Kerja	1,126	0,076	14,777	2,030	0,000
Koefisien Korelasi @	= 0,930 <sup>a</sup>		a. Predictors (constant) Pengawasan (x)		
Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	= 0,865				
Adjusted (R <sup>2</sup> )	= 0,861				
F-hitung	= 218,358				
Ftabel	= 4,130		b. Devedent variabel : disiplin kerja		
Signifikan.F	= 0,000 <sup>a</sup>		karyawan Departemen Agama Kabupaten Pidie		

Sumber : Data Primer (diolah), 2008

Dari hasil perhitungan regresi linear yang dapat ditulis dalam persamaan berikut:

$$Y = 0,711 + 1,126X$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian : Koefisien korelasi ( $r$ ) = 0,930 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 93 % artinya disiplin kerja sangat erat hubungan dengan faktor pengawasan.

Koefisien determinasi ( $r^2$ ) = 0,865 artinya sebesar 86,5 % perubahan-perubahan dalam variabel terikat (disiplin kerja) dapat disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam faktor pengawasan (X), sedangkan selebihnya yaitu sebesar 13,5% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### **Koefisien regresi ( $\beta$ ) :**

Konstanta sebesar 0,711 artinya jika faktor pengawasan (X) dianggap konstanta. Maka besarnya disiplin kerja karyawan kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie adalah sebesar 0,711 pada satuan skala likert.

Koefisien regresi pengawasan kerja 1,126 artinya bahwa setiap 100% perubahan (perbaikan) dalam kebijakan pengawasan secara relatif akan meningkat disiplin kerja karyawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie 1,126 dengan demikian semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka semakin tinggi pula disiplin kerja karyawan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa pengawasan mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap disiplin kerja karyawan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

#### **Hasil Uji-F dan Uji-t**

##### *Hasil Uji-F*

Hasil pengujian secara Simultan diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 218,358 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 4,130. Hal ini memperlihatkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Dengan tingkat probabilitas 0,000 dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

##### *Hasil Uji-t*

Untuk menguji faktor yang mempunyai pengaruh dengan disiplin kerja karyawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie secara parsial dapat dilihat dari hasil Uji-t. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 9 di atas, dimana dapat diketahui besarnya  $t_{hitung}$  pada variabel dengan tingkat kepercayaan atau signifikan sebesar  $\alpha = 5\%$ . Hasil penelitian pada variabel pengawasan kerja (X) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 14,777 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,030 hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$

$t_{tabel}$  dengan signifikan sebesar 0,000 atau probabilitas jauh di bawah  $\alpha = 0,05$  dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan secara parsial bahwa variabel pengawasan kerja (X) berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan, bahwa secara parsial variabel berpengaruh (mempunyai hubungan) secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil uji statistic secara Simultan (Uji-F), maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa variable pengawasan kerja (X), yang digunakan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap peningkatan disiplin kerja karyawan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie. Karena diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 218,358 dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,130, dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 sehingga menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol. Artinya variabel pengawasan kerja (X) berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

Sedangkan secara parsial variabel yang diamati mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, karena diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , sehingga variabel yang diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis memberi kesimpulan dan saran-saran yang mudah-mudahan memberi manfaat bagi Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie dan pembaca jurnal ini.

### Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan pimpinan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie ternyata telah membawa hasil yang baik terhadap tugas yang diberikan.
2. Teladan pimpinan juga mempengaruhi cara kerja pegawai, pimpinan harus peduli kepada bawahan.
3. Hasil pengujian secara Simultan diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 218,358 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  adalah sebesar 4,130. Hal ini memperlihatkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Dengan tingkat probabilitas 0,000 dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol. Sedangkan  $t_{hitung}$  pada variabel dengan tingkat kepercayaan atau signifikan sebesar  $\alpha = 5\%$ . Hasil penelitian pada variabel pengawasan kerja (X) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 14,777 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,030 hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikan sebesar 0,000 atau probabilitas jauh di bawah  $\alpha = 0,05$ .

4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 218,358 dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,130 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 sehingga menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol. Artinya variabel pengawasan kerja (X) berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie

#### **Saran-saran**

1. Pengawasan yang dilakukan pimpinan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie selama ini, agar dapat dipertahankan dan untuk masa yang akan datang dapat ditingkatkan.
2. Pimpinan harus peduli kepada bawahannya baik urusan kantor maupun urusan lain yang dihadapi para karyawan yaitu dengan memberikan solusi atau cara pemecahannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dessler, Gary, (1997) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Bahasa Indonesia*, Jilid Kedua, Prehankindo, Jakarta.
- Handoko T, Hani (1993), *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Halsey D, Giarge (1990) *Bagian Memimpin dan Mengevaluasi Pegawai*. Penerbit, Akasa Baru.
- Himpunan Peraturan Kepegawaian (1979) Jilid II Badan ADM Kepegawaian Negara.
- Leteiner, Alfred. R (1993) *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. BPFE Jakarta.
- Manullang (1996), *Manajemen Personalialia*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manullang (1990), *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nitisemito, Alex S (1990) *Manajemen Personalialia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nunnally Jum C, (1967) *Psychometric Theory* Mc. Graw Hill Book Company, New York.
- Siagian (1993) *Manajemen Personalialia*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, Pangestu (2004) *Statistika Terapan Aplikasi Pada Perencanaan dan Ekonomi*, Penerbit BPFE UGM Yogyakarta.
- Sukamdiyo, IGN (1996) *Manajemen Koperasi*, PT. Gelora Angkasa Pratama.
- Terry R, Gary (1991) *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terjemahan J. Smith DFM, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

**PENGARUH ALOKASI WAKTU TERHADAP TINGKAT PENGHASILAN  
TUKANG OJEK DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**N a z i r**

**Abstract:** *This research is proposed to identify and analyze the effect of time allocation toward of level of ojek's revenue in Lhokseumawe. The sample of this research is some ojek men who operate in Lhokseumawe area, trere are 45 respondents by using sampling purposive technique. The level of there revenue is highly effectted by time allocation. The longer time allocated, the higher revenue they receive other wise, the sorter time allocated, the lower revenue they receive. Thefore, they should take the chance and opportunity to increase their time allocation, thus by increasing the time allocation, they will increase the level of their revenue.*

**Key words :** *revenue, time allocation*

## **PENDAHULUAN**

Zaman sekarang ini arus transportasi sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Fungsi dan peran jasa angkutan sangat membantu dan memberikan andil yang positif kepada masyarakat. Perusahaan jasa angkutan tersebut juga dapat membuka kesempatan kerja kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hal ini dapat menunjang proses pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dalam hal menekan angka pengangguran baik di perkotaan maupun di pedesaan. Transportasi merupakan sarana mobilitas manusia dan barang yang berfungsi untuk melancarkan arus manusia, barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli oleh masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini telah meningkatkan peranan sektor transportasi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kegiatan manusia seiring dengan kebutuhan dasar manusia dengan manusia lainnya atau sistem kebutuhan lainnya seperti alat perhubungan yang disebut dengan alat transportasi. Dengan adanya alat transportasi, maka pergerakan lalu lintas menjadi lebih cepat, aman, nyaman dan terintegrasi. Sarana transportasi atau alat angkut berkembang mengikuti fenomena yang timbul akibat penggalan sumberdaya seperti penemuan teknologi baru, perkembangan struktur masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Transportasi tersebut berfungsi ganda, di satu sisi harus mampu menunjang dan di sisi lain juga mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.

Masyarakat yang tidak memiliki transportasi dapat menggunakan jasa angkutan seperti bus, labi-labi, becak dan ojek serta angkutan lainnya. Biasanya masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan dalam melakukan perjalanan jauh memakai jasa angkutan bus, sedangkan dalam melakukan perjalanan dekat hanya memakai labi-labi, becak, dan ojek seperti yang terlihat pada masyarakat kota Lhokseumawe.

Saat ini di setiap kecamatan yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe telah banyak muncul tukang ojek, ini terjadi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak, dalam hal ini tidak tersedianya lapangan kerja formal, dengan demikian mencari jalan alternatif yaitu bekerja atau berusaha di sektor informal dengan tujuan untuk memperoleh penghasilannya, salah satunya menarik ojek, tidak terkecuali di Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kota

Lhokseumawe pada khususnya. Ojek biasanya melayani jasa angkutannya dari satu desa ke desa lainnya dan juga antar kecamatan.

Tukang ojek dalam melakukan pekerjaannya yaitu dalam melayani jasa angkutannya tidak di batasi pada jam kerja. Setiap tukang ojek yang satu dengan tukang ojek lainnya tentu berbeda dalam mengalokasikan waktunya dalam memberikan pelayanan, kondisi ini berdampak terhadap tingkat penghasilan yang di terimanya. Di samping itu juga di tuntutan kesabaran, kreatifitas, keuletan serta semangat yang tinggi dari tukang ojek dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan demikian maka akan lebih mudah dalam mencari penumpangnya atau sering yang disebut dengan sewa. Dan yang terpenting lagi dalam hal melayani penumpang, di mana tukang ojek juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpangnya, dengan demikian penumpang merasa puas atas pelayanan yang di berikannya, dan pada akhirnya penumpang setia terhadap ojek yang memberikan kepuasan kepadanya yang selanjutnya berdampak pada peningkatan penghasilan.

Penghasilan yang diperoleh oleh tukang ojek di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah alokasi waktu. Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan atau pendapatan seseorang dalam berusaha atau bekerja salah satunya variabel yang digunakan adalah alokasi waktu, antara lain penelitian (Efendi,2003. Megantara, 2003. Simanjuntak, 2004. Simamora, 2006). Apabila mengalokasikan waktunya lebih banyak maka tingkat penghasilan yang diterima akan tinggi dan sebaliknya apabila mengalokasikan waktunya sedikit maka tingkat penghasilan yang di terimanya juga sedikit. Pada prinsipnya semua orang menginginkan penghasilan yang tinggi agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya serta mempertahankan kelangsungan hidupnya yang wajar dan layak, akan tetapi sumber daya yang di miliki oleh setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti tukang ojek yang menggunakan sumber daya dalam mengalokasikan waktunya dalam manarik ojek, Maka dalam hal ini di duga alokasi waktu yang digunakan oleh tukang ojek dapat berpengaruh terhadap tingkat penghasilannya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Penghasilan**

Penghasilan merupakan konpensasi dari hasil kerja yang telah dilaksanakan. Berbicara tentang penghasilan pikiran orang akan tertuju pada pendapatan, karena pendapatan juga berasal dari hasil kerja dari suatu usaha yang telah dilakukan (Ningsih, 2001). Umumnya penghasilan yang di terima oleh seseorang berbentuk uang atas balas jasa yang di berikan kepadanya dalam melakukan sesuatu pekerjaan, begitu juga dengan pendapatan. Harahap (2002) mengemukakan bahwa “pendapatan merupakan sebagai hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepada langganan, atau mereka yang menerima jasa”. Menurut Rizal (2001) mengemukakan bahwa “setiap kegiatan seseorang mengharapkan imbalan atau pendapatan, pendapatan yang dimaksud disini adalah adalah pendapatan yang diterima dari hasil kerja dan hasil usaha yang dilakukan secara maksimal dalam suatu pekerjaan”. Noor (2007) yang menyatakan bahwa “pendapatan (*revenue*) berasal dari penjualan. Nilai penjualan tersebut ditentukan oleh jumlah unit yang terjual dan harga

jual”. Sedangkan menurut Longenecker dkk (2001) “pendapatan merupakan jumlah yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu, sering kali dalam waktu satu tahun”. Pengertian ini juga di dukung oleh Nudirman (2001) mengemukakan bahwa “pendapatan adalah nilai yang didapat dari suatu usaha yang telah dilaksanakan dalam waktu kurun tertentu”. Kemudian menurut Boediono. (1999) pengertian pendapatan adalah “sebagai saluran penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dari jumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlaku pada saat itu “.

Selanjutnya menurut Madura (2001) pendapatan konsumen menentukan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh individu. Suatu pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi mengakibatkan pendapatan lebih bagi konsumen. Apabila pendapatan konsumen naik, mereka mungkin akan meminta kuantitas lebih besar daripada barang dan jasa tertentu yaitu, jadwal permintaan untuk berbagai barang dan jasa mungkin tergeser keluar sebagai reaksi pendapatan yang lebih tinggi. Kiesno, dkk (2002) pendapatan merupakan Arus masuk atau peningkatan lainnya atas lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Menurut Niswonger (1996) bahwa ”pendapatan (*revenue*) merupakan kenaikan faktor-faktor dalam modal; yang berasal dari kegiatan usaha, pendapatan ini dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien persewaan harta, meminjamkan uang dan semua kegiatan usaha dari profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan”. Djojohadikusumo (1991) mengatakan bahwa “peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar”.

### **Pengertian Alokasi Waktu**

Dalam melakukan suatu pekerjaan baik pada swasta maupun kantor pemerintah tentunya di berlakukan jam kerja standar, di sektor swasta di berlakukan jam kerja lembur, jam kerja lembur ini di hitung apabila seorang karyawan atau pegawai bekerja melebihi jam kerja standar. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Pasal 77, Ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan jam kerja standar yaitu 7 jam perhari dan untuk 6 hari kerja 8 dan 40 jam perminggu.

Menurut Mubyarto (1990:36) menyatakan bahwa ”curah jam kerja adalah jumlah jam kerja yang di curahkan oleh setiap tenaga kerja selama proses produksi artinya banyaknya jumlah jam kerja yang dikeluarkan tenaga kerja dalam suatu proses produksi, sedangkan tingkat pencurahan adalah prosentase banyaknya jam kerja yang dicurahkan terhadap jumlah kerja yang tersedia artinya jumlah jam kerja yang dicurahkan terhadap suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam prosentase”.

Menurut Hudiyanto dalam Nusantara (2000) ada dua pengertian dalam hal curahan jam kerja, pertama, pengertian jam kerja yang dicurahkan menyangkut jumlah jam kerja yang digunakan seseorang dalam suatu waktu, kedua, tingkat curahan jam kerja, menunjukkan prosentase banyaknya jam kerja yang tersedia.

Selanjutnya Schroeder (1989) mengemukakan bahwa “Jam kerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan”. Pengertian ini di dukung oleh Warman (1997) meyakini bahwa ”Jam kerja merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan”. Adisaputro dan Anggarini (2007) mendefinisikan bahwa ”Jam kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Selanjutnya menurut Handoko (2000) ”Jam kerja merupakan jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

### **Pengertian Transportasi**

Transportasi merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum. Pada kota yang berpenduduk dalam jumlah besar dan mempunyai kegiatan perkotaan yang sangat luas dan intensif, maka diperlukan pelayanan transportasi berkapasitas tinggi dan ditata secara terpadu atau dinamis. Oleh karena itu pada dasarnya transportasi merupakan *derived demand* artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.

Menurut Salim (2006:6) menjelaskan bahwa” transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (mutan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain”. Selanjutnya masih menurut Salim (2006:6) adapun transportasi dibagi dua golongan, yaitu, 1). Angkutan penumpang, untuk pengangkutan penumpang digunakan mobil atau kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya. 2). Selain mobil pribadi digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti, bis, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran samudera luar negeri.

## **METODOLOGI**

### **Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di pandang perlu membatasi ruang lingkungnya sebagai batasan dari penelitian ini. Adapun ruang lingkungnya hanya variabel alokasi waktu dan penghasilan. Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah pos-pos utama ojek (RBT) yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe, yaitu, Simpang Line Pipa, Keude Cunda dan Keude Punteut.

### **Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tukang ojek yang ada di wilayah kota Lhokseumawe. Selanjutnya yang menjadi sampel adalah penarik ojek yang terdapat pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat dengan kriteria tukang ojek yang berpangkalan tetap atau tidak berpindah-pindah tempat. Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* dan masing-masing sampel dalam setiap kecamatan diambil sebanyak 45 responden dan total sampel keseluruhan sebanyak 45 responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode *Applied Scientific Research* yang merupakan perpaduan metode *library research* dan *field research*. Adapun *library reasearch* dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui referensi kepustakaan. Selanjutnya *field research* dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau langsung ke objek penelitian dengan menyebarkan kuisioner langsung kepada responden.

### **Metode Analisis Data**

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel observasi (variabel bebas) terhadap tingkat penghasilan tukang ojek (variabel terikat) di kota Lhokseumawe dilakukan pengujian dengan menggunakan model regresi linear sederhana (*simple regression linear*) yang diolah dengan bantuan program SPSS. Adapun modelnya sebagai berikut:

$$\text{LnY} = \alpha + \text{Ln}bx + e$$

Dimana :

Y = Penghasilan tukang ojek

X = Alokasi Waktu

b = Koefesien regresi

e = Error term

$\alpha$  = Konstanta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penghasilan Tukang Ojek**

Penghasilan yang diperoleh tukang becak di kota Lhokseumawe sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh berbedanya dalam mengalokasikan waktunya dalam menarik ojek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama dalam mengalokasikan waktu dalam menarik ojek maka semakin besar penghasilan yang diperolehnya. Juga sebaliknya semakin sedikit waktu yang dialokasikan dalam menarik ojek maka sedikit pula penghasilan yang diterimanya. Adapun tingkat penghasilan tukang ojek di kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel 1-1 di bawah ini.

**Tabel 1: Tingkat Penghasilan Tukang Ojek di Kota Lhokseumawe**

No	Rata-Rata Penghasilan per hari (Rp)	Frekwensi (Orang)	(%)
1	50.000	6	13.3
2	60.000	3	6.7
3	70.000	9	20.0
4	80.000	11	24.4
5	90.000	6	13.3
6	100.000	6	13.3
7	110.000	1	2.2
8	120.000	3	6.7
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa rata-rata penghasilan tukang ojek di kota Lhokseumawe yang berpenghasilan Rp.50.000 per hari sebanyak 6 orang (13,3%), berpenghasilan Rp.60.000 sebanyak 3 orang (6,7%), berpenghasilan Rp.70.000 sebanyak 9 orang (20,0%), berpenghasilan Rp.80.000 sebanyak 11 orang (24,4%), berpenghasilan Rp.90.000 dan Rp.100.000 masing-masing sebanyak 6 orang (13,3%), dan berpenghasilan Rp.110.000 sebanyak 1 orang (2,2%), serta yang berpenghasilan Rp.120.000 sebanyak 3 orang (6,7).

### Alokasi Waktu Tukang Ojek

Dalam bekerja tukang ojek tidak mengenal yang namanya jam kerja normal atau jam kerja standar, menurut mereka dalam mengalokasikan waktu untuk menarik ojek sesuai dengan keinginan mereka dan sangat tergantung dengan kondisi dan situasi tertentu. Alokasi waktu merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penghasilan tukang ojek. Adapun Alokasi waktu tukang ojek di kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2: Tingkat Alokasi Waktu Tukang Ojek di Kota Lhokseumawe**

No	Rata-Rata Alokasi Waktu per hari(Jam)	Frekwensi (Orang)	(%)
1	6.00	2	4.4
2	7.00	7	15.6
3	8.00	10	22.2
4	9.00	13	28.9
5	10.00	4	8.9
6	11.00	1	2.2
7	12.00	5	11.1
8	13.00	3	6.7
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.0</b>

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat rata-rata alokasi waktu tukang ojek di kota Lhokseumawe yang mengalokasikan waktu 6 jam sebanyak 2 orang (4,4%), yang mengalokasikan waktu 7 jam sebanyak 7 orang (15,6%), yang mengalokasikan waktu 8 jam sebanyak 10 orang (22,2%), yang mengalokasikan waktu 9 jam sebanyak 13 orang (28,9%), yang mengalokasikan waktu 10 jam sebanyak 4 orang (8,9%), yang mengalokasikan waktu 11 jam hanya 1 orang (2,2%), dan yang mengalokasikan waktu 12 jam sebanyak 5 orang (11,1%), serta yang mengalokasikan waktu 13 jam sebanyak 3 orang (6,7%).

### Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi berguna untuk melihat sejauhmana hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis koefisien korelasi (R) ditemukan sebesar 0,907. Hal ini berarti hubungan variabel dependen yaitu penghasilan tukang becak terhadap variabel independen yaitu alokasi waktu sebesar 90,7%. Selanjutnya koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur sejauhmana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi didapatkan (R Square) sebesar 0,822. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu alokasi waktu dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu penghasilan tukang ojek di Kota Lhokseumawe sebesar 82,2% , sedangkan sisanya 17,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini (Tabel 3)

**Tabel 3: Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.907 (a)	.822	.818	.10512

a Predictors: (Constant), Alokasi Waktu

Sumber : Hasil Penelitian, 2010 (Data diolah)

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji parsial yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen secara statistik. Adapun hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4: Pengujian Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8851	.172		51.591	.000
Alokasi Waktu	1103	.078	.907	14.102	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2010 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik melalui program SPSS seperti terlihat pada Tabel 4 di atas, maka dapat dimasukkan dalam persamaan regresi linear sederhana (*simple regression linear*) adalah sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 8.851 + 1.103\text{LnX}$$

Dari estimasi terhadap variabel observasi didapatkan nilai persamaannya adalah konstanta (a) sebesar 8851 yang berarti bahwa walaupun tidak ada variabel alokasi waktu maka penghasilan tukang ojek tetap sebesar 8.851. Selanjutnya nilai koefisien alokasi waktu sebesar 1.103, ini berarti bahwa apabila alokasi waktu bertambah 1 jam maka dapat meningkatkan penghasilan tukang ojek sebesar Rp. 1.103 dengan asumsi *ceteris paribus*.

Kemudian hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien thitung variabel alokasi waktu adalah sebesar 14.102, sedangkan ttabel sebesar 2,021 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%) dengan  $df = n-1$  ( $45-1$ ) = 44. Dengan demikian thitung > ttabel (14.102 > 2,021) atau tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , yang berarti alokasi waktu berpengaruh signifikan terhadap penghasilan tukang ojek di kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Efendi (2003) yang menemukan bahwa variabel alokasi waktu berpengaruh terhadap penghasilan. Kemudian Megantara (2003) menemukan dalam penelitiannya bahwa variabel alokasi waktu berpengaruh terhadap pendapatan. Penelitian itu juga sejalan dengan hasil penelitian Simanjuntak (2004) yang menemukan bahwa alokasi waktu berpengaruh terhadap pendapatan. Kemudian juga konsisten dengan hasil penelitian Simamora (2006) juga menemukan bahwa variabel alokasi waktu berpengaruh terhadap pendapatan.

## **KESIMPULAN**

Tingkat penghasilan tukang ojek sangat dipengaruhi oleh alokasi waktu, semakin lama waktu yang dialokasikan untuk menarik ojek maka semakin tinggi penghasilan yang diterimanya, juga sebaliknya semakin sedikit waktu yang dialokasikannya maka semakin rendah tingkat penghasilan yang diterimanya. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel atau tingkat signifikansinya jauh lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa alokasi waktu berpengaruh signifikan terhadap penghasilan tukang ojek di kota Lhokseumawe.

## **REKOMENDASI**

Diharapkan kepada tukang ojek yang beroperasi di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe selalu mengambil kesempatan dan peluang untuk menambah alokasi waktu dalam menarik ojek, karena dengan menambah alokasi waktu tersebut dapat meningkatkan tingkat penghasilannya. Disamping itu juga hendaknya tukang ojek selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpangnya, dengan demikian penumpang yang pernah mendapatkan jasa ojek tersebut selalu loyal kepada jasa yang diberikannya dan akan menjadi langganan tetap, dan juga agar

selalu memperhatikan kondisi ojeknya, biasanya calon penumpang sangat selektif dalam memilih kondisi ojek yang akan ditumpangnya. Apabila kondisi ojeknya bagus maka banyak dari penumpang akan menumpang ojek tersebut, dengan demikian dapat meningkatkan tingkat penghasilannya.

## REFERENSI

- Adisaputro, Gunawan dan Yunita Anggarini. 2007. *Anggaran Bisnis “Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian Laba*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Boediono. 1999. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djojohandikusumo, S. 1991. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta
- Efendi. Ahmad. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penghasilan Pedagang Kaki Lima Pasar Singosari Malang*, Tesis Universitas Brawijaya, Malang
- Handoko, Hani. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi 1, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kiesno, et.al. 2002. *Akuntansi Intermediate*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Emil Salim, Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua, AMP-YKPN, Yogyakarta
- Longenecker, et.al. 2001. *Kewirausahaan “Manajemen Usaha Kecil”*, Buku 1., Salemba Empat, Jakarta
- Madura, Jeff. 2001. *Pengantar Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Megantara, Puput Hari. 2003. *Alokasi Waktu Dan Pendapatan Pedagang Keliling (Studi Kasus di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang)*, Penerbit UPT Perpustakaan Muhammadiyah, Jakarta
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Ningsih, Surya. 2001. *Manajemen Pemasaran*, Pelita, Jakarta
- Niswonger. 1996. *Peranan Industri Kecil dan Pendapatan Rakyat*. Liberty, Jakarta
- Noor, Henry Faizal. 2000. *Ekonomi Manajerial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurdirman. 2001. *Manajemen Tugas, Tanggung Jawab, Praktek*, Gramedia, Jakarta
- Nusantara, Ambo Wonua (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Pada Sektor Non Farm Di Pedesaan Jawa: Eksplorasi Data Sakerti 2000*, Thesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Rizal. 2001. *Teknik-Teknik Manajemen Modern*, Pena Tinta, Jakarta
- Salim, Abbas. 2007. *Manajemen Transportasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Schroeder, G. Roger. 1989. *Manajemen Operasi “Pengambilan Keputusan Dalam Suatu fungsi Operasi*, Jilid I, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Ivonne Pongoh, Erlangga, Jakarta
- Simanjuntak, Agustinus Sangapan Wantonius. 2004. *Analisis Pendapatan Pedagang Rokok Pekerja Sektor Informal Dalam Mengembangkan Kota Medan*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan

- Simamora, Paul Agustinus. 2006. Analisis Pengaruh Alokasi Waktu Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta
- Warman, John. 1997. *Manajemen Pergudangan*, Alih Bahasa Begdjomuljo. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

**PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP DISIPLIN  
KERJA KARYAWAN PADA PT. POS INDONESIA (Persero)  
LHOKSEUMAWE**

**Sullaida**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kepemimpinan dan motivasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhokseumawe secara simultan maupun secara parsial. Dengan jumlah sampel 32 orang karyawan, Analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi disiplin kerja secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar 64.373, sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikan  $\alpha = 2,042$ , nilai R-Square atau koefisien determinan sebesar 0,811, hal ini menunjukkan bahwa 81,1 % disiplin kerja dipengaruhi oleh kepemimpinan dan motivasi, sedangkan sisanya 18,9 % dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti, sedangkan berdasarkan hasil uji parsial disebutkan bahwa kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan, karena dalam penelitian ini semua variabel diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada tingkat signifikan  $\alpha = 5 \%$ . Uraian jabatan dalam organisasi dan target kerja harus jelas serta pola komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis harus diciptakan sehingga karyawan mampu menciptakan kinerja yang lebih baik. Serta memberikan motivasi kerja kepada karyawan seperti menempatkan karyawan pada tempat yang sesuai serta memberikan keamanan dimasa depan sehingga akan terjadi peningkatan disiplin kerja karyawan disamping pemberian insentif dan memperhatikan harga dirinya.

**Key words:** kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja

## **PENDAHULUAN**

Suatu kenyataan kehidupan organisasional bahwa pimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan, dalam usaha mencapaitujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memang benar bahwa pimpinan, baik secara individual maupun secara kelompok, tidak mungkin dapat bekerja sendirian. Pimpinan membutuhkan sekelompok yang lain, yang dengan istilah populer dikenal sebagai bawahan, yang digerakkan sedemikian rupa sehingga para bawahan itu memberikan pengabdian dan produktif.

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah penting bagi pimpinan atau manajer memperhatikan motivasi kerja karyawan. Karena motivasi sangat penting diperhatikan dan diarahkan mengingat manusia akan bekerja dengan baik, terarah, produktif dan efektif apabila memiliki motivasi yang baik. Karena begitu pentingnya motivasi kerja dalam suatu organisasi, maka pimpinan perlu memberikan motivasi kerja kepada karyawan, hal tersebut penting karena sumber daya manusia dapat bekerja dengan maksimal apabila memiliki motivasi kerja yang tinggi.

Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangkan peraturan, prosedur maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan dan ketrampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Keiner dan Kinichi (2005) kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi dan mendorong orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi.

Sedangkan menurut Koontz dalam Fitri (2009) kepemimpinan adalah suatu pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan penuh kemauan dan antusias.

### **Tipe-tipe Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Jadi tipe kepemimpinan seseorang adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah organisasi.

Menurut Wahjosumidjo (2002) mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut :

- a. Tipe detektif
- b. Tipe konsultatif
- c. Tipe partisipatif

d. Tipe delegatif

Sedangkan menurut Kartono (1993) tipe-tipe kepemimpinan adalah :

- a. Tipe pembelot
- b. Tipe birokrat
- c. Tipe misionaris
- d. Tipe pembangunan
- e. Tipe otokrat
- f. Tipe kompromis
- g. Tipe eksekutif

Jadi gaya atau tipe hidup pemimpin yang berbeda-beda pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinan karena tipe kepemimpinan seseorang yang tercermin dalam kecekatannya mengambil keputusan.

### **Pengertian Motivasi**

Menurut Rivai (2004) Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik yang sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Menurut Moekijat (1995) mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan seseorang untuk mengambil tindakan.

Arep dan Tanjung (2003) berpendapat bahwa Manfaat dari motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang memiliki motivasi adalah terselesainya pekerjaan dengan cepat. Sedangkan pengertian kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan (Hasibuan, 1996).

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi**

Siagian (1997) mengatakan bahwa faktor-faktor motivasi terbagi dua yaitu :

- a. Faktor Internal
  - 1. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri
  - 2. Harga diri
  - 3. Harapan pribadi
  - 4. Kebutuhan
  - 5. Keinginan
  - 6. Prestasi kerja yang dihasilkan
- b. Faktor Eksternal
  - 1. Jenis dan sifat pekerjaan
  - 2. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung
  - 3. Organisasi tempat bekerja
  - 4. Situasi lingkungan pada umumnya
  - 5. System imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.

Selanjutnya menurut Cardos (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah

- a. Faktor-faktor individual

1. Kebutuhan-kebutuhan
  2. Tujuan-tujuan
  3. Sikap
  4. Kemampuan-kemampuan
- b. Faktor-faktor organisasi
1. Pembayaran atau gaji
  2. Keamanan pekerjaan
  3. Sesama pekerja
  4. Pengawasan
  5. Pujian
  6. Pekerjaan itu sendiri

### **Pengertian Disiplin Kerja**

Dalam menjalankan setiap aktivitas atau kegiatan sehari-hari, masalah disiplin sering didefinisikan dengan tepat, baik waktu maupun tempat. Apapun bentuk kegiatan itu, jika dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. Demikian pula dengan ketepatan tempat, jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka predikat disiplin tersebut telah merasuk kedalam jiwa seseorang.

Rivai (2004) berpendapat disiplin kerja salah satu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Sedangkan menurut Siagian (2001), bahwa disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan, dengan kata lain pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerja.

Jadi seseorang karyawan yang dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja**

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap yang diberikan kepadanya. Semakin baik disiplin kerja karyawan pada sebuah perusahaan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Sebaliknya, tanpa disiplin kerja karyawan yang baik, sulit bagi sebuah perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Menurut Nitisemito (1992) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menunjang kedisiplinan adalah :

- a. Kesejahteraan
- b. Ancaman
- c. Ketegasan dalam pelaksanaan kedisiplinan

d. Harus menunjang tujuan dan sesuai dengan kemampuan

Sedangkan menurut Admosuprpto (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah :

- a. Kesejahteraan
- b. Keadilan
- c. Ketegasan dalam pelaksanaan disiplin
- d. Kedisiplinan perlu dipartisipasikan
- e. Kedisiplinan harus menunjang tujuan dan sesuai dengan kemampuan
- f. Teladan pimpinan kunci kedisiplinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pos Indonesia Cabang Lhokseumawe. Dengan jumlah sampel 32 orang karyawan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data skunder dan data primer. Jenis Penelitian yang dilakukan dengan metode survey, sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh variabel bebas ( $X_1$ , dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ) digunakan model regresi berganda (multi regression) dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Disiplin Kerja

$X_1$  = Kepemimpinan

$X_2$  = Motivasi

a = Konstanta

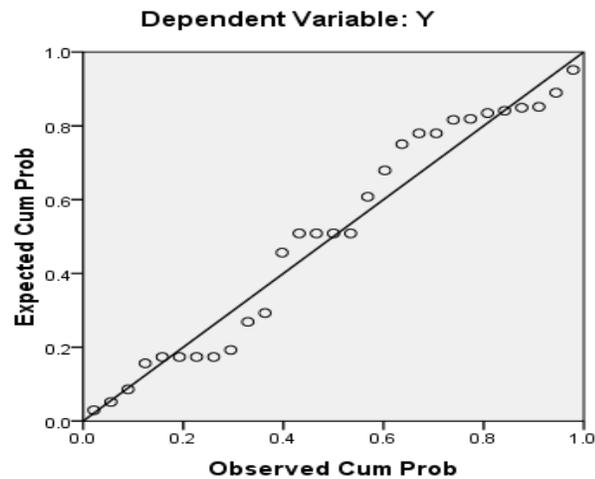
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Estimasi Model

$\varepsilon$  = Variabel Pengganggu (error)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Ketentuannya yang harus dipenuhi yakni jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresinya memenuhi asumsi normalitas (Gujarati, 2003).

**Gambar 1: Normalitas Data****Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

Gambar 1 diatas memperlihatkan data menyebar disekitar garis diagonal dan memiliki arah garis diagonal, maka data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Goodness of Fit Model

Pengujian goodness of fit model dilakukan untuk melakukan kelayakan suatu model regresi, yang dilihat dari nilai R – Square. Nilai R – Square yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1: Tabel Model Ringkasan**

R	R <sup>2</sup>	R <sup>2</sup> d disesuaikan	Standar kesalahan	Keterangan
0.901	0.811	0.798	0.17123	Korelasi kuat

Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

Terlihat pada tabel 1 di atas bahwa nilai Koefisien Korelasi (R) adalah positif 0,901, menunjukkan bahwa kepemimpinan dan motivasi memiliki hubungan/relasi searah dengan Disiplin kerja, dengan kata lain kepemimpinan dan motivasi yang baik akan diikuti dengan tingginya disiplin kerja karyawan, demikian pula sebaliknya kepemimpinan dan motivasi yang buruk akan diikuti dengan rendahnya disiplin kerja karyawan.

Nilai Koefisien Diterminasi (R – Square) diatas menunjukkan bahwa 81,1% variasi dari disiplin kerja dapat dijelaskan oleh kepemimpinan dan motivasi. Atau secara praktis dapat dikatakan Kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi disiplin kerja sebesar 81,1% sedangkan 18,9% disebabkan faktor lain yang tidak diteliti. Untuk melihat apakah variasi tersebut terjadi secara kebetulan atau tidak (model layak atau tidak layak digunakan). Pengujian dilanjutkan dengan melihat nilai variance F

**Tabel 2: ANOVA<sup>b</sup>**

Keterangan	Jumlah kuadrat	Derajat kebebasan	Rata-rata kuadrat	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Sig.
Regresi	3.775	2	1.887	64.372	2.920	.000(a)
Sisa	0.880	30	.029			
Total	4.654	32				

Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

Nilai F<sub>hitung</sub> diatas sebesar 64.372 dengan nilai signifikan  $0.000 < \text{probabilitas } 0,05$ . Hal ini menunjukkan adanya kelayakan model (goodness of fit model).

### Pengujian Multicolonealitas

Multikolonealitas adalah pengujian untuk melihat adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua yang menjelaskan model regresi (Gujarati, 2003). Menurut Levisne, Brensson dan Stephan (1997) terjadi multikolonealitas moderat jika nilai VIF lebih besar dari 5.

**Tabel 3: Nilai Variance Inflating Factor (VIF) Variabel Bebas**

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kepemimpinan	0.575	1.740	Non Multikolinieritas
Motivasi	0.575	1.740	Non Multikolinieritas

Sumber : Hasil Penelitian 2009 (data diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk Faktor Individu dan Faktor Lingkungan Organisasi lebih dari 5, sehingga tidak terjadi multikolonealitas dalam variabel independen penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

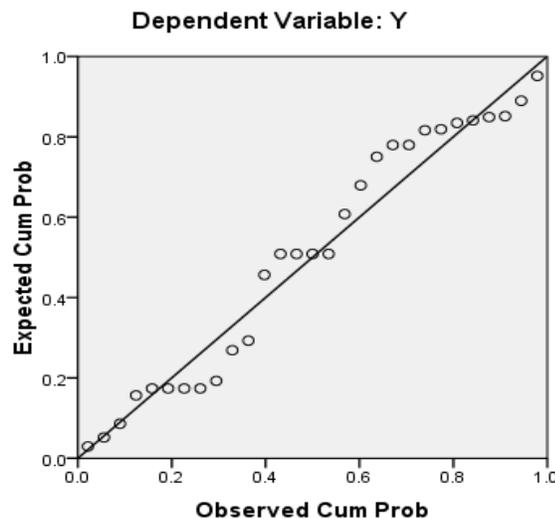
Pengujian heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas.

Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedestisitas (Gujarati, 2003), ketentuan yang harus dipenuhi adalah jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik

(poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedestisitas, namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedestisitas (Santoso, 2000).

**Gambar 2: Heterokedestisitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

Gambar 2. memperlihatkan titik-titik (poin-poin) tidak membentuk pola yang jelas, teratur, menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga terjadi heterokedestisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

### **Pengujian Hipotesis**

Dari uji Good of Fit dan pengujian pelanggaran asumsi klasik disimpulkan bahwa model yang ditencanakan dalam penelitian dapat digunakan .

Berdasarkan Tabel 4 : model tersebut diformulasikan sebagai berikut

$$Y = -0,048 + 0,710X_1 + 0,301X_2$$

**Tabel 4: Nilai Koefisien Regresi**

Nama Variabel	B	Standar Kesalahan	Beta	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tanel</sub>	Sig.
Kepemimpinan	0.710	0.110	0.675	6.451	2.042	0.000
Motivasi	0.301	0.105	0.300	2.868	2.042	0.007

Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

**Uji F (Simultan)**

Pengujian hipotesis gabungan dapat diuji dengan analisis varians yang dapat dilihat dari nilai F. Nilai F memberikan suatu pengujian hipotesis nol, bahwa koefisien kemiringan yang sebenarnya secara simultan adalah nol. Jika nilai F yang dihitung melebihi F kritis dari tabel F pada tingkat arti  $\alpha = 0,05 \%$ , maka ditolak  $H_0$ , jika tidak maka  $H_0$  diterima (Gujarati, 2003).

**Tabel 5: ANOVA<sup>b</sup>**

Keterangan	Jumlah kuadrat	Derajat kebebasan	Rata-rata kuadrat	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Sig.
Regresi	3.775	2	1.887	64.372	2.920	.000(a)
Sisa	0.880	30	.029			
Total	4.654	32				

Sumber : Hasil Penelitian 2010 (data diolah)

Dari Tabel 5. di atas, diperoleh nilai F<sub>hitung</sub> 64.372 dengan tingkat signifikan 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh F<sub>hitung</sub> sebesar 64.372 lebih besar dari F<sub>tabel</sub> 2,92 pada tingkat kepercayaan 95 % atau  $\alpha = 0,05$ . maka hal ini memberikan arti bahwa variabel bebas yaitu Kepemimpinan dan motivasi secara serempak berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Dengan demikian  $H_0$  yang menyatakan tidak terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Pos Indonesia (Persero) ditolak. Dengan kata lain diterima  $H_a$  yang menyatakan terdapat pengaruh Kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) di terima.

**Uji t (Parsial)**

Hasil uji parsial faktor individu dan lingkungan perusahaan terhadap kineja dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

**Tabel 6: Hasil Uji Parsial**

Nama Variabel	B	Standar Kesalahan	Beta	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.
Kepemimpinan	0.710	0.110	0.675	6.451	2.042	0.000
Motivasi	0.301	0.105	0.300	2.868	2.042	0.007

Sumber : Hasil Penelitian 2009 (data diolah)

Berikut ini akan diuji satu persatu pengaruh masing-masing variabel iklim organisasi terhadap kepuasan kerja :

**Pengaruh faktor individu terhadap kinerja**

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai t<sub>hitung</sub> pengaruh variabel Kepemimpinan ( $X_1$ ) sebesar 6.451 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t<sub>tabel</sub> pada tingkat

kepercayaan 95 % atau  $\alpha = 0,05$  adalah 2,042 ini berarti bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $6,451 > 2,042$ ). Maka dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan mempengaruhi secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Dari hasil uji signifikan tersebut maka  $H_0$  ditolak, dan sebaliknya  $H_a$  yang menyatakan bahwa kepemimpinan pada disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) dapat mempengaruhi secara signifikan dapat di terima.

### **Pengaruh Faktor Lingkungan Organisasi terhadap Kinerja**

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai  $t_{hitung}$  pengaruh variabel motivasi ( $X_2$ ) sebesar 2.868 dengan nilai signifikan 0,007, sedangkan  $t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95 % atau  $\alpha = 0,05$  adalah 2,042 ini berarti bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,868 > 2,042$ ). Maka dapat dikatakan bahwa variabel motivasi mempengaruhi secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan. Dari hasil uji signifikan tersebut maka  $H_0$  ditolak, dan sebaliknya  $H_a$  yang menyatakan bahwa motivasi terhadap disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia Muda (Persero) dapat mempengaruhi secara signifikan dapat di terima.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- a. Hasil pengujian secara simultan bahwa kepemimpinan dan motivasi menunjukkan hubungan yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 64.372, sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  adalah sebesar dan kedua variabel (Kepemimpinan dan motivasi) dapat memberikan pengaruh positif terhadap disiplin kerja dibuktikan dengan nilaisbesar 0.811. hal ini berarti bahwa dengan adanya kepemimpinan dan motivasi kerja yang baik akan diikuti dengan disiplin kerja karyawan yang baik pula.
- b. Faktor Kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi disiplin kerja yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berarti bahwa pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan serta komunikasi dua arah yang biasa dilakukan antara bawahan dengan pimpinan sehingga bisa meningkatkan disiplin kerja karyawan, karena karyawan merasa dilibatkan dalam segala keputusan yang diambil oleh pimpinan.

### **Saran**

- a. Dalam rangka meningkatkan Disiplin kerja karyawan, maka uraian jabatan dalam organisasi dan target kerja harus jelas serta pola komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis harus diciptakan sehingga karyawan mampu menciptakan kinerja yang lebih baik.
- b. Diharapkan kepada perusahaan untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan harus mampu memberikan motivasi kerja kepada karyawan seperti menempatkan karyawan pada tempat yang sesuai serta memberikan keamanan dimasa depan

sehingga akan terjadi peningkatan disiplin kerja karyawan disamping pemberian insentif dan memperhatikan harga dirinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimin (1998), *Matodologi Penelitian*, Edisi baru, Penerbit Rineka Cipta, Yoqyakarta.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja>, dikunjungi tanggal 5 oktober 2010
- Gomes, F. Cardoso, (1997), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset. Yoqyakarta.
- Gujarati, D. (2001), *Ekonometrika Dasar*, Penerjemah Sumarno Zain, Erlangga Jakarta
- Marihot Tua Effendi Hariandja, (2005), *Manajemen Sumber Daya Manusia, pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan peningkatan Produktivitas Pegawai*, cetakan ke 3 Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Mangkunegara, A.A.A.P, (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, penerbit Rosda Karya Bandung.
- Nitisemito, Alex S, (2000), *Manajemen Personalialia : Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rivai Veithzal, (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, Edisi I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian P, Sondang (2001) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara Jakarta

## **BEBERAPA FAKTOR KUNCI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

**Azhar**

**Abstract:** *The Objectives of conceptual paper are provide an understanding of Corporate Social Responsibility is not a new discourse again. Various parties are already campaigning for the importance of corporate social responsibility, both to maintain continuity of production until the goal is to build social legitimacy. Companies can no longer simply apply principle is the business of bussines bussines however, companies should be responsible for social problems surrounding it. Corporate Social Responsibility is an action or a concept made by the company as a form of social responsibilities to the environment surrounding the company is located. Corporate Social Responsibility is associated with corporate governance and business ethics procedures. Good corporate governance is expected to make CSR more effective and efficient company (Wise and Ali, 2009). Wartick and Cochran (1985) described the existence of an evolutionary model of social performance by focusing on three challenges the concept of CSR, are economic responsibility, public responsibility, and social responsibility. There are some basic keys that encourage better CSR, are enlightened self-interest, social investment, transparency and trust, incresed public expectation of business (Anonymous, 2004).*

**Key words:** *CSR, effective and efficient, company*

## PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. *Corporate Social Responsibility* timbul ketika era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability* ([www.usaha-kecil.com/pengertian\\_csr.html](http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html)). *Corporate Social Responsibility* akan berdampak lebih positif bagi masyarakat, tergantung orientasi dan kapasitas lembaga atau organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Studi Bank Dunia ([www.usaha-kecil.com/pengertian\\_csr.html](http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html)).

Wacana *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini bukan merupakan wacana baru lagi. Berbagai pihak sudah mengkampanyekan pentingnya tanggungjawab sosial ini bagi perusahaan, baik untuk menjaga kelangsungan produksi sampai tujuan membangun legitimasi sosial. (Wahyudi dan Azheri, 2008) mengatakan masih terdapat perbedaan pendapat hakekat tanggungjawab sosial perusahaan. Jika ditelusuri secara ontologis CSR berkaitan erat dengan konsepsi mengenai fungsi dasar kegiatan bisnis dan hubungannya dengan institusi lain dalam masyarakat, termasuk pemerintah. Bila ditinjau lebih dalam lagi pertentangan muncul sangat erat dengan landasan filsafat serta pandangan etika moral bisnis. Wahyudi dan Azheri (2008) juga menyebutkan tantangan dan perubahan lingkungan menciptakan peluang baru dan mengharuskan setiap perusahaan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Tampaknya perusahaan tidak bisa lagi hanya menerapkan prinsip “*the business of bussines is bussines*” tetapi, perusahaan hendaknya bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial disekitarnya termasuk soal pengangguran, kemiskinan, perempuan termarginalkan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, gizi buruk, kelaparan, pendidikan untuk semua, kerusakan lingkungan, tantangan dan perubahan lingkungan menciptakan peluang baru dan memaksa bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

## KONSEPSI TEORITIS

### Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Berbagai definisi *Corporate Social Responsibility* yang ditemukan dalam literature, Tetapi masih didapatkan definisi yang tidak jelas ketika di lihat dari berbagai aspek, seperti aspek politik, sosial, keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. *Corporate Social Responsibility* telah menjadi hal yang diperbincangkan dalam berbagai diskusi yang terkait dengan kebijakan publik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan

lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/ fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada ([www.usaha-kecil.com/pengertian\\_csr.html](http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html)).

*Corporate Social Responsibility* adalah sesuatu yang dihubungkan dengan *governance* perusahaan dan prosedur etika bisnis (Wise dan Ali ,2009). Tauginiene (2010) **menyatakan** bahwa CSR merupakan kegiatan khusus bagi perusahaan besar dan tidak bagi perusahaan kecil. Oyama menjelaskan bahwa pelayanan CSR akan membuat klien perusahaan lebih tertarik, meningkatnya profit, dan membuat perusahaan lebih berbeda dipandang masyarakat. *Corporate Social Responsibility* menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari top management perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik.

Menurut *Positive Outcome website*, CSR merepresentasikan kontribusi perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan bisnis mereka. Hal tersebut berupa investasi sosial dan program bantuan yang dari bagian kebijakan publik. beberapa definisi. Pertama memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membangun sosial kemasyarakatan. Kedua, membangun integrasi secara sukarela oleh perusahaan, peduli lingkungan sosial dalam kegiatan keuangan perusahaan serta hubungan dengan berbagai stakeholder. Definisi lain dari CSR adalah kegiatan yang terdiri dari unilateral dan voluntir, kebijakan lingkungan sosial dengan alternative instrumen dengan perjanjian kerja sama bukan legislasi atau penawaran tapi *partnership* dengan berbagai pihak (Fanteneau, 2003).

### **Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance**

*Corporate Social Responsibility* adalah berhubungan dengan *governance* perusahaan dan prosedur etika bisnis. *Governance* perusahaan yang baik diharapkan dapat membuat CSR perusahaan lebih efektif dan efisien (Wise dan Ali ,2009). Indikasi *Corporate governance* terlihat dari prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan untuk mempertahankan tujuan tertentu, visi dan misi perusahaan sesuai dengan keinginan stockholder, karyawan, konsumen, pemasok, dan peraturan para agensi dan masyarakat umum, atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham. *Corporate governance* sangat tergantung atas kinerja para manajerial atas pertimbangan yang baik atas *social responsibility*, dan dimensi kultur lingkungan sosial dari prosedur bisnis, hukum dan etika, berfokus konsumen dan *stakeholder* dari organisasi lainnya.

Menurut Bangladesh *Enterprise Institute* (2004) pelaksanaan kegiatan CSR akan berpotensi memberikan manfaat. Manfaat terpenting implementasi CSR adalah tingginya rasa nasionalisme dengan perbaikan prosedur dan persepsi bisnis

internasional termasuk perbaikan praktik etika bisnis. Anderson (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa bahwa tingginya tekanan kepada perusahaan Amerika pada persaingan global dan peraturannya khususnya di Uni Eropa dan Japan. Anderson merekomendasikan adanya strategi untuk pengembangan yang berkelanjutan dari risiko sistem *governance* dengan mengeksplorasi beberapa pertimbangan seperti; penurunan biaya risiko, peningkatan keunggulan bersaing, memperbaiki *image* masyarakat, menaikkan reputasi, meningkatkan keuntungan dan menaikkan kinerja saham.

Wartick dan Cochran (1985) menggambarkan adanya sebuah evolusi model kinerja sosial dengan memfokuskan pada konsep tiga tantangan CSR, yaitu *responsibility* ekonomi, *responsibility public*, dan tanggung jawab sosial. Wood (1991) mendefinisikan kinerja *corporate social* dan memformulasikan dalam hubungan koheren integratif, dalam format riset bisnis, dan sosial kemasyarakatan. Prinsip sosial *responsibility* merupakan satu prinsip dalam satu bingkai institusional, organisasional, dan tingkat individual. Proses *responsiveness* sosial ditentukan penilaian lingkungan, *governance stakeholder*, dan isu pemerintahan, dan hasil kinerja dari pengaruh program sosial dan kebijakannya (Wise dan Ali, 2000).

Batra, Kaur dan Dangwal (2007) berpendapat bahwa untuk mencapai standar *corporate governance*, tekanan internal dan cobaan dan persaingan pasar maka dilakukan efektifitas dari penegakan peraturan agensi. Hal yang sama perlu juga diperintahkan bagi regulator untuk memperluas peran yang efektif untuk menyampaikan good corporate governance yang terbaik. *Corporate social responsibility* diberikan hak yang memungkinkan untuk mencoba membuat aksi perusahaan yang lebih legitimatif.

Hoffman dan Frederick, dan Schwartz (2001) dalam penelitiannya yang menganalisis prinsip perusahaan dan bagaimana mengelola perusahaan lebih etis dan bermoral. Iman dan Malik (2007) menemukan adanya peningkatan *good governance* pada perusahaan *holding* asing. Mereka juga menemukan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan yang dimiliki pemegang saham institusional yang memiliki insentif untuk memonitor dan mengawasi perilaku perusahaan.

### **Manfaat CSR**

Sebagaimana diketahui saat ini untuk mengurangi kemiskinan dan pengembangan yang berkelanjutan tidaklah semata-mata dilakukan oleh pemerintah sendiri. Konsep CSR merupakan salah satu konsep yang sangat berperan dari perusahaan bisnis untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sejumlah isu pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi pusat isu internasional. Isu-isu tersebut seperti standar buruh, Hak Azasi Manusia, pendidikan, kesehatan, buruh anak-anak, pengurangan kemiskinan, konflik dan dampak lingkungan Kivuitu, *et.al.* (2006). Karena itu, saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (Effendi, <http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/implementasi-good-corporate-governance-melalui-corporate-social-responsibility/>)

### **Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Penerapan *Corporate Social Responsibility***

*Corporate social responsibility* menjadi kegiatan penting dalam bisnis nasional maupun internasional. Globalisasi dan korporasi perusahaan besar sebagai *provider* besar telah memberikan manfaat dari program CSR di berbagai tempat (Anonim, 2004). Sekarang ini, CSR menjadi hal fundamental bisnis dan telah menjadi perhatian para CEO perusahaan, dewan direksi dan team eksekutif manajemen perusahaan besar. Mereka memahami bahwa program CSR yang kuat akan menjadi elemen penting untuk mencapai perusahaan yang baik dan kepemimpinan yang efektif. Perusahaan nantinya akan menentukan dampak kehadirannya terhadap sosial dan lingkungan sekitar secara langsung berhubungan dengan *stakeholder*. Khususnya investor, karyawan, konsumen, bisnis partner, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan secara jelas CSR telah mempercepat beberapa hal, yang esensinya bergerak dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, dengan keadaan ekonomi pasar dan masyarakat yang kondusif. Ada beberapa kunci pokok yang mendorong CSR lebih baik, yaitu:

1. *Enlightened self Interest*. perusahaan hendaknya menciptakan sinergi dan etika, membangun hubungan sosial dan pasar ekonomi global yang berkelanjutan, tenaga kerja dan masyarakat yang dapat bekerja sama.
2. *Social investment*. Perusahaan hendaknya berkontribusi terhadap infrastruktur fisik, sosial *capital* untuk meningkatkan bagian kerja dari bisnisnya.
3. *Transparancy and Trust*. Perusahaan yang memiliki *rating* persepsi rendah di masyarakat, maka untuk meningkat harapannya perusahaan harus lebih terbuka, akuntabel, dan memperbaiki laporan ke masyarakat tentang lingkungan dan sosial mereka.
4. *Increased public expectation of business*. Perusahaan global diharapkan bekerja lebih dari pekerjaan yang disediakan dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi melalui pajak dan penyediaan lapangan kerja (Anonim, 2004).

Sedangkan Thiel (2010) yang melakukan penelitian di Singapura menemukan 7 (tujuh) kunci yang mesti dipelajari untuk menghasilkan model CSR yang inovator. Pertama, model konsentrasi pusat budaya, diikuti oleh personal dan kelompok etika, ekonomi, hukum, lingkungan dan domain pemerintah. kedua, model konsentrasi pusat *Human resource management* (HRD) yang merupakan konsenstarsi setelah model pertama.

Kesimpulannya, model CSR yang inovator dapat memberikan sumbangan terhadap keberhasilan mengelola perubahan kondisi global ketika organisasi mengalami gelombang yang membutuhkan pengetahuan yang terus menerus, sistem yang baik, transformasi struktur dan proses yang konstan dalam jaringan internal dan eksternal global. Nilai CSR tidaknya hanya bagi *stakeholder* atau sumbangan pemimpin bisnis global, manajer, karyawanpun berperan penting untuk mengurangi konsekuensi globalisasi yang tidak baik dan meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan terhadap masyarakat dan organisasi global (Thiel, 2010)

Adapun tujuh kunci CSR yang perlu dipahami dari penelitian Thiel (2010) Singapura adalah:

1. *Corporate social responsibility* dimulai dari Individual. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak faktor membuat implementasi CSR efektif, tapi faktor individual yang berkeinginan untuk memperbaiki negeri, perusahaan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk diharapkan kepada pemimpin global/ perusahaan mengkaitkan CSR dengan pekerja individual, kepemimpinan dan nilai organisasi sebagai inti strategi bisnis global.
2. Pelaksanaan CSR yang efektif adalah harus secara kolektif dan kolaboratif. keseluruhan praktik CSR global menginginkan pemimpin perusahaan global beserta karyawannya secara simultan berpengetahuan budaya secara bersamaan. Dengan demikian, isu-isu global yang kompleks dapat dipecahkan dengan sukses ketika pemimpin global dan para pekerja individual untuk berkolaborasi.
3. *Corporate social responsibility* dapat meningkatkan *Return on Investment* ketika ekonomi, sosial dan lingkungan berkinerja sama. Jika kinerja ekonomi baik akan berkontribusi untuk bidang sosial. Karena itu, kinerja ekonomi, penting untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan kualitas hidup hal tersebut dikarenakan ekonomi, keunggulan bersaing, dan masyarakat dan sumber daya alam saling berkaitan. Dengan demikian, ROI meningkat ketika organisasi global terintegrasi dengan ekonomi, sosial dan kinerja lingkungan telah sama.
4. *Human Resource Development* dapat memacu *cross cultural* CSR dalam sebuah organisasi global. Sumber daya manusia merupakan modal strategik yang sangat penting dalam perencanaan strategi ekonomi. Sumber daya manusia yang profesional akan membantu kompetensi antar budaya dan manajer untuk bekerja lebih efektif dalam mengelola para pekerja dengan budaya beragam (Osman-Gani dan Chan, 2009). Karena itu HRD berperan dalam meningkatkan daya saing organisasi perusahaan global melalui implementasi CSR yang baik.
5. *Corporate social responsibility* menginginkan etika individu, penegakan hukum, mekanisme pengawasan, struktur, sistem dan praktik bisnis.
6. *Corporate social responsibility* menginginkan para pemimpin global mereka mengintegrasikan antar lintas budaya CSR dalam budaya organisasi. Gaya negoisiasi budaya, dimana berpijak pada negoisiasi strategis dan taktik yang dilakukan manajer dari berbagai manajer yang berbeda budaya merupakan aspek yang sensitif manajemen (Osman-Gani dan Chan, 2009). Karena itu

CSR yang efektif dalam organisasi global yaitu bagaimana pemimpin global memadukan antar lintas budaya dalam budaya organisasi.

7. *Corporate social responsibility* menginginkan dukungan dan intervensi pemerintah. Dukungan pemerintah dan intervensi CSR penting untuk masyarakat dan bisnis global yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap lingkungan sosial sekitar perusahaan itu berada. *Corporate Social Responsibility* adalah berhubungan dengan *governance* perusahaan dan prosedur etika bisnis. *Governance* perusahaan yang baik diharapkan dapat membuat CSR perusahaan lebih efektif dan efisien (Wise dan Ali ,2009). Wartick dan Cochran (1985) menggambarkan adanya sebuah evolusi model kinerja sosial dengan memfokuskan pada konsep tiga tantangan CSR, yaitu; *responsibility* ekonomi, *responsibility public*, dan tanggung jawab sosial. Beberapa kunci pokok yang mendorong CSR lebih baik, yaitu; *Enlightened self Interest. Social investment. Transparency and Trust. Incresed public expectation of business* (Anonim, 2004).

*Corporate social responsibility* dimulai dari Individual. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak faktor membuat implementasi CSR efektif. Pelaksanaan CSR yang efektif adalah harus secara kolektif dan kolaboratif. keseluruhan praktik CSR global menginginkan pemimpin perusahaan global beserta karyawannya secara simultan berpengetahuan budaya secara bersamaan. *Corporate social responsibility* dapat meningkatkan *Return on Investment* ketika ekonomi, sosial dan lingkungan berkinerja sama. Jika kinerja ekonomi baik akan berkontribusi untuk bidang sosial. *Human Research Development* dapat memacu *cross cultural* CSR dalam sebuah organisasi global. *Corporate social responsibility* menginginkan etika individu, penegakan hukum, mekanisme pengawasan, struktur, sistem dan praktik bisnis. *Corporate social responsibility* menginginkan para pemimpin global mereka mengintegrasikan antar lintas budaya CSR dalam budaya organisasi. *Corporate social responsibility* menginginkan dukungan dan intervensi pemerintah. Dukungan pemerintah dan intervensi CSR penting untuk masyarakat dan bisnis global yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Anderson, Dan (2005). *Corporate Survival: The Critical Importance of Sustainability Risk Governance*, iUniverse, inc.
- Anonim (2004). *Corporate Social Responsibility*, Asocio, Policy Paper
- Bangladesh *Enterprise Institute* (2004). *Code of Corporate Governance*, March.
- Batra, Kaur dan Dangwal (2007). *Corporate Governance Disclosure Practices of Indian Companies, Presented in the 9<sup>th</sup> South Asian Governance Forum*, North South University, Dhaka, Bangladesh, Febuary, 24-25.
- Effendi, Arief Muh. <http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/implementasi-good-corporate-governance-melalui-corporate-social-responsibility/>

- Fanteneau, Gerard (2003). *Corporate Social Responsibility*. tjsga/tlwnsiessay
- Hoffman dan Frederick, dan Schwartz (2001). *Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality*, Philosophy, 4<sup>th</sup> Edition.
- Iman dan Malik (2007). *Firm Performance and Corporate Governance through Ownership Structure*, Paper Presented in the fourth the International Business Research Conference on "Research of Difference" January 14-15 BIAM Foundation, Dhaka, Bangladesh.
- Kivuitu, Mumo, Yambayamba dan Fok, Tom (2006). *How can Corporate Social Responsibility deliver in Africa*, iied.org/cred
- Osman-Gani, A.A dan Chan, T.H (2009). *Trends and Challenges of Developing Human Capital in Singapore: An Analysis of Current Practices and Future Trends*, Hum.resour. Dev. Int.12;47-68.DOI:10.1080/13678860802638834
- Tauginiene, Loretta (2010) *Corporate Social Responsibility in the Research Management*, 16<sup>th</sup> EDAMBA Summer Academy
- Thiel, Monica (2010). *Innovation in Corporate Social Responsibility from Global Business Leaders at Panasonic, Thomson Reuters and Nanyang Business School*, American Journal of Economics and Business Administration 2 (2):194-200
- Wahyudi dan Azheri (2008). Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra (2008), *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, penerbit Inspire, Malang
- Wartick dan Cochran (1985). *The Evaluation of the Corporate Social Performance Model*, Academy of governance Review, Vol.10.No.4
- Wise, Victoria, dan Ali, Mahboob Muhammad, (2009). *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Bangladesh with Special Reference to Commercial Banks*, Working Paper No.AIUB-BUS-ECON, 05
- Wood. D (1991). *Corporate Social Performance Revisited*, Academy of Governance review, Vol.16.No.4.October.
- World Business Council on Sustainable Development [www.usaha-kecil.com/pengertian\\_csr.html](http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr.html)
- www. Positive Outcome website

## BEBERAPA KEGIATAN BISNIS ISLAM BERKAITAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Rahmaniar

**Abstract:** *Konseptual paper ini bertujuan untuk melihat beberapa kegiatan bisnis islam berkaitan dengan corporate social responsibility. Corporate social responsibility adalah kegiatan yang terdiri dari unilateral dan voluntir, kebijakan lingkungan sosial dengan alternatif instrumen dengan perjanjian kerja sama bukan legislasi atau penawaran tapi partnership dengan berbagai pihak (Fanteneau, 2003). Corporate social Responsibility dinyatakan lembaga keagamaan berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai dan perilaku individu yang nantinya berpengaruh terhadap lingkungan bisnis (William dan Zinkin, 2010). Islam melihat dua hal dalam pengembangan masyarakat. Pertama, sumber-sumber kebutuhan menjaga agar dapat hidup dan kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan material baik sebagai individu atau dalam masyarakat. Kedua, setiap individu memiliki pemahaman prinsip-prinsip sebagai individu dan perilaku sosial yaitu memenuhi kepentingan individu di satu sisi dan juga bagaimana menjaga keadilan dan keharmonisan sosial (Ahmad, 2003). Tipe-tipe bisnis yang dilarang dalam Islam adalah bisnis yang dapat merusak kesehatan, seperti alkohol, tembakau, menebak dan perjudian), Riba, Bisnis monopolistik. Perdagangan yang didasarkan kepada ketidakpastian*

**Key words:** *CSR, bisnis islam, lingkungan bisnis*

## PENDAHULUAN

Dalam *corporate social Responsibility* (CSR) sering disebutkan bahwa Lembaga keagamaan berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai dan perilaku individu yang nantinya berpengaruh terhadap lingkungan bisnis (William dan Zinkin, 2010). Adanya bagian-bagian yang masih menjadi perdebatan yang menganalisis pengaruh pengajaran agama Islam terhadap perilaku kaum muslim sekarang dalam sikap, etika dalam perusahaan (Ali, 2005; Bekun, 1996; Gambling dan Karim, 1991; Rice, 1999).

Banyak riset empiris yang muncul menunjukkan bahwa orang Islam tidak mungkin peduli tentang perilaku etika bisnis anggota agama lain (Brammer, *et. al.*, 2005; Guiso *et al.*, 2003; William dan Zinkin, 2005). Namun demikian, penelitian terkini dari William dan Zinkin (2010) menemukan tidak ada konflik yang substansial dari CSR antar bagian atau lembaga secara global. Di samping itu juga mereka berpendapat tidak hanya Islam yang menyetujui dengan CSR tapi lebih mengarah pada pemahaman yang terbaik antara Islam dengan barat.

*Positive Outcome website, Corporate social Responsibility* adalah merepresentasikan kontribusi perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan bisnis mereka. Hal tersebut berupa investasi sosial dan program bantuan yang dari bagian kebijakan publik. beberapa definisi. Pertama memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membangun sosial kemasyarakatan. Kedua, membangun integrasi secara sukarela oleh perusahaan, peduli lingkungan sosial dalam kegiatan keuangan perusahaan serta hubungan dengan berbagai stake holder. Definisi lain dari CSR adalah kegiatan yang terdiri dari unilateral dan voluntir, kebijakan lingkungan sosial dengan alternatif instrumen dengan perjanjian kerja sama bukan legislasi atau penawaran tapi *partnership* dengan berbagai pihak (Fanteneau, 2003). Konseptual paper ini bertujuan untuk melihat beberapa hal bagian CSR yang telah diterapkan oleh Islam

## KAJIAN LITERATUR

### Dasar Etika Bisnis Dalam Islam

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ide masyarakat beragama lebih memiliki konsep dalam menjalankan etika bisnis dan CSR dibandingkan dengan masyarakat yang tidak beragama atau non-religious (Agle dan Van Burren, 1999; P.581; Brammer *et al*, 2005; Rest, 1986; Weaver dan Agle, 2002). Dalam Islam pengembangan masyarakat ke dalam kehidupan yang lebih baik dilihat dari dua (2) hal. Pertama, sumber-sumber kebutuhan menjaga agar dapat hidup dan kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan material baik sebagai individu atau dalam masyarakat. Kedua, setiap individu memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip sebagai individu dan perilaku sosial yaitu memenuhi kepentingan individu di satu sisi dan juga bagaimana menjaga keadilan dan keharmonisan sosial di sisi lain (Ahmad, 2003).

Chapra (2005) mengatakan mungkin bagi seorang muslim lebih penting menjaga keseimbangan kebutuhan antara kebutuhan dunia dengan permintaan kebutuhan hari kemudian. Kewajiban untuk memenuhi akan kedua kebutuhan tersebut Islam memandang sebagai suatu ibadah. Ibadah merupakan suatu elemen yang fundamental dalam Islam, ibadah merupakan alasan utama Allah menciptakan

manusia, yang inti Allah mengatakan tidak Kuciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku (Qur'an, 51, ayat, 56).

Menurut Islam ada 5 (lima) elemen dasar dalam Islam. Pertama, mengucapkan dua kalimah syahadat. Kedua, mengerjakan shalat lima waktu setiap hari. Ketiga, berpuasa dibulan Ramadhan, Keempat, membayar Zakat. Dan kelima, naik haji ke Baitullah jika mampu. Bagaimanapun, tidak cukup dengan menjalankan lima elemen dasar tersebut, tapi bagaimana seorang muslim berperilaku dalam semua aspek baik kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan kehidupan bisnisnya.

Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim. Banyak pesan-pesan yang disampaikan dalam Qur'an yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan (Lewis, 2001), dan juga disebutkan bahwa setiap individu harus bekerja untuk Islam (Rahman, 1994). Islam menawarkan konsep *Tazkiyah* (pertumbuhan dan keberhasilan) pada semua kegiatan materi dunia (Gambling dan Karim, 1991, p.33). Semua bentuk kerja dapat dipertimbangkan sebagai tindakan ibadah untuk mencapai pertumbuhan keadilan sosial dan meningkatkan tingkat spritualitas seseorang. Selanjutnya, Dalam kehidupan sehari setiap muslim dihitung ibadah harus memiliki tiga syarat. Pertama, pekerjaan tersebut semata-mata dilakukan ikhlas karena Allah SWT bukan kepada yang lain seperti; cinta dan uang. Kedua, semua kegiatan harus sesuai dengan syariah Islam. Ketiga, semua kegiatan tidak boleh menghilangkan eksistensi sebagai muslim.

### **Definisi Responsibility Bisnis Islam**

*Bisnis Responsible* adalah berbicara tentang cara bisnis dimana tidak mengambil keuntungan lebih banyak dari keuntungan yang seharusnya. Dalam Islam yaitu keberadaan bisnis yang mengambil keuntungan lebih merupakan dikatakan haram. Bisnis Rasulullah SAW tidaklah melakukan seperti yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, Rasulullah sukses sebagai, pedagang ketika beliau menikah dengan Khatijah yang nota benenya sebagai wanita pengusaha.

Tipe-tipe bisnis yang dilarang dalam Islam adalah bisnis yang dapat merusak kesehatan, seperti alkohol, tembakau, menebak dan perjudian). Justifikasi dari pelarangan tersebut telah disampaikan dalam Qur'an yang menyatakan bahwa mereka semua adalah dosa besar (Qur'an, 2. 219).

Di samping itu, Islam sangat melarang Riba. Islam melarang riba karena bunga atau riba bukan suatu cara untuk menambah modal dalam profit. Tapi lebih terkait dengan masalah moral, sosial dan perbaikan ekonomi masyarakat yang hanya memberikan keuntungan tanpa bekerja dan disana tidak ada pembagian risiko antara *lender* dan *borrower* (Al-Qaradawi, 1985 p. 265-270). Islam telah memilih perspektif lain, yang telah memberikan dasar yang berbeda bagi yang memilihnya, dimana sistem tersebut dibangun atas dasar modal bersama dan pembagian risiko dan membangun sistem ekonomi bersama terhadap sistem hutang.

Bisnis monopolistik merupakan bisnis yang sangat dilarang oleh Rasulullah karena mengarah pada pengeksploitasian dan penyimpangan dengan kerja pasar bebas dan mendorong manipulasi harga (Al-Qaradawi, 1985. p.255; Muslim, 2005). Hal selanjutnya Islam juga sangat melarang spekulasi bisnis. Spekulasi didasarkan keseluruhan lebih untuk kepentingan sendiri dan mengenakan biaya kepada

masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah SAW mengatakan yang menimbun barang dan menaikkan harga merupakan dosa besar. Hadist lain pun Rasulullah SAW mengatakan seseorang yang menahan barang lebih dari 40 hari untuk menunggu harga yang tinggi adalah sangat dilarang dalam Islam (Al-Hadist).

Perdagangan yang didasarkan kepada ketidakpastian juga sangat dilarang dalam Islam, karena ada pihak yang tidak mendapatkan keuntungan. Perdagangan seperti ini bias terjadi seperti membeli buah-buahan yang dengan memperkirakan jumlahnya yang masih di pohon yang disebut *muzabana* (Al-Hadist). Bentuk penjualan lain juga dilarang seperti menjual ikan di kolam, burung di udara (Ba'I al Gharar). Hal lain yang tidak dibolehkan dalam Islam adalah pembeli yang tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui atau melihat apa yang dibeli sebelum terjadi transaksi terjadi. Hal tersebut akan menempatkan ketidakadilan dan ketidakberuntungan bagi pembeli (Al-Hadist).

## KESIMPULAN

Definisi lain dari CSR adalah kegiatan yang terdiri dari unilateral dan voluntir, kebijakan lingkungan sosial dengan alternatif instrumen dengan perjanjian kerja sama bukan legislasi atau penawaran tapi *partnership* dengan berbagai pihak (Fanteneau, 2003). Dalam *corporate social Responsibility* (CSR) sering disebutkan bahwa lembaga keagamaan berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai dan perilaku individu yang nantinya berpengaruh terhadap lingkungan bisnis (William dan Zinkin, 2010). Banyak riset empiris yang muncul menunjukkan bahwa orang Islam tidak mungkin peduli tentang perilaku etika bisnis anggota agama lain.

Dalam Islam pengembangan masyarakat ke dalam kehidupan yang lebih baik dilihat dari dua (2) hal. Pertama, sumber-sumber kebutuhan menjaga agar dapat hidup dan kebutuhan untuk melengkapi kebutuhan material baik sebagai individu atau dalam masyarakat. Kedua, setiap individu memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip sebagai individu dan perilaku sosial yaitu memenuhi kepentingan individu di satu sisi dan juga bagaimana menjaga keadilan dan keharmonisan sosial di sisi lain (Ahmad, 2003).

Tipe-tipe bisnis yang dilarang dalam Islam adalah bisnis yang dapat merusak kesehatan, seperti alkohol, tembakau, menebak dan perjudian). Di samping itu, Islam sangat melarang Riba. Islam melarang riba karena bunga atau riba bukan suatu cara untuk menambah modal dalam profit Bisnis monopolistik merupakan bisnis yang sangat dilarang oleh Rasulullah karena mengarah pada pengeksploitasian dan penyimpangan dengan kerja pasar bebas dan mendorong manipulasi harga. Perdagangan yang didasarkan kepada ketidakpastian juga sangat dilarang dalam Islam karena ada pihak yang tidak mendapatkan keuntungan

## REFERENSI

Al-Qur'an

Al-Hadist

Agle dan Van Burren (1999), "God and Mammon: The Modern Relationship". Business Ethics Quarterly 9 (4), 563-582.

- Ahmad, K. (2003). “*An Islamic Perspective*’ in J. Dunning (ed) *Making Globalization Good*” (OUP, Oxford).
- Ali, A (2005), “*Islamic Perspective on Management and Organization*” (Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, England).
- Al-Qaradawi, Y, (1985), “*The Lawful and Prohibited in Islam*” (Islamic Book Trust, Kuala Lumpur).
- Bekun, R.I (1996), “*Islamic Business Ethics*” International Institute of Islamic Thought, Virginia
- Brammer, S.G William, dan Zinking (2005), “*Religion Management and Attitude to Corporate Social Responsibility in a Large Cross Country Sampl*”, Mimeo, Centre for Business Organization and Society, School Of Management, University of Bath
- Chapra, M.U, (2005), “*The future of Economic : An Islamic Perspective (The Islamic Foundation*” Leicester, (147-148).
- Fanteneau, Gerard (2003). “*Corporate Social Responsibility*” tjsga/tlwnsiessay
- Gambling dan Karim, (1991), “*Business and Accounting In Islam Ethics*” Mansell London, p.33
- Guiso, L.P, Sapienza and Zingales, (2003), “*People’s Opium Religion and Economic Attitudes*” Journal of Monetary Economics, (50, 225-282)
- Lewis, M.K., (2001), “*Islam and Accounting*”, Accounting Forum, 25 (2), 103-127
- Muslim, S., (2005), “*The Book Transactions*” Book 10, Kitab Al Buyu  
*Www.Positive Outcome website*
- Rahman, Y. A (1994), “*Interest free Islamic Banking*” Al Hilal Publishing, Kuala Lumpur
- Rest, J.R (1986), “*Moral Development : Advances in Research and Theory*” Praeger, New York
- Rice, G (1999), “*Islamic Ethics and the Implications for Business*” Journal of Business Ethics, 18 (4), 345-358
- Weaver, G.R dan Agle, B.R, (2002), “*Religiosity and Ethical Behavior in Organization: A Symbolic Inter Actionist Perspective*” Academy Management Review, 27 (1),77-97
- William dan Zinkin, (2010),’ *Islam and CSR: A Study of the Compatability Between the Tenets of Islam and the UN Global Compact*, Journal of Business Ethics, 91:519-533
- William, G. dan Zinkin, J (2005), “*Doing Business with Islam: Can Corporate Social Responsibility be a Bridge Between Civilisation*” Mimio (Nottingham University Business School-Malaysia Campus, UK